

LAPORAN KINERJA

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG

2024

LAPORAN KINERJA

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG

2024

Laporan Kinerja

Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2024

No.Publikasi : 16710.2301

Katalog : 1202059.1671

Ukuran Buku : 21x29.7 cm

Jumlah Halaman : vii+110 Halaman/Pages

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Dicetak oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan Sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS - Statistics Indonesia

 **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2024 merupakan wujud pertanggung jawaban atas akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Palembang dalam pencapaian visi dan misi di tahun anggaran 2024. Laporan ini disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan tindak lanjut TAP MPRRI Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengacu pada prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*. Laporan ini sebagai bentuk kepatuhan BPS Kota Palembang terhadap peraturan pemerintah, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Laporan Kinerja ini berisikan analisis capaian kinerja dan perkembangannya selama tahun 2020-2024, analisis capaian kinerja PK suplemen Tahun 2024, Prestasi dan Inovasi BPS Kota Palembang selama Tahun 2024 serta Realisasi dan Efisiensi Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2024. Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus penyempurnaan program dan kegiatan ditahun yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, pimpinan Badan Pusat Statistik Kota Palembang mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini sangat kami hargai.

Palembang, 20 Februari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vii
Ringkasan Eksekutif	viii
Bab I	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kota Palembang 3
1.3	Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran 5
1.4	Potensi dan Permasalahan 10
1.5	Sistematika Penyajian Laporan 14
Bab II	Perencanaan Kinerja
2.1	Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kota Palembang 16
2.2	Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Palembang 2020-2024 21
2.3	Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Palembang Tahun 2024 22
2.4	Perjanjian Kinerja (PK) Suplemen BPS Kota Palembang Tahun 2024 24
Bab III	Akuntabilitas Kinerja
3.1	Capaian Kinerja BPS Kota Palembang 25
3.2	Analisis Capaian Kinerja PK Suplemen Tahun 2024 99
3.3	Prestasi dan Inovasi BPS Kota Palembang Tahun 2024 113
3.4	Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024 122
Bab IV	Penutup
4.1	Tinjauan Umum 133
4.2	Tindak lanjut 134
Lampiran-lampiran	
1	Struktur Organisasi BPS Kota Palembang
2	Reviu Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Palembang 2020-2024
3	Perjanjian Kinerja 2024
4	Pengukuran Capaian Kinerja 2024
5	Daftar Pegawai BPS Kota Palembang
6	Kegiatan BPS Kota Palembang
7	Response Rate
8	Judul Publikasi

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran TA 2024	ix
Tabel 2	: Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2024	ix
Tabel 3	: Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang	6
Tabel 4	: Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	7
Tabel 5	: Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang Menurut Usia Tahun 2024	7
Tabel 6	: Alokasi Pagu Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2024	8
Tabel 7	: Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Tahun 2020-2024	22
Tabel 8	: Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2024	23
Tabel 9	: Perjanjian Kinerja Suplemen Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2024	24
Tabel 10	: Rata-rata Capaian Kinerja Total Wilayah BPS se- Sumatera Selatan Tahun 2024	27
Tabel 11	: Capaian Kinerja Tujuan Pertama BPS Kota Palembang Tahun 2024	31
Tabel 12	: Capaian Kinerja Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%) Triwulanan	32
Tabel 13	: Capaian Kinerja Persentase Publikasi Statistik Yang Menerapkan Standar Akurasi Triwulanan	37
Tabel 14	: Hasil Capaian Kinerja Tujuan Kedua BPS Kota Palembang Tahun 2024	41
Tabel 15	: Capaian Kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%) Triwulanan	42
Tabel 16	: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar Triwulanan	51
Tabel 17	: Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kota Palembang Tahun 2023	53
Tabel 18	: Capaian Kinerja Persentase OPD yang Mendapatkan Pembinaan Statistik Triwulanan	57
Tabel 19	: Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Tahun 2024	61
Tabel 20	: Capaian Kinerja Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Triwulanan	61
Tabel 21	: Capaian Kinerja Persentase Kepuasan Pengguna Data Terhadap Sarana dan Prasarana Pelayanan BPS (%) Triwulanan	65

Tabel 22	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d 2024	68
Tabel 23	: Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dan 2024	70
Tabel 24	: Realisasi Kinerja Renstra 2020 s.d 2024	72
Tabel 25	: Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Renstra Tahun 2024	81
Tabel 26	: Rekapitulasi hasil pendataan SEP2024	88
Tabel 27	: Pemasukan Dokumen Survei KSA Padi dan Jagung Tahun 2024	92
Tabel 28	: Target dan Realisasi Sampel Survei E-Commerce 2024 BPS di Kota Palembang	96
Tabel 29	: Capaian Kinerja PK Suplemen Tujuan Pertama	99
Tabel 30	: Capaian Kinerja PK Suplemen Tujuan Ketiga	106
Tabel 31	Submit Penilaian Mandiri EPSS di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	110
Tabel 32	: Capaian Kinerja PK Suplemen Tujuan Keempat	111
Tabel 33	: Pagu dan Realisasi Anggaran (tanpa blokir) BPS Menurut Program TA 2024	123
Tabel 34	: Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran TA 2024	126
Tabel 35	: Capaian Kinerja, Realisasi dan Nilai Efisiensi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran	128
Tabel 36	: Potensi Penghematan	129
Tabel 37	: Efisiensi Anggaran BPS Kota Palembang	131

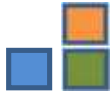
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Susunan Organisasi BPS Kota Palembang	5
Gambar 2	: SDM BPS Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024	6
Gambar 3	: Pagu Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2024	10
Gambar 4	: Pernyataan Visi dan Misi BPS Kota Palembang 2020-2024	18
Gambar 5	: Capaian Kinerja di BPS Provinsi Sumatera Selatan	28
Gambar 6	: Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kota Palembang	34
Gambar 7	: Rapat Revisi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Palembang secara Online dan Offline	36
Gambar 8	: Narasumber pada Rapat/Pertemuan yang Diadakan oleh Instansi	36
Gambar 9	: Publikasi BPS Kota Palembang yang menerapkan standar akurasi	40
Gambar 10	: Penyelenggaraan Rekomendasi Statistik Kota Palembang Tahun 2023	46
Gambar 11	: Pembinaan Statistik Sektoral	48
Gambar 12	: Daftar Pelaporan Metadata Statistik Kota Palembang Tahun 2023	52
Gambar 13	: Focus Grup Discussion Palembang Dalam Angka Tahun 2024	56
Gambar 14	: Pembinaan Desa Cantik di Kelurahan Kemang Agung	59
Gambar 15	: Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengumpulan Data Statistik Kelurahan	60
Gambar 16	: Aplikasi SATU (Sistem Adiministrasi Terpadu)	64
Gambar 17	: Hasil Hitung Cepat Survei Kebutuhan Data	64
Gambar 18	: Persentase kepuasan pengguna data terhadap pemenuhan Sarana dan prasarana pelayanan BPS	65
Gambar 19	: Ruang Pelayan Statistik Terpadu	67
Gambar 20	: Persentase konsumen menurut wilayah PST dan Pekerjaan Utama SKD 2024	73
Gambar 21	: Persentase OPD yang mendapartkan rekomendasi kegiatan statistic	75
Gambar 22	: Realisasi hasil penilaian implementasi Sakip	77
Gambar 23	: Target, Realisasi dan Capaian Renstra 2024	80
Gambar 24	: Pendataan Lapangan PMTB	85
Gambar 25	: Cakupan SE2024	86
Gambar 26	: Pencacahan Lapangan Sensus Ekonomi Pertanian	88
Gambar 27	: Pendataan Lapangan Ubinan Padi	90

Gambar 28	: Pencacahan Lapangan Statistik E-Commerce	94
Gambar 29	: Koordinasi dan Pendampingan Pencacahan ke Ketua SLS/Tetangga	101
Gambar 30	: Solusi dan tindak Lanjut Ke Perusahaan	105
Gambar 31	: Kegiatan Koordinasi dengan Walidata dan Bappeda	108
Gambar 32	: Interview EPSS dengan Tim Penilai dari Kabupaten Ogan Ilir	109
Gambar 33	: Input Nilai IPS untuk Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	110
Gambar 34	: Nilai Kinerja Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2024	114
Gambar 35	: Aplikasi SATU (Sistem Admintrasi Terpadu)	119
Gambar 36	: Manajemen Sertifikat Pegawai	120
Gambar 37	: Instagram Pojok Statistik Universitas Bina Dharma Palembang	121
Gambar 38	: Pojok Statistik di Bina Dharma Palembang	122
Gambar 39	: Himbauan Hemat Air dan Listrik	130
Gambar 40	: Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Renstra 2020-2024	131

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Susunan Organisasi BPS Kota Palembang	137
Lampiran 2	: Reviu Rencana Strategis BPS Kota Palembang 2020-2024	138
Lampiran 3	: Perjanjian Kinerja (PK) 2022	139
Lampiran 4	: Pengukuran Capaian Kinerja BPS Kota Palembang	141
Lampiran 5	: Daftar Pegawai BPS Kota Palembang	143
Lampiran 6	: Kegiatan BPS Kota Palembang 2022	144
Lampiran 7	: Resnponse Rate	147
Lampiran 8	: Jumlah Publikasi BPS Kota Palembang	148



Sejalan dengan Reformasi Birokrasi Nasional, BPS berupaya untuk memperkuat sistem penyediaan data statistik yang akurat dan tepat waktu, sehingga dapat lebih optimal dalam mendukung Indonesia maju melalui visinya sebagai "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju." Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi, maka BPS Kota Palembang memiliki tujuan. Tujuan yang ditetapkan juga mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya.

BPS Kota Palembang memiliki empat tujuan yang dicanangkan dalam Rencana Strategis periode 2020-2024, yaitu:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan,
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN,
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, dan
4. Penguatan tata Kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan sangat penting sebagai sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program-program yang ada. Pada Tahun 2024, penyerapan anggaran di BPS Kota Palembang menunjukkan hasil yang baik, dengan rata-rata penyerapan anggaran sebesar 99,36 persen dan hasil capaian kinerja 109,79 persen. Sasaran penguatan statistik sektoral K/L/D/I mencatatkan penyerapan anggaran tertinggi, yaitu 100 persen, dengan capaian kinerja yang luar biasa sebesar 120 persen. Ini mencerminkan hasil yang optimal dari kegiatan tersebut. Namun, meskipun hasil pembinaan statistik yang dilakukan memberikan dampak yang signifikan bagi BPS Kota Palembang, terdapat penurunan jumlah OPD yang menerima pembinaan statistik, yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar dampaknya tetap maksimal.

Penyerapan anggaran terendah tercatat pada sasaran peningkatan pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan angka penyerapan 98,98 persen. Meskipun demikian, hasil kinerja di sasaran ini tetap menunjukkan capaian yang tinggi. Kendala yang terjadi, seperti keterlambatan pengajuan SPJ oleh pihak terkait menjelang akhir tahun,

mempengaruhi efisiensi penyerapan anggaran. Untuk itu, perbaikan dalam pengelolaan administrasi dan pengajuan SPJ diharapkan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran di masa mendatang.

Tabel 1. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran TA 2024

Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	Capaian Kinerja (%)
1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	2.177.931.000	2.155.766.302	98,98	107,14
2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	21.000.000	20.945.670	99,74	117,69
3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	21.926.000	21.926.000	100,00	120
4. SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	7.710.365.000	7.668.861.625	99,46	99,43
Total	9.931.222.000	9.867.499.597	99,36	109,79

Tabel 2. Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan nasional	Persen	100	100	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi	Persen	100	114,29	114,29
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama					107,14
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN					
Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	100	115,38	115,38
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menyampaikan metadata Sektoral sesuai standar	Persen	92	115,38	120
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua					117,69
3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	100	167,74	120
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan ketiga					120
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					
SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil penilaian implementasi SAKIP	Poin	74,75	74,15	98,87
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat					99,43

Secara keseluruhan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang tahun 2024 menunjukkan keberhasilan yang signifikan dengan nilai capaian kinerja sebesar 109,79 persen. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 107,84 , meningkat sebesar 1,95 persen. Dari 7 indikator terdapat 4 indikator yang realisasinya diatas 100 persen yaitu :

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik dengan target 31 OPD atau 100 persen, BPS Kota Palembang mampu melakukan pembinaan statistik terhadap 52 OPD atau sebesar 167,74 persen.
2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari target 13 OPD dengan realisasi 15 OPD atau sebesar 115,38 persen.
3. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar dari target 12 OPD dengan realisasi 15 OPD atau 115, 38 persen.
4. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi dengan target 7 publikasi dapat diselesaikan 8 publikasi sehingga realisasi anggaran menjadi 114,29 persen.

Diantara capaian kinerja diatas terdapat 1 capaian kinerja yang belum memenuhi target yaitu Hasil Implementasi SAKIP oleh inspektorat. Kegagalan dalam pencapaian hasil penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2024 bisa disebabkan oleh ;

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Sistem Pengukuran Kinerja yang Lemah
3. Keterbatasan dalam Pengelolaan Data dan Informasi
4. Tantangan dalam Perubahan Budaya Kerja

Untuk tahun yang akan datang BPS Kota Palembang akan berusaha meningkatkan kapasitas SDM dan pemantauan dan evaluasi yang lebih ketat, diharapkan BPS Kota Palembang dapat terus meningkatkan kinerja dan efektivitasnya dalam memberikan layanan statistik yang berkualitas, responsif, dan relevan, serta menciptakan dampak positif bagi perencanaan pembangunan daerah dan kepuasan publik.



BABI. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik mengamankan BPS bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyedia data atau informasi sekaligus sebagai koordinator perstatistikan di Indonesia. Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh BPS dengan instansi pemerintah, lembaga penelitian, atau masyarakat, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, sebagai lembaga perwakilan di daerah, bertugas untuk menyediakan data statistik dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, BPS Kota Palembang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2020-2024, yang bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan perstatistikan dengan arah dan tujuan RPJMN 2020-2024.

Pada tahun 2024 BPS Kota Palembang melaksanakan 6 kegiatan prioritas nasional yaitu Pendataan Disagregasi PMTB, Pendataan Sensus Ekonomi Pertanian, Survei *E-Commerce*, Sensus Ekonomi, Statistik Tanaman Pangan dan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area. Pada bulan Mei 2024 BPS Kota Palembang melaksanakan Sensus Ekonomi Pertanian. Melalui kegiatan ini tersedia data ekonomi pertanian yang akurat dan terkini yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah maupun stakeholder dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan-kebijakan baik untuk kepentingan internal maupun untuk pembangunan nasional. Dalam rangka persiapan dan mendukung suksesnya Sensus Ekonomi 2026, BPS Kota Palembang juga melaksanakan updating direktori usaha/perusahaan ekonomi untuk mengidentifikasi keberadaan usaha/perusahaan.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang mengadakan kegiatan rilis *Berita Acara Resmi Statistik* yang dilaksanakan setiap bulan. Kegiatan ini dihadiri oleh Walikota atau Sekretaris Daerah Kota Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas

dalam penyampaian hasil-hasil statistik yang dihasilkan oleh BPS, serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pihak-pihak terkait mengenai pentingnya data statistik dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan koordinasi antara BPS, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat lebih terjalin, serta hasil statistik yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pembangunan Kota Palembang.

Selain meningkatkan kualitas data, BPS Kota Palembang juga berupaya memperkuat akuntabilitas pelaksanaan kegiatannya. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, BPS Kota Palembang menyusun laporan kinerja yang mencerminkan prestasi kerja yang telah dicapai sepanjang tahun 2024. Untuk memberikan arah tahunan bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran yang di amanahkan, BPS Kota Palembang telah pula menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, sasaran, program serta rencana kerja yang terukur dan selaras dengan organisasi BPS Pusat yang dilaksanakan setiap tahun. Pada awal tahun BPS Kota Palembang telah Menyusun Perjanjian Kinerja. Target kinerja yang telah ditetapkan diukur capaiannya dan dipantau secara periodik setiap bulan, triwulanan dan tahunan. Pada akhir tahun dapat diketahui hasil akhir pencapaian target dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tahunan wajib disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga. Hal tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18 yang menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran BPS akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan. Laporan ini juga merupakan bentuk akuntabilitas BPS sebagai penyelenggara negara dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk tahun mendatang.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kota Palembang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan konsitusional BPS yang menyatakan tentang kedudukan dan kewenangannya. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistic dasar. BPS sedang berada dalam masa transisi, mendukung kebijakan pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi, mengurangi tingkat eselon untuk kemudian dialihkan ke jabatan yang bersifat fungsional secara bertahap. Menggunakan dasar hukum Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, dan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, pada masa transisi ini. Mengingat Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 telah ditetapkan pada 16 Mei 2023.

1.2.1. Kedudukan

Kedudukan BPS Kota Palembang adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. BPS Kota Palembang dipimpin oleh seorang Kepala. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi.

1.2.2. Tugas

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, pasal 3 disebutkan bahwa BPS Kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

1.2.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kota Palembang menyelenggarakan fungsi:

- 1.3. Penyelenggaraan statistic dasar di Kota Palembang.
- 1.4. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota Palembang.
- 1.5. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistic di Kota Palembang.
- 1.6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara. Perlengkapan dan rumah tangga BPS Kota Palembang

1.2.4. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kota Palembang, yaitu:

1.2.4.1. Kepala

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palembang mempunyai tugas memimpin BPS Kota Palembang sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kota Palembang serta membina aparatur BPS agar berdaya guna dan berhasil guna.

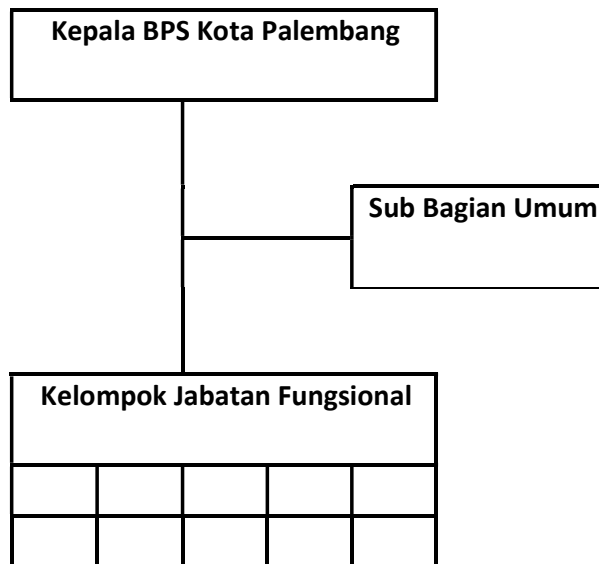
1.2.4.2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga.

1.2.4.3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi dan BPS Kota Palembang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Gambar 1. Susunan Organisasi BPS Kota Palembang:



1.3. Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran

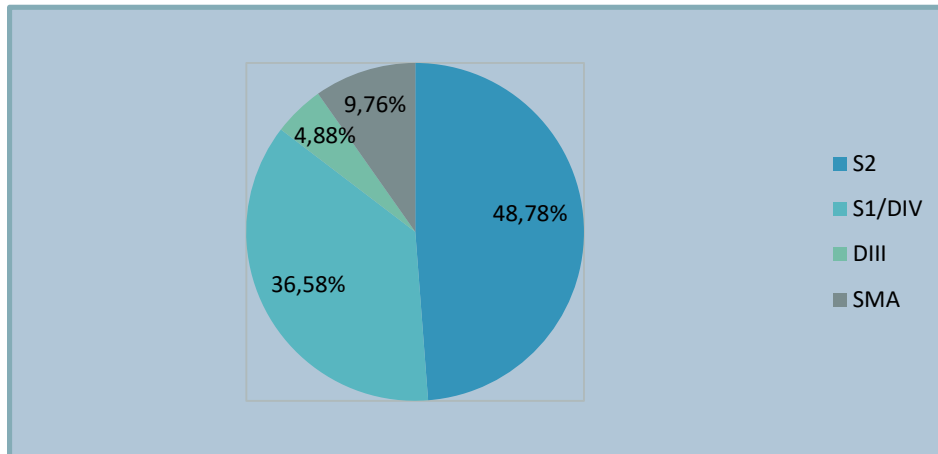
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aset penting dalam suatu organisasi yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data hingga akhir tahun 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPS Kota Palembang tercatat sebanyak 41 orang. Komposisi pendidikan ASN di BPS Kota Palembang terdiri dari:

- 20 orang dengan pendidikan S2 (48,78%)
- 15 orang dengan pendidikan S1/D-IV (36,58%)
- 2 orang dengan pendidikan D-3 (4,88%)
- 4 orang dengan pendidikan SMA (9,76%)

Dari data tersebut, terlihat bahwa mayoritas ASN di BPS Kota Palembang memiliki pendidikan tinggi, dengan lulusan S2 mendominasi jumlah pegawai, diikuti oleh lulusan S1/D-IV. Hal ini menunjukkan bahwa BPS Kota Palembang memiliki SDM yang relatif berkualitas dan terdidik dengan baik.

Kuantitas dan kualitas SDM sangat mempengaruhi kinerja suatu instansi. Dalam hal ini, tingkat pendidikan yang tinggi dari para pegawai diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas statistik yang kompleks dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran organisasi secara efektif dan efisien.

Gambar 2. SDM BPS Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024



Sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, terdapat perubahan susunan organisasi di BPS Kota Palembang menjadi 2 pejabat struktural yang terdiri dari Eselon III (Kepala) dan Eselon IV (Kasubbag Umum), serta Kelompok Jabatan Fungsional. Komposisi pegawai BPS Kota Palembang menurut jabatan sebagai berikut:

Tabel 3. Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang

Jabatan	Jumlah (Orang)	Jenis Kelamin			
		Lk	%	Pr	%
1. Pejabat Struktural	2	2	4,88	0	0,00
2. Pejabat Fungsional Tertentu	31	14	34,14	17	41,46
3. Pejabat Fungsional Umum	8	3	7,32	5	12,19
Jumlah	41	19	46,34	22	53,66

Pada Tahun 2024 terdapat 3 pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu yaitu Fungsional Statistisi ahli pertama, Pranata Keuangan APBN Mahir dan SDM Pranata SDM Aparatur Mahir . Selain itu, terjadi mutasi pegawai, dengan 6 pegawai yang masuk ke BPS Kota Palembang dan 5 pegawai yang pindah ke BPS di daerah lain. Sehingga pada Tahun 2024 pegawai yang menduduki jabatan fungsional sebanyak 31 orang atau 75 persen dari seluruh pegawai yang terdiri dari 1 orang Statistisi Madya, 12 orang Statistisi Ahli Muda, 2 orang Pranata Komputer Ahli Muda, 11 orang Statistisi Ahli Pertama, 2 orang pranata komputer ahli pertama , 1 orang Penyelia, dan 1 orang Statistisi Pelaksana Lanjutan/Mahir, 1 Pranata Keuangan APBN Mahir, 1 Pranata Keuangan APBN Terampil dan 1 Pranata SDM Mahir

Tabel 4 . Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
IV	8	19,51
III	32	78,05
II	1	2,44
Jumlah	41	100,00

Tabel 5. Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang Menurut Usia Tahun 2024

Usia	Jumlah (orang)	Persentase
>50	4	9,76
41-50	16	39,02
31-40	17	41,46
≤ 30	4	9,76
Jumlah	41	100,00

Sampai dengan kondisi Desember 2024, sebanyak 3 orang pegawai sedang menjalani tugas belajar pada Universitas Terbuka pada jenjang pendidikan S1 dan 1 pegawai yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan

Pada awal tahun sesuai DIPA-054.01.1.428227/2023, BPS Kota Palembang menerima pagu sekitar Rp. 10.634.233.000- dalam rupiah murni. Anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan yang terbagi dalam 2 program. Pagu paling besar dialokasikan untuk

program program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 7.634.344.000,- atau 71,79 persen dari total anggaran BPS Kota Palembang. Selanjutnya program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar Rp. 2.999.889.000,- (28,21%).

Pada tahun 2024, BPS Kota Palembang melakukan revisi DIPA sebanyak 12 kali. Setelah dilakukan revisi, pagu anggaran akhir yang ditetapkan untuk BPS Kota Palembang adalah sebesar Rp 10.572.727.000,-, yang mengalami penurunan sebesar Rp 61.506.000,- dibandingkan dengan pagu anggaran sebelumnya. Pagu anggaran ini belum dikurangi dengan blokir anggaran, karena pada tahun 2024, blokir anggaran masih tersedia dan dapat digunakan dari sisa dana yang ada di dalam pagu anggaran tersebut.

Tabel 6. Alokasi Pagu Anggaran BPS Kota Palembang (dalam jutaan rupiah)

Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Tanpa Blokir) (Rp)	Pagu Akhir (dengan Blokir) (Rp)
(1)	(2)		(4)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	7.634.344.000	7.710.365.000	7.720.615.000
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	2.999.889.000	2.220.857.000	2.852.112.000
Total	10.634.233.000	9.931.222.000	10.572.727.000

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kota Palembang, yang terdiri dari rincian output sebagai berikut:

1. Layanan BMN
2. Layanan Umum
3. Layanan Perkantoran
4. Layanan Sarana Internal

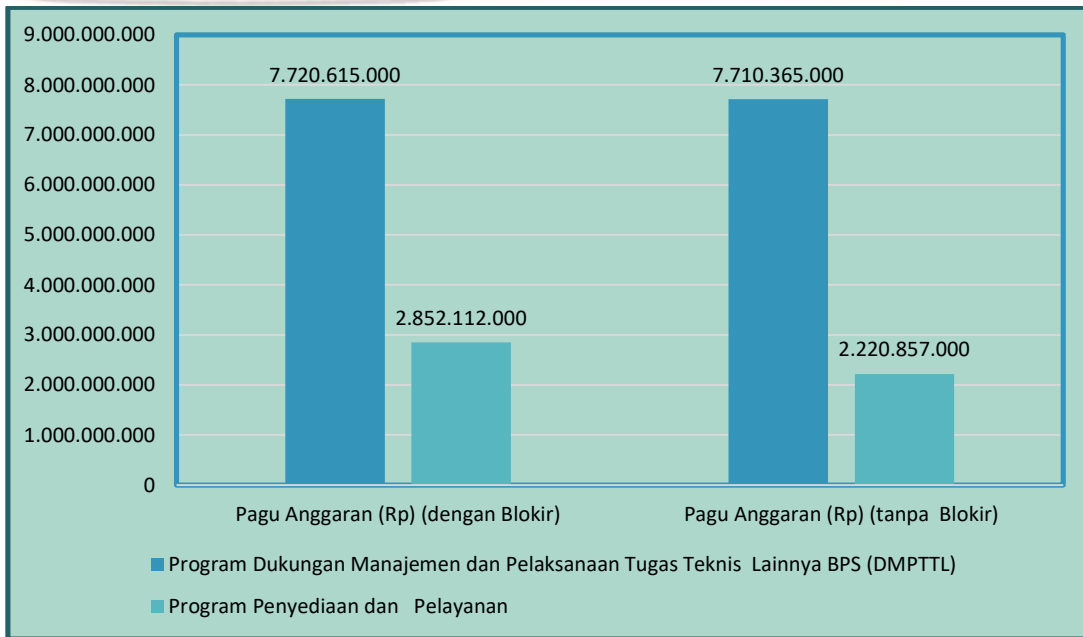
5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
6. Layanan Manajemen Keuangan

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS Kota Palembang secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan data, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2024 adalah penyediaan dan pelayanan informasi statistik yang rincian outputnya sebagai berikut:

1. Publikasi/Laporan Analisis Dan Pengembangan Statistik
2. Laporan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
3. Laporan Diseminasi Dan Metadata Statistik
4. Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran
5. Publikasi/Laporan Penyusunan Disagregasi Pmtb
6. Publikasi/Laporan Neraca Produksi
7. Dokumen, Laporan, Dan Publikasi Pengembangan, Metodologi Sensus Dan Survei
8. Publikasi/Laporan Statistik Distribusi
9. Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2026
10. Publikasi/Laporan Statistik Harga
11. Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan Dan Penggalian, Energi, Dan Konstruksi
12. Publikasi/Laporan Sakernas
13. Publikasi/Laporan Susenas
14. Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial
15. Publikasi/Laporan Pendataan Podes
16. Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi, Informasi, dan Pariwisata
17. Publikasi/ Laporan Statistik E-Commerce
18. Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan Yang Terbit Tepat Waktu

19. Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura Dan Perkebunan
20. Publikasi/Laporan Sensus Pertanian
21. Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan
22. Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area

• Gambar 3. Pagu Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2024



1.4. Potensi dan Permasalahan

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah badan pelayanan publik yang bertanggung jawab dalam menyediakan data dan informasi statistik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Data yang berkualitas sangat berperan penting bagi Pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat. Peranan data statistik ini sangat krusial dalam berbagai aspek, seperti perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Penyebarluasan data yang dihasilkan oleh BPS kepada masyarakat menjadi sorotan utama, baik oleh sesama instansi pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, penyajian dan distribusi data perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang ada saat ini. Pelayanan Statistik Terpadu (PST) menjadi pintu gerbang utama dalam penyebarluasan data BPS. Melalui PST, konsumen data (seperti mahasiswa, peneliti, pemerintah, masyarakat, pelajar, dan lainnya) dapat mengakses data yang diperlukan, baik untuk kepentingan skripsi, tugas sekolah dan kuliah, pengambilan kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Adapun potensi yang dimiliki BPS Kota Palembang yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

Tersedia 41 pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang baik, hampir 90% di antaranya merupakan lulusan perguruan tinggi. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk menjalankan tugas-tugas statistik secara profesional dan terampil.

2. Peralatan dan Infrastruktur yang Modern

BPS Kota Palembang telah memiliki peralatan dan perlengkapan pengolahan data berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai. Ini memungkinkan proses pengolahan data yang lebih efisien dan cepat, serta mendukung distribusi data secara lebih luas.

3. Tersedia anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang dapat dimaksimalkan. Pemeliharaan ini penting untuk menjaga kenyamanan dan kelancaran operasional kantor, yang pada gilirannya akan mendukung produktivitas pegawai dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Pelayanan Statistik Terpadu (PST)

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan saluran utama bagi BPS Kota Palembang untuk menyebarluaskan data kepada masyarakat. Melalui PST, masyarakat, mahasiswa, peneliti, pemerintah, dan pelajar dapat mengakses data statistik yang mereka butuhkan dengan mudah.

5. Kemampuan Beradaptasi dengan Perkembangan Teknologi

BPS Kota Palembang mampu memanfaatkan teknologi terkini untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data. Pemanfaatan platform digital dan alat berbasis TIK meningkatkan efisiensi kerja dan mempercepat distribusi data.

6. Jaringan Kolaborasi yang Luas

BPS Kota Palembang memiliki potensi untuk menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, baik pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kolaborasi ini memperkaya data yang dimiliki dan meningkatkan akurasi serta kualitas hasil statistik yang disajikan.

Dengan potensi-potensi tersebut, BPS Kota Palembang memiliki posisi strategis dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan baik di tingkat kota maupun daerah. Pemanfaatan maksimal atas potensi ini akan meningkatkan kualitas pelayanan BPS kepada masyarakat dan instansi terkait.

Menjawab harapan dan tuntutan terhadap data yang berkualitas menjadi tantangan untuk meningkatkan peran BPS Kota Palembang sebagai badan penyedia data yang berkualitas dan terpercaya bagi semua pihak.. Selain itu, tantangan perubahan yang dihadapi BPS Kota Palembang antara lain:

1. Tuntutan yang Meningkat dari Masyarakat, Dunia Usaha, dan Pemerintah
Permintaan terhadap ragam dan kualitas data statistik yang semakin kompleks dan beragam, baik dari masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah, terus meningkat. Hal ini menuntut BPS Kota Palembang untuk terus memastikan bahwa data yang disediakan selalu relevan dan berkualitas.
2. Proses pelaksanaan survei-survei yang sifatnya tahunan sering kali belum terkoordinasi dengan baik. Jadwal survei yang menumpuk dalam waktu yang sama sering menghambat proses persiapan, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun persiapan lapangan lainnya. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan sumber daya dan dapat berdampak pada kualitas survei yang dilakukan.

3. Kebutuhan akan data mikro dan informasi statistik untuk wilayah kecil belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Peningkatan kebutuhan akan data yang lebih detail untuk wilayah-wilayah yang lebih kecil menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk mendukung perencanaan yang lebih spesifik dan akurat.
4. Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS. Sebagian masyarakat masih kurang memahami tugas pokok dan fungsi BPS, yang berdampak pada partisipasi mereka dalam proses pengumpulan data. Sosialisasi yang lebih efektif mengenai peran BPS sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman masyarakat.
5. Penolakan dari Masyarakat untuk Menjadi Responden Terdapat kecenderungan masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan elit, enggan atau menolak untuk menjadi responden dalam survei atau sensus yang dilakukan oleh BPS. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya peran mereka dalam penyediaan data yang akurat dan bermanfaat.
6. Rendahnya Kesadaran Responden dalam Memberikan Informasi yang Akurat. Kesadaran responden untuk memberikan informasi yang benar masih rendah, yang mengakibatkan kualitas data dan response rate yang rendah. Hal ini berdampak pada ketepatan hasil survei dan sensus yang dilaksanakan oleh BPS.
7. Koordinasi yang Perlu Ditingkatkan dengan Instansi Lain. Koordinasi antara BPS Kota Palembang dengan instansi lain masih perlu diperbaiki agar peran BPS sebagai pembina statistik sektoral dapat berjalan lebih baik. Kolaborasi yang lebih erat antara BPS dan instansi terkait akan memperkuat sistem statistik di tingkat daerah dan memastikan data yang dihasilkan lebih komprehensif dan dapat diandalkan.

Dengan memfokuskan perhatian pada penyelesaian tantangan-tantangan tersebut, BPS Kota Palembang dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan perannya dalam

menyediakan data statistik yang berkualitas, relevan, dan terpercaya bagi berbagai pihak yang membutuhkan

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang selama Tahun 2024. Capaian Kinerja Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) 2024 dan Rencana Strategis 2020-2024 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 berpedoman pada Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja BPS Kota Palembang tahun 2024 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang ; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya manusia dan dukungan anggaran di BPS Kota Palembang; potensi dan permasalahan yang dihadapi; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran BPS Kota Palembang yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPS Kota Palembang; Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024, Perjanjian Kinerja (PK) 2024 dan Perjanjian Kinerja Suplemen BPS Kota Palembang

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang yang terdiri dari Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2024; Perbandingan capaian kinerja total tahun 2024 sampai dengan 2020, Realisasi kinerja per IKU dari tahun 2024 sampai dengan tahun pertama periode

Renstra; Realisasi kinerja per IKU tahun 2024 terhadap target Renstra Akhir; kegiatan prioritas BPS Kota Palembang; Analisis Capaian Kinerja PK Suplemen Tahun 2024; prestasi dan inovasi BPS Kota Palembang Tahun 2024; Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024

Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2024 dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.



BABII. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kota Palembang

Reformasi birokrasi di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk melakukan perubahan dalam tata kelola pembangunan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik ditandai dengan berbagai indikator, seperti tingginya kinerja, akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk mendukung tercapainya pemerintahan yang baik, diperlukan sistem pengukuran kinerja yang efektif. Sistem ini akan mengintegrasikan berbagai proses dalam peningkatan kinerja, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pencapaian. Pengukuran kinerja yang tepat sangat bermanfaat, antara lain dalam menerapkan sistem penghargaan dan hukuman, mengevaluasi efisiensi, efektivitas, serta ekonomi dari program dan kegiatan, serta meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Perencanaan strategis merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar, integral, efisien, dan koordinatif. Dalam periode 2020-2024, dengan fokus pada hasil yang ingin dicapai selama lima tahun, BPS Kota Palembang melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan pembinaan kepada seluruh unit organisasi di BPS Kota Palembang, dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala, serta tantangan yang mungkin muncul.

Sebagai dasar dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas sangat menentukan, karena dapat memengaruhi efektivitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perencanaan yang baik sangat diperlukan untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan serta mewujudkan visi BPS sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju. Dalam visi baru ini, BPS berperan penting dalam menyediakan data statistik yang akurat dan menggambarkan keadaan yang

sesungguhnya, baik untuk kepentingan nasional maupun internasional, guna mendukung pencapaian tujuan Indonesia Maju.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) merupakan hal yang mutlak untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Prinsip transparansi, termasuk di dalamnya transparansi informasi statistik, mengharuskan pemerintah untuk menyajikan data yang objektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Oleh karena itu, BPS Kota Palembang perlu menyusun perencanaan strategis (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang komprehensif, yang dapat mendukung tugas pokok dan fungsinya, serta berkontribusi dalam percepatan terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan untuk mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti:

1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, serta otonomi daerah yang menghadirkan tantangan dalam keragaman data dan informasi statistik pada tingkat wilayah yang lebih kecil;
2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memudahkan akses masyarakat terhadap data dan informasi;
3. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam penyelenggaraan statistik untuk menghasilkan data yang berkualitas.

Upaya BPS Kota Palembang dalam meningkatkan penyediaan data yang berkualitas selaras dengan misi Pembangunan Nasional 2005-2025, yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing,” yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Berdasarkan misi pembangunan nasional tersebut, BPS Kota Palembang menetapkan visi untuk periode 2020-2024 yang mengacu pada visi BPS RI, yaitu “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju (Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia).”

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPS Kota Palembang merumuskan misi yang akan mengarahkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya.

Gambar 4 . Pernyataan Visi dan Misi BPS Kota Palembang 2020-2024

VISI BPS KOTA PALEMBANG 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju di BPS Kota Palembang	MISI BPS KOTA PALEMBANG 2020 –2024	
		1.	Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		2.	Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3.	Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistic untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4.	Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah

Misi BPS Kota Palembang tahun 2020-2024 mengandung arti:

- 1) Menyediakan statistic berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.

Kualitas suatu output statistic dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009:187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistic yang digunakan oleh BPS, meliputi:

1. *Relevance* (relevansi)
2. *Accuracy* (akurasi)
3. *Timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu)
4. *Acessibility* (aksesibilitas)
5. *Coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan)
6. *Interpretability* (interpretabilitas)

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS Kota Palembang akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

- 2) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Badan Pusat Statistik bertindak sebagai Pembina data statistic yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- 3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional. Tujuan utama dalam pelayanan prima adalah kepuasan masyarakat. Parasuraman (2001) menyatakan bahwa terdapat lima unsur penting yang menentukan kepuasan yaitu *responsiveness*, *assurance*, *tangible*, *empathy*, dan *reliability*. BPS Kota Palembang telah mengadakan Survei Kebutuhan Data untuk mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik, serta memberikan pelayanan yang baik.
- 4) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.
Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik harus terus dilakukan.

Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi, maka BPS Kota Palembang memiliki tujuan. Tujuan dalam Rencana Strategis BPS Kota Palembang adalah suatu keadaan yang akan dicapai atau dihasilkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang ditetapkan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya. Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. BPS Kota Palembang memiliki empat tujuan yang dicanangkan dalam Rencana Strategis periode 2020 sampai 2024. Tujuan BPS Kota Palembang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut.

Tujuan 1. Menyediakan data statistic untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Indikator Tujuan 1: Meningkatnya Pemanfaatan data statistic yang berkualitas

Mencakup dua sasaran strategi yang ditetapkan, yaitu:

1. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan nasional
2. Persentase publikasi statistic yang menerapkan standard akurasi

Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN

Indikator Tujuan 2 : Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN Mencakup satu sasaran strategi yang ditetapkan, yaitu:

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sectoral sesuai standar

Tujuan 3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Indikator Tujuan 3: Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I Mencakup satu sasaran strategi yang ditetapkan, yaitu:

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapatkan pembinaan statistik

Tujuan 4. Penguatan tata Kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Indikator Tujuan 4 : SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan

Mencakup dua sasaran strategi yang ditetapkan, yaitu:

1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya,

BPS Kota Palembang menetapkan arah kebijakan seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024 sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS.
2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistic sectoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur utama adalah BPS mampu menjadi *strategic enabler* dan *decision support system (DSS)*.
3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS Sasaran:
 1. Meningkatnya kualitas data statistic melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru
 2. Meningkatnya layanan statistic melalui *multi channel dissemination*
 3. Meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar
 4. Meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan *Smart Office*

2.2. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Palembang 2020-2024

Dalam melakukan tugasnya selama lima tahun, BPS Kota Palembang telah menyusun Renstra tahun 2020-2024 yang mengacu pada Renstra BPS RI tahun 2020-2024. Pada awal tahun 2022, BPS Kota Palembang melakukan reuiu Renstra BPS Kota Palembang untuk periode 2020- 2024. Renstra BPS Kota Palembang tahun 2020-2024

disusun sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di BPS Kota Palembang menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Tabel 7. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan							
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	58,28*	75*	100	100	100	Fungsi IPDS, Stat. Distribusi, Stat. Produksi, Stat. Sosial, dan Nerwilis
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi			100	100	100	Fungsi IPDS, Stat. Distribusi, Stat. Produksi, Stat. Sosial, dan Nerwilis
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik			41	50	50	Fungsi IPDS
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar			76	76	76	Fungsi IPDS
3.	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)			92	92	92	Fungsi IPDS, Stat. Distribusi, Stat. Produksi, Stat. Sosial, dan Nerwilis
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
	SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	69	70	70	70	71	Subbagian Umum
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Propinsi	80	85	100	100	100	Subbagian Umum

* Target pada tahun 2022-2024 berubah karena berubahnya metode penghitungan target kinerja indikator

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Palembang Tahun 2024

Pada awal tahun 2024 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi BPS Kota Palembang yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai Lembaga pemerintahan. Berikut ditampilkan Reviu Perjanjian Kinerja yang menjadi tanggung

jawab Kepala BPS Kota Palembang, yang disusun dengan didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Target yang dicanangkan menjadi tolak ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun 2024.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Menyediakan data statistic untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistic yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan dataBPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi Pembangunan nasional(%)	Persen	100
	Persentase publikasi yang menerapkan standard akurasi(%)	Persen	100
2. Meningkatnya kolaborasi, Integrasi,dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistic (%)	Persen	100
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	92
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sectoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	100
4. Penguatan tatakelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistic yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Point	75
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS(%)	Persen	100

Sebagai perwakilan BPS RI di daerah, BPS Kota Palembang fokus menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, dengan kata lain kualitas data memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS. Sehingga dalam membuat indicator kinerja semaksimal mungkin dapat memenuhi

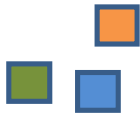
ukuran dari berbagai dimensi data dan informasi yang berkualitas demi mendukung visi BPS sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju.

2.4 . Perjanjian Kinerja Suplemen BPS Kota Palembang Tahun 2024

Pada Tahun 2024, BPS Kota Palembang mendapat tambahan perjanjian kinerja yang terdiri dari 3 tujuan, 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja seperti terlampir pada tabel 9.

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Suplemen BPS Kota Palembang Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Menyediakan data statistic untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Response rate survei berbasis rumah tangga di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	80
	Response rate survei berbasis usaha di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	96
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sectoral K/L/D/I	Tingkat ketepatan waktu Pemerintah Daerah melakukan submit penilaian EPSS di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	100
4. Penguatan tatakelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistic yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan	Satker dengan Nilai Kinerja Anggaran minimal berkategori "Baik"	Satker	1



BABIII. AKUNTABILITAS KINERJA

SAKIP berperan penting dalam memastikan bahwa pemerintah memiliki mekanisme yang sistematis untuk mengukur dan melaporkan kinerja, sehingga dapat melakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dengan adanya monitoring capaian kinerja, setiap masalah atau hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran bisa terdeteksi lebih dini dan langkah-langkah korektif dapat segera diambil. Dengan sistem ini, masyarakat dapat melihat sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini BPS Kota Palembang, berhasil menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

BPS Kota Palembang berkomitmen untuk selalu transparan dan bertanggung jawab dalam setiap langkah. Dengan sistem SAKIP yang efektif, BPS Kota Palembang tidak hanya memastikan pencapaian target, tetapi juga berusaha untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

3.1. Capaian Kinerja BPS Kota Palembang

3.1.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Tahun 2024 menjadi bukti nyata dari komitmen BPS Kota Palembang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pengukuran kinerja yang jelas dan terukur. Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terperinci dalam Perjanjian Kinerja 2024, setiap langkah yang diambil didasari oleh data yang valid dan pencapaian yang transparan.

Proses pengukuran capaian kinerja ini tidak hanya menilai realisasi dibandingkan dengan target, tetapi juga menjadi alat untuk terus beradaptasi dan memperbaiki setiap aspek guna memberikan hasil yang lebih optimal. Melalui pengukuran capaian kinerja yang akurat, BPS Kota Palembang dapat terus beradaptasi dan merespons dinamika yang ada, memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran yang telah direncanakan tercapai dengan tepat waktu dan optimal.

Ada 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai BPS Kota Palembang pada tahun 2024, yaitu:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
4. Penguatan tata Kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Secara keseluruhan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang tahun 2024 menunjukkan keberhasilan yang signifikan dengan nilai capaian kinerja sebesar 109,79 persen. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 107,84 , meningkat sebesar 1,95 persen. Dari 7 indikator terdapat 4 indikator yang realisasinya diatas 100 persen yaitu :

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik dengan target 31 OPD atau 100 persen, BPS Kota Palembang mampu melakukan pembinaan statistik terhadap 52 OPD atau sebesar 167,74 persen.
2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari target 13 OPD dengan realisasi 15 OPD atau sebesar 115,38 persen.
3. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%) dari target 12 OPD dengan realisasi 15 OPD atau 115,38 persen.
4. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%) dengan target 7 publikasi dapat diselesaikan 8 publikasi sehingga realisasi anggaran menjadi 114,29 persen.

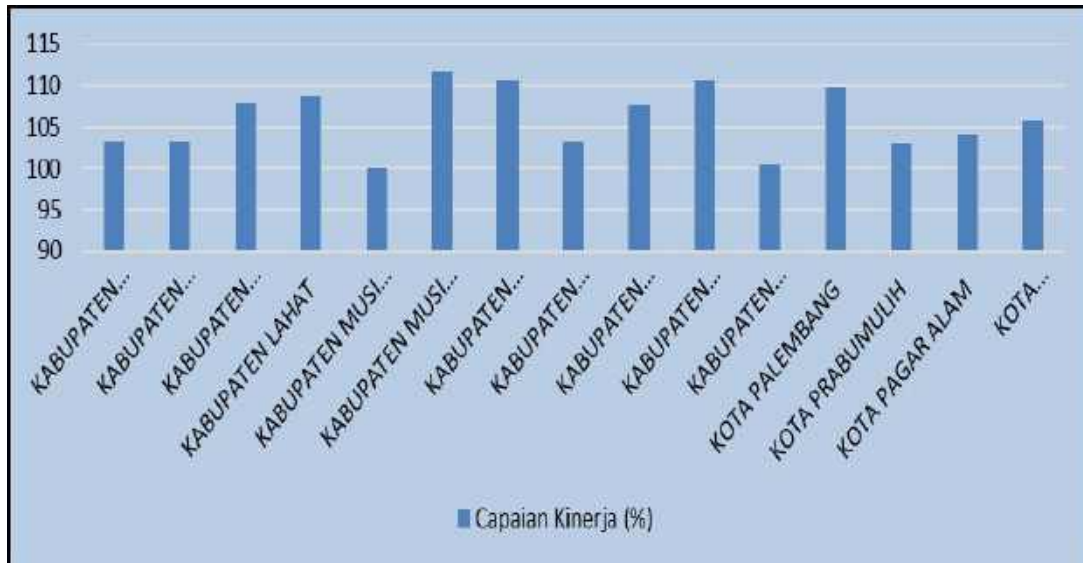
Indikator lainnya persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan dan persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS masih dapat mempertahankan capaian kinerjanya sebesar 100 persen. Diantara capaian kinerja diatas terdapat 1 capaian kinerja yang belum memenuhi target yaitu Hasil Implementasi SAKIP oleh inspektorat.

Tabel 10. Rata-rata Capaian Kinerja Total Wilayah BPS se- Sumatera Selatan Tahun 2024

Kode Satker	Nama Kabupaten/Kota	Rata-Rata Capaian Kinerja Total (%)
1601	Kabupaten Ogan Komering Ulu	103,09
1602	Kabupaten Ogan Komering Ilir	103,15
1603	Kabupaten Muara Enim	107,83
1604	Kabupaten Lahat	108,86
1605	Kabupaten Musi Rawas	100,04
1606	Kabupaten Musi Banyuasin	111,62
1607	Kabupaten Banyuasin	110,81
1608	Kabupaten OKU Selatan	103,22
1609	Kabupaten OKU Timur	107,7
1610	Kabupaten Ogan Ilir	110,75
1611	Kabupaten Empat Lawang	100,54
1671	Kota Palembang	109,79
1672	Kota Prabumulih	102,91
1673	Kota Pagar Alam	104,21
1674	Kota Lubuk Linggau	105,89
Rata-rata Capaian Kinerja		106,03

Capaian kinerja total untuk seluruh Badan Pusat Statistik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan memiliki rata-rata sebesar 106,03 persen. Dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan, ada 7 kabupaten/kota yang memiliki capaian kinerja lebih tinggi daripada angka rata-rata. BPS Kota Palembang, sebagai salah satu yang memiliki capaian kinerja di atas rata-rata, berada di peringkat ke-4 di antara kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Ini berarti bahwa kinerja BPS Kota Palembang termasuk baik, meskipun tidak berada di posisi teratas. Posisi teratas berada di BPS Musi Banyuasin. Jika dibandingkan dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan, capaian kinerja BPS Kota Palembang juga lebih tinggi daripada capaian yang tercatat oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 5. Capaian Kinerja di BPS Provinsi Sumatera Selatan



Upaya yang telah dilakukan oleh BPS Kota Palembang dalam meraih capaian kinerja tersebut yaitu :

1. Sinergi dengan pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan Release Inflasi (Perekembangan Indeks Harga Konsumen) , Ketenagkerjaan, Kemiskinan, IPM dan Perekonomian dilakukan melalui live streaming youtube.

2. Pelaksanaan Satu Data Indonesia yang semakin intens
3. Membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau instansi lainnya demi membangun sistem perstatistikan.
4. Menjadi narasumber setiap sosialisasi atau webinar yang diadakan oleh instansi.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja BPS Kota Palembang khususnya terhadap indikator yang belum tercapai akan dilakukan strategi sebagai berikut :

1. Fokus pada Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Dokumentasi. Meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan kinerja serta memperbaiki proses pengumpulan dan verifikasi data akan berkontribusi pada peningkatan skor SAKIP di masa depan.
2. Peningkatan Kapasitas SDM. Terus memberikan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar mereka dapat bekerja lebih efektif dan efisien sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Pemantauan dan Evaluasi yang Lebih Ketat. Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian kinerja untuk memastikan tidak ada hambatan yang menghalangi pencapaian target.
4. Tetap meningkatkan kolaborasi dengan instansi atau lembaga lain untuk memastikan bahwa data yang disediakan oleh BPS digunakan dalam perencanaan Pembangunan, yaitu aktif mengikuti berbagai rapat atau forum yang berfokus pada penyelarasan data dan kebijakan pembangunan, seperti Rapat Satu Data Indonesia, pertemuan terkait SDG's (Sustainable Development Goals), serta pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
5. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan waktu dan proses kerja, dengan memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Menawarkan Kegiatan-Kegiatan Statistik Sektorial ke Setiap OPD untuk dibuatkan Rekomendasi
7. Untuk pembinaan statistik tahun 2025 , mengidentifikasi OPD mana saja yang dapat diberikan pembinaan statistik

8. Peningkatan Kapasitas SDM. Terus memberikan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar mereka dapat bekerja lebih efektif dan efisien sesuai dengan standar yang ditetapkan.
9. Membuat mekanisme pengumpulan umpan balik (feedback) dari pengguna layanan untuk mengetahui kepuasan mereka dan area yang perlu perbaikan
10. Mengembangkan strategi meningkatkan dan memperluas pelayanan konsultasi dengan cara office to office
11. Penambahan sarana dan prasarana ruang pelayanan PST untuk kebutuhan PEKPPP perlu ditingkatkan demi kenyamanan pengguna.

Dengan melaksanakan strategi-strategi tersebut, diharapkan BPS Kota Palembang dapat terus meningkatkan kinerja dan efektivitasnya dalam memberikan layanan statistik yang berkualitas, responsif, dan relevan, serta menciptakan dampak positif bagi perencanaan pembangunan daerah dan kepuasan publik.

Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan pertama yaitu Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan. Dalam hal ini, data statistik berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan, program, dan proyek yang lebih tepat sasaran. Pemanfaatan data statistik yang berkualitas merupakan langkah penting agar data yang disediakan tidak hanya tersedia, tetapi juga digunakan secara optimal oleh berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Indikator dari sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas yaitu :

1. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan nasional.
2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi

Tabel 11. Capaian Kinerja Tujuan Pertama BPS Kota Palembang Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan nasional	Persen	100	100	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi	Persen	100	114,29	114,29
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama					107,14

Dari tabel di atas dapat diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran strategis tujuan pertama telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 107,14 persen. Sasaran strategis tujuan pertama terdiri dari 2 indikator dan masing-masing indikator telah mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Pertama Sasaran Strategis Pertama Tujuan Pertama yaitu Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan nasional

diperoleh berdasarkan hasil survei kebutuhan data tahun 2024 dengan rumus :

$$P = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

P = Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi

x = Jumlah konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi

y = Jumlah seluruh konsumen

Tabel 12. Capaian Kinerja Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Triwulanan

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA								Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun				
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif							
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100	100

Berdasarkan hasil survei kebutuhan data, diperoleh bahwa 100 persen pengguna data memanfaatkan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Capaian ini menunjukkan pencapaian kinerja yang optimal, bahkan berhasil tercapai lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan, yakni pada Triwulan IV 2024. Dalam usaha mempertahankan nilai capaian tersebut terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPS Kota Palembang sebagai berikut :

1. Kegiatan Statistik yang dilaksanakan oleh BPS Kota Palembang telah disampaikan ke pengguna data melalui kegiatan rilis melalui *live streaming youtube* dan disebar di *instagram* dan *facebook*. Tahun sebelumnya hanya melakukan upload Berita Resmi Statistik di website BPS Kota Palembang. Pelaksanaan rilis tersebut dilaksanakan setiap awal bulan. Rilis yang dilaksanakan setiap bulan adalah rilis perkembangan indeks harga konsumen. Sedangkan rilis yang lain seperti kemiskinan, ketenagakerjaan, perekonomian, IPM dan lain-lain dilaksanakan pada saat penyusunan publikasi atau BRS dimaksud.

Manfaat dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS Kota Palembang dan disampaikan melalui berbagai platform, seperti live streaming YouTube, Instagram, dan Facebook, sangat signifikan. Beberapa manfaat utama yang dapat diperoleh antara lain:

- Aksesibilitas Informasi yang Lebih Luas. Dengan memanfaatkan media sosial dan live streaming, informasi statistik menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat umum, tidak terbatas hanya pada mereka yang mengunjungi

website BPS. Ini memungkinkan lebih banyak orang, termasuk dari berbagai lapisan masyarakat, untuk mendapatkan data yang relevan secara real-time.

- **Transparansi dan Akuntabilitas.** Pelaksanaan rilis data secara rutin dan terbuka, terutama melalui platform publik seperti YouTube dan media sosial, meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi statistik. Ini juga memberikan akuntabilitas lebih kepada BPS karena publik dapat langsung mengakses dan memverifikasi data yang disampaikan.
- **Penyebaran Informasi yang Cepat dan Efisien.** Dengan menggunakan berbagai kanal digital, data yang disampaikan bisa langsung diterima oleh pengguna di berbagai wilayah, termasuk mereka yang tidak memiliki akses langsung ke website. Ini mengurangi kendala waktu dan ruang dalam mendistribusikan informasi.
- **Interaksi dan Feedback Langsung.** Platform seperti YouTube dan media sosial memungkinkan interaksi langsung dengan audiens, misalnya melalui komentar atau pertanyaan yang diajukan selama sesi live streaming. Hal ini bisa menjadi sarana untuk mendapatkan masukan dan memperbaiki kualitas layanan atau publikasi yang disediakan.
- **Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran.** Dengan adanya rilis yang dilakukan setiap bulan tentang data yang relevan, seperti perkembangan indeks harga konsumen, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan lainnya, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi di Kota Palembang. Ini bisa menjadi dasar untuk perencanaan kebijakan yang lebih tepat.
- **Mempermudah Pengambilan Keputusan.** Pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat, dapat dengan mudah memanfaatkan data yang disampaikan untuk merencanakan kebijakan, strategi bisnis, atau tindakan sosial yang sesuai dengan kondisi terkini.

Secara keseluruhan, langkah ini mendukung upaya untuk menjadikan data statistik lebih relevan, tepat waktu, dan mudah diakses, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memahami dan menggunakan data statistik untuk kepentingan pembangunan yang lebih baik

Gambar 6. Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kota Palembang



2. Salah satu tujuan Satu Data Indonesia yaitu dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan. Satu Data Indonesia dapat mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data,

serta kebijakan Satu Data Indonesia ditetapkan untuk mendukung Sistem Statistik Nasional. Misi Satu Data Indonesia pada tahun 2022-2024 yaitu ;

1. Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip Satu Data yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan;
2. Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara Satu Data dan Forum Satu Data yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) tahun 2024 lebih semakin intens, pada bulan Januari hingga bulan Desember telah dilaksanakan rapat pelaksanaan SDI dimulai Rapat pembahasan finalisasi draft data Satu Data Indonesia (SDI) Kota Palembang hingga bulan Desember diadakan Rapat Koordinasi Forum Satu Data SDI Kota Palembang tahun 2024 – Workshop Perencanaan Data Penyusunan Metadata Statistik Sektorial untuk mendukung tata kelola Satu Data Indonesia (SDI) Kota Palembang.

Diharapkan melalui pelaksanaan Satu Data Indonesia yang semakin baik ini maka pencapaian tujuan pertama “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” akan dapat dipertahankan.

3. Membantu kegiatan statistik di instansi atau Kementerian. Pada bulan November 2024 telah dikeluarkan SK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Evaluasi dan Revisi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Palembang 2018 – 2042, BPS Kota Palembang sebagai anggota dalam membantu kegiatan statistik. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Palembang 2018 – 2042 sebagai panduan dalam mengambil kebijakan dan mengembangkan program yang terkait dengan Pembangunan yang berwawasan kependudukan yang meliputi kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobiltas penduduk, pembangunan keluarga dan data informasi kependudukan. Pelaksanaan rapat dimaksud dilakukan secara online dan offline.

Gambar 7. Rapat Revisi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Palembang secara Online dan Offline



4. Koordinasi dengan Kementerian/instansi lain dalam rapat atau pertemuan, dari bulan Januari hingga Desember 2024 melalui :
 - a. Narasumber dalam rapat Rencana penyesuaian IUP RPJPD Kota Palembang Tahun 2025-2045
 - b. Paparan pada rapat persiapan hasil verifikasi dan validasi capaian SDG's
 - c. Narasumber pada rapat validasi data statistik pertanian (Data SP) tanaman pangan holtikultura Tahun 2024
 - d. Narasumber pada Sinergitas desa cantik dengan rumah data kependudukan.
 - e. Narasumber pada rapat focus grup diskusi evaluasi penurunan angka pengangguran di Kota Palembang Tahun 2024
 - f. Narasumber pada rapat Roadmap Palembang MUSI (Maju, Berkelanjutan, Sejahtera, Internasional) 2045

Gambar 8. Narasumber pada Rapat/Pertemuan yang Diadakan oleh Instansi



Untuk memastikan data yang disediakan oleh BPS digunakan secara optimal dalam perencanaan pembangunan, penting untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan instansi atau lembaga terkait. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan aktif mengikuti berbagai rapat atau forum yang berfokus pada penyelarasan data dan kebijakan pembangunan, seperti Rapat Satu Data Indonesia, pertemuan terkait SDG's (Sustainable Development Goals), serta pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Melalui partisipasi dalam forum-forum tersebut, BPS dapat memastikan bahwa data statistik yang disediakan tidak hanya relevan, tetapi juga digunakan secara efektif oleh berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih terarah dan berbasis data. Selain itu, peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga lain akan memperkuat integrasi data antar sektor, mendorong transparansi, dan menciptakan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun nasional.

Indikator Kedua Sasaran Strategis Pertama Tujuan Pertama yaitu Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi

diperoleh berdasarkan dengan rumus :

$$\text{Persentase} = x/y * 100$$

x : Jumlah publikasi statistik yang dihasilkan yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi

y : Jumlah target publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi

Tabel 13. Capaian Kinerja Persentase Publikasi Statistik Yang Menerapkan Standar Akurasi Triwulanan

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA								Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun				
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif				TW I	TW II	TW III	TW IV
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV				
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	Persen	14,29	42,86	57,14	100,00	14,29	42,86	57,14	114,29	14,29	42,86	57,14	114,29

Capaian Kinerja persentase publikasi yang menerapkan standar akurasi dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 BPS Kota Palembang menerbitkan 28 publikasi dan sebanyak 8 publikasi telah memuat data dan informasi terkait hasil standar akurasi. Capaian kinerja ini sebesar 114,29 persen dengan target 100 persen. Publikasi yang dihasilkan yaitu :

1. Palembang Dalam Angka 2024
2. PDRB Menurut Lapangan usaha 2019-2023
3. PDRB Menurut Pengeluaran 2019-2023
4. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang 2024
5. Statistik Daerah Kota Palembang 2024
6. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang
7. Statistik Ketenagakerjaan Kota Palembang 2023
8. Indeks Pembangunan Gender Kota Palembang Tahun 2024

terdapat 1 publikasi yang baru diterbitkan pada tahun 2024 yaitu Indeks Pembangunan Gender Kota Palembang Tahun 2024.

Kendala :

1. Data yang disajikan pada publikasi merupakan hasil Susenas Maret 2024. Hasil olah data dari BPS RI baru bisa diterima tanggal 6 November 2024. Target pengumpulan ke DLS tanggal 3 Desember. Waktu pengerjaan terbatas karena bertepatan dengan kegiatan Seruti Triwulan IV.
2. Dalam penulisan publikasi ini diperlukan mikrodata hasil pendataan sakernas tahun 2023 untuk dilakukan pengolahan data lanjutan namun tidak didapatkan mikrodata tersebut sehingga kesulitan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menyusun publikasi ini
3. Untuk publikasi ARC, harus bisa menyelesaikan publikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dari sejak awal tahun. Jika telat upload, maka akan berpengaruh pada kinerja.
4. Ada 1 variabel yang tidak jelas bagaimana cara mendapatkan/menghitungnya yaitu variabel pendapatan per kapita Kota Palembang
5. Data mengenai aktivitas pertambangan dan penggalian di Kota Palembang khususnya periode triwulan III tahun 2024 tidak ada

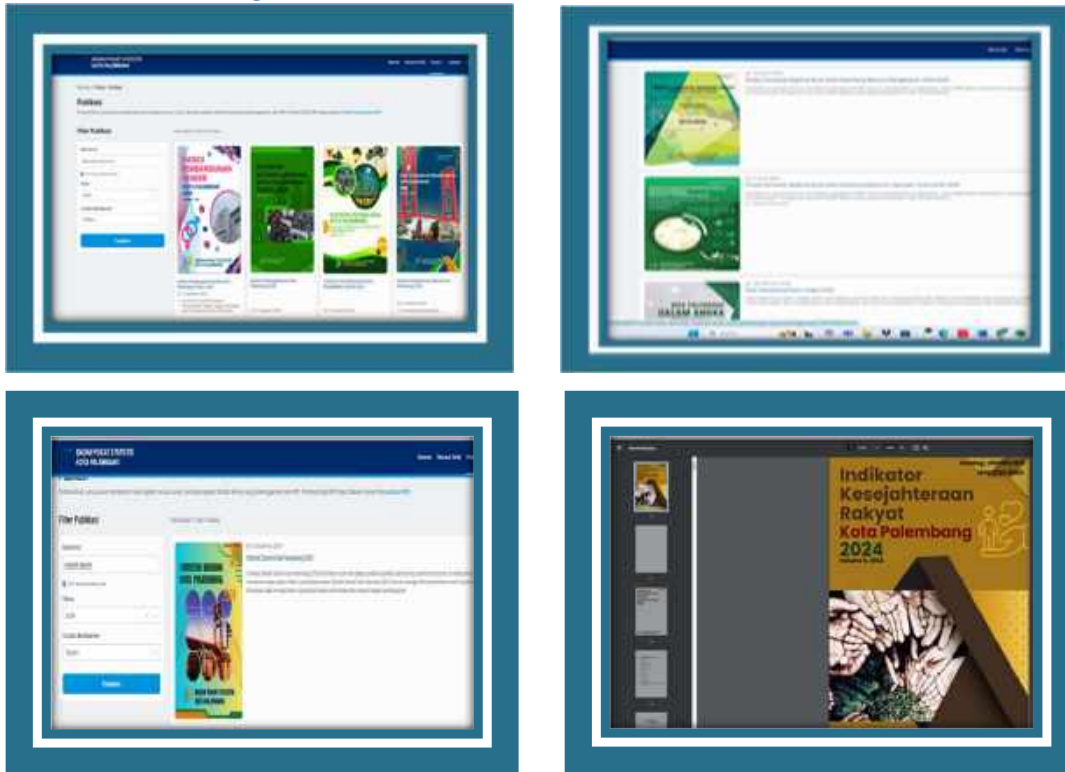
Solusi :

1. Melakukan persiapan publikasi dari bulan sebelumnya, seperti rencana cover, infografis, yang bisa dilakukan di awal
2. Untuk responden yang menolak petugas yang didampingi pengawas sudah menemui responden dan memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat Survei Sosial Ekonomi Nasional bagi pemerintah. Namun responden tersebut tetap tidak bersedia diwawancara, sehingga BPS Kota Palembang membuat Berita Acara Non Response
3. Meminta kepada bagian IPD untuk mengajukan permintaan mikrodata hasil pendataan sakernas 2023 kepada BPS Provinsi Sumatera Selatan. Setelah mendapatkan mikrodata tersebut dilakukan pengolahan dan analisis untuk melakukan pengisian data tabel publikasi yang diperlukan
4. PDRB Lapangan Usaha dan Pengeluaran telah di upload ke website BPS Kota Palembang dengan tanggal rilis 4 April 2024 dan 30 April 2024. Publikasi dapat PDRB Lapangan Usaha dan Pengeluaran dapat di unduh pada link : <https://palembangkota.bps.go.id/publication.html>
5. Akan terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan konten, tampilan gambar/infografis, penambahan informasi indikator yang ada di BPS Kota Palembang yang belum termasuk di publikasi Statda Kota Palembang tahun 2024.

Strategi yang akan dijalankan untuk tahun 2025 sebagai berikut :

1. Semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi akurasi yang diterbitkan
2. Publikasi yang diterbitkan juga harus semakin up to date
3. Semakin meningkatkan pelayanan di website agar memudahkan pengguna data dalam mencari publikasi di website BPS Kota Palembang.
4. Melakukan rekonsiliasi PDRB sehingga kualitas data dapat lebih baik
5. Koordinasi dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan tentang template dan analisis data
6. Peningkatan Manajemen Waktu, Tim harus mematuhi jadwal ketat, dengan menetapkan tenggat waktu internal lebih awal dari jadwal publikasi resmi. Ini memberi ruang untuk perbaikan jika ada masalah atau keterlambatan.

Gambar 9. Publikasi statistik yang menerapkan Standard Akurasi di Website BPS Kota Palembang



Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua yaitu meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN yang terdiri dari 1 sasaran strategis yaitu Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN dengan 2 indikator, yaitu:

1. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
2. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

Capaian Kinerja dari indikator yang mengukur sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 14. Hasil Capaian Kinerja Tujuan Kedua BPS Kota Palembang Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN					
Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi Kegiatan statistik	Persen	100	115,38	115,38
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menyampaikan metadata Sektoral sesuai standar	Persen	92	115,38	120
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua					117,69

Indikator Pertama Sasaran Strategis Pertama Tujuan Kedua yaitu Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi Kegiatan statistik,

diperoleh dengan rumus :

$$\text{Persentase} = x/y * 100$$

x: Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik

y: Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) produsen data yang menjadi target pembinaan

Sesuai dengan UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik, instansi pemerintah yang akan melakukan kegiatan statistik diwajibkan melaporkan kegiatan statistik yang akan dilaksanakan kepada BPS. Menurut PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 26 Ayat 2 menjelaskan bahwa penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib:

1. Memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS
2. Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS

3. Menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS

Setelah diteliti dan diproses oleh BPS akan dikeluarkan suatu rekomendasi yang menyatakan kegiatan yang bersangkutan layak atau tidak untuk dilanjutkan. BPS wajib meneliti dan mengevaluasi rancangan penyelenggaraan survei sektoral, meliputi:

1. Tujuan Survei
2. Jenis data yang akan dikumpulkan
3. Wilayah kegiatan statistik
4. Metode statistic yang akan digunakan
5. Objek populasi dan jumlah responden
6. Waktu pelaksanaan

Tabel 15. Capaian Kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik Triwulanan

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA								Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun				
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif							
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	0,00	46,15	76,92	100,00	0,00	107,69	107,69	115,38	0,00	107,69	107,69	115,38

Sosialisasi/pembinaan tentang rekomendasi statistik melalui aplikasi Romantik telah dilaksanakan bersamaan dengan pembinaan statistik sektoral yang telah dilaksanakan di Hotel Beston Palembang. namun hingga TW I 2024 belum terdapat OPD yang mengajukan rekomendasi ke BPS Kota Palembang. Pengajuan rekomendasi statistik dimulai pada Triwulan II, bulan Mei 2024 oleh Dinas perpustakaan dan kearsipan dan diikuti oleh organisasi perangkat daerah lainnya. Jumlah OPD yang mengajukan rekomendasi ke BPS Kota Palembang sebanyak 15 OPD, lebih banyak dari target yang ditetapkan sebanyak 13 OPD. Jumlah kegiatan yang diajukan oleh OPD yaitu sebanyak 17 kegiatan sebagai berikut :

1. SKM dinas Perpustakaan dan kearsipan yang diajukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. SKM RSUD Palembang BARI yang diajukan oleh RSUD Palembang BARI
3. Pengumpulan data jumlah seniman di Kota Palembang yang diajukan oleh Dinas Kebudayaan

4. Pengumpulan data Jumlah sanggar kesenian di Kota Palembang yang diajukan oleh Dinas Kebudayaan
5. SKM Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diajukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
6. SKM Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
7. SKM Dinas lingkungan hidup diajukan oleh Dinas lingkungan hidup.
8. SKM Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan diajukan oleh Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan.
9. SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang diajukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang
10. SKM Badan Pendapatan daerah yang diajukan oleh Badan Pendapatan Daerah
11. SKM Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang diajukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
12. SKM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diajukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan judul kegiatan
13. SKM Badan perencanaan pembangunan daerah , penelitian dan pengembangan yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,Penelitian dan Pengembangan
14. SKM badan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang diajukan oleh Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
15. Survei standar harga Satuan barang dan jasa yang diajukan oleh Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. SKM Satuan Polisi Pamong Praja yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
17. Koordinasi perencanaan layanan dibidang pendidikan pendataan warga usia 7-12 yang tidak bersekolah se- Kota Palembang Tahun 2024 yang diajukan oleh Dinas Pendidikan.

Dari capaian tersebut realisasi dari persentase OPD yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik yaitu sebesar 115,38 persen dari target 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 115,38 persen.

Beberapa langkah strategis yang telah diambil oleh BPS Kota Palembang dalam menghindari duplikasi kegiatan statistik sektoral dan mendukung terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN) dan meningkatnya rekomendasi statistik adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi Antar OPD

Dalam upaya menghindari duplikasi, koordinasi yang lebih intensif antar OPD sangat penting. Setiap OPD perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang jenis-jenis survei dan kompilasi produk administrasi yang akan dilakukan agar tidak terjadi pengulangan kegiatan yang serupa.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi:

Implementasi platform berbasis teknologi yang memfasilitasi pelaporan kegiatan survei dan kompilasi produk administrasi secara elektronik akan membantu mempercepat proses komunikasi antar OPD dan BPS. Ini juga bisa membantu dalam memonitor kegiatan statistik yang sedang atau telah dilaksanakan oleh berbagai OPD. Pengajuan rekomendasi ini dapat dilakukan secara online yang dapat diakses pada website rekomendasi statistik (Romantik) online. : <https://romantik.bps.go.id/site/pencarian/>

3. Sosialisasi dan Pelatihan kepada OPD

Menyusun program pelatihan atau sosialisasi bagi OPD terkait prosedur pelaporan hasil survei statistik sektoral yang dipublikasikan, serta pentingnya mendapatkan rekomendasi dari BPS untuk setiap kegiatan statistik yang dilaksanakan. Ini bisa membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan OPD terhadap kebijakan yang ada. Sosialisasi telah dilaksanakan bersamaan dengan Pembinaan Statistik Sektoral yang dilaksanakan di Hotel Beston Palembang.

4. Penerapan Sistem Pemantauan Berkelanjutan

Melakukan pemantauan berkala untuk memastikan bahwa setiap OPD melaporkan hasil survei dan kompilasi produk administrasi yang sudah dipublikasikan kepada BPS dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sistem pemantauan ini penting untuk

mencegah terjadinya duplikasi dan untuk memperbaiki kualitas data yang disajikan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan koordinasi antara BPS, Sekretaris Daerah, dan OPD Kota Palembang dapat lebih efektif dalam mewujudkan sistem statistik yang terintegrasi, transparan, dan tidak tumpang tindih.

Untuk meningkatkan capaian indikator pertama tujuan kedua pada tahun berikutnya, strategi yang dapat dijalankan untuk memaksimalkan efektivitas rekomendasi statistik sektoral adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Forum Rapat atau Pertemuan dengan OPD

Dalam setiap forum rapat atau pertemuan dengan OPD yang dihadiri oleh BPS Kota Palembang, BPS Kota Palembang dapat memberikan penjelasan rinci mengenai prosedur, manfaat, dan kewajiban mendapatkan rekomendasi dari BPS. Memberikan studi kasus pengalaman dari OPD lain yang sudah berhasil melakukan rekomendasi dengan BPS untuk kegiatan statistik mereka. Ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keuntungan praktis dan relevansi rekomendasi tersebut.

2. Menawarkan Kegiatan-Kegiatan Statistik Sektoral ke Setiap OPD untuk dibuatkan Rekomendasi

- Pendampingan dalam Penyusunan Kegiatan Statistik

BPS bisa menawarkan diri untuk membantu OPD dalam merancang kegiatan statistik sektoral yang sesuai dengan kebutuhan data mereka, serta memfasilitasi penyusunan rekomendasi secara langsung. Pendampingan ini bisa dilakukan melalui bimbingan teknis atau workshop.

- Jalin Kerja Sama yang Lebih Proaktif dengan berkunjung langsung ke OPD atau mengadakan pertemuan kecil untuk membahas lebih lanjut mengenai kegiatan statistik yang dapat diminta rekomendasinya. Ini dapat membantu mempererat hubungan dan membuka lebih banyak kesempatan bagi setiap OPD untuk mendapatkan rekomendasi.

Dengan menjalankan strategi-strategi ini, diharapkan BPS Kota Palembang dapat

meningkatkan jumlah kegiatan statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi, sekaligus mendorong keterlibatan aktif semua OPD dalam mengoptimalkan penggunaan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah.

Gambar 10. Penyelenggaraan Rekomendasi Statistik Kota Palembang Tahun 2024

Judul Kegiatan	Penyelenggara	Tahun Kegiatan	Tgl. Pengajuan	Tgl. Perbaikan Terakhir	Tgl. Selesai	Proses Penyelesaian	Status	Next Action	Warranty date	Aksi
...	BLS Palembang (M)	2024	29 Mar 2024	29 Mar 2024	29 Mar 2024	1 hari kerja	Selesai		Badan Statistik S.Kom	Lihat
...	Stasi Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Desa	2024	18 Mar 2024	-	18 Mar 2024	0 hari kerja	Selesai		Badan Statistik S.Kom	Lihat
...	Stasi Penyelidikan Pendidikan dan Kelangkaan Bahasa	2024	18 Mar 2024	-	22 Mar 2024	0 hari kerja	Selesai		Badan Statistik S.Kom	Lihat
...	Stasi Lingkungan Hidup	2024	18 Mar 2024	-	22 Mar 2024	0 hari kerja	Selesai		Badan Statistik S.Kom	Lihat
...	Stasi Pemukiman Perkotaan dan Pengembangan Wilayah	2024	18 Mar 2024	-	25 Mar 2024	0 hari kerja	Selesai		Badan Statistik S.Kom	Lihat
...	Stasi Perencanaan, Mutu dan Pelayanan Statistik Satis Pirs Kota Palembang	2024	18 Mar 2024	-	26 Mar 2024	0 hari kerja	Selesai		Badan Statistik S.Kom	Lihat
...	Stasi Pengukuran dan Riset	2024	17 Mar 2024	-	26 Mar 2024	7 hari kerja	Selesai		Badan Statistik S.Kom	Lihat

Judul Kegiatan	Penyelenggara	Tahun Kegiatan	Tgl. Pengajuan	Tgl. Perbaikan Terakhir	Tgl. Selesai	Proses Penyelesaian	Status	Next Action	Warranty date	Aksi
...	Stasi Pendidikan Kota Palembang	2024	18 Oktober 2024	18 Oktober 2024	18 Oktober 2024	1 hari kerja	Selesai		Badan Statistik S.Kom	Lihat
...	Stasi Pengembangan Berwawasan & Jasa Statistik	2024	01 Oktober 2024	-	01 Oktober 2024	1 hari kerja	Selesai		Badan Statistik S.Kom	Lihat
...	Stasi Kelangkaan	2024	02 Mar 2024	-	02 Mar 2024	1 hari kerja	Selesai		Badan Statistik S.Kom	Lihat
...	Stasi Kelangkaan	2024	02 Mar 2024	-	02 Mar 2024	1 hari kerja	Selesai		Badan Statistik S.Kom	Lihat
...	Stasi Pendidikan Daerah	2024	29 Mar 2024	-	29 Mar 2024	1 hari kerja	Selesai		Badan Statistik S.Kom	Lihat
...	Stasi Pengembangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2024	29 Mar 2024	-	29 Mar 2024	1 hari kerja	Selesai		Badan Statistik S.Kom	Lihat
...	Stasi Analisis, Riset, dan Publikasi	2024	29 Mar 2024	-	29 Mar 2024	1 hari kerja	Selesai		Badan Statistik S.Kom	Lihat
...	Stasi Pengembangan Berwawasan dan Jasa Statistik	2024	01 Mar 2024	-	01 Mar 2024	1 hari kerja	Selesai		Badan Statistik S.Kom	Lihat
...	Stasi Perencanaan, Pengembangan Statistik, Penelitian dan Pengembangan	2024	01 Mar 2024	-	01 Mar 2024	1 hari kerja	Selesai		Badan Statistik S.Kom	Lihat
...	Stasi Publikasi dan Riset	2024	29 Mar 2024	-	29 Mar 2024	1 hari kerja	Selesai		Badan Statistik S.Kom	Lihat

Indikator Kedua sasaran strategis pertama dari tujuan kedua yaitu Persentase OPD yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

Diperoleh dengan rumus :

$$\text{Persentase} = x/y * 100$$

x: Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar

y: Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan kegiatan statistik

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata. Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku. Target pengumpulan metadata statistik tahun 2024 dihitung dari dinas/instansi yang berkontribusi dalam penyusunan Daerah Dalam Angka Tahun 2024. Daftar OPD yang *support* data Daerah Dalam Angka, yaitu:

1. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Palembang
3. Dinas Kesehatan Kota Palembang
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang
5. Dinas Pariwisata Kota Palembang
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang
9. Dinas Perdagangan Kota Palembang
10. Dinas Perikanan Kota Palembang
11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang
12. Dinas Sosial Kota Palembang
13. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang

Pada awal tahun telah dilaksanakan pembinaan statistik sektoral di Hotel Beston Palembang, akan tetapi hingga bulan April 2024 belum terdapat OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral. Dalam mengatasi masalah kendala tersebut beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh BPS Kota Palembang sebagai berikut:

1. Peningkatan Komunikasi Antar Instansi

Melakukan rapat tentang metadata sektoral yang bertujuan untuk memastikan pemahaman yang sama mengenai pentingnya keakuratan dan ketepatan metadata, serta untuk mengevaluasi proses pengumpulan metadata yang sedang berjalan. Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 November 2024 Rakor Forum Satu Data SDI Kota Palembang Tahun 2024 – Workshop Perencanaan Data dan Penyusunan metadata statistik sektoral untuk mendukung Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) Kota Palembang.

2. Penguatan Kapasitas SDM

- Mengadakan pelatihan atau workshop bersama antara BPS dan OPD mengenai teknik pengumpulan dan pengelolaan metadata statistik. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan petugas yang terlibat, baik di BPS maupun OPD lainnya. Pembinaan ini telah diadakan di Hotel Beston Palembang dan dihadiri oleh 29 OPD termasuk Dinas Kominfo.

Gambar 11. Pembinaan Statistik Sektoral



- Peningkatan Kapasitas Teknologi

Jika diperlukan, memberikan pelatihan mengenai perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memverifikasi metadata, serta penggunaan

sistem informasi berbasis teknologi yang dapat membantu mempercepat dan mempermudah pengolahan data. Pembinaan ini telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024, yang dihadiri oleh BPS Kota Palembang, Dinas Kominfo dan Agen Statistik Kelurahan Kemang Agung.

3. Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Efisiensi

- Sistem Informasi Terintegrasi

Mengembangkan atau memanfaatkan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan proses pengumpulan metadata antara BPS dan Dinas Kominfo. Hal ini akan mempermudah koordinasi, meminimalisir kesalahan, serta mempercepat proses verifikasi dan validasi data. Metadata kegiatan statistik yang telah dikumpulkan selanjutnya dihimpun melalui sebuah sistem yaitu: Indonesia Data Hub (INDAH) yang dapat diakses melalui situs web <https://indah.bps.go.id>. Pada situs web ini tersedia informasi metadata kegiatan statistik secara lengkap dan komprehensif, baik kegiatan statistik dasar, sektoral, maupun khusus.

- Automatisasi Proses Pengumpulan Metadata

Menggunakan teknologi untuk mengotomatiskan sebagian besar proses pengumpulan metadata, seperti pengisian data melalui formulir online, untuk mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat aliran informasi antara instansi yang terlibat.

4. Peningkatan Kolaborasi dan Keterlibatan Stakeholder

- Kerja Sama dengan Pihak Lain

Melibatkan stakeholder lain yang relevan, seperti pemerintah daerah dalam pengumpulan metadata statistik. Kolaborasi ini dapat memperkuat validitas dan keakuratan data yang dikumpulkan, serta memperluas cakupan informasi yang tersedia.

- Penyebarluasan Informasi

Menyebarkan informasi yang jelas dan terperinci kepada seluruh pihak yang terlibat mengenai pentingnya metadata yang akurat untuk mendukung keputusan berbasis data. Dengan pemahaman yang lebih baik, setiap pihak akan lebih termotivasi untuk memastikan kualitas metadata yang dikumpulkan. Lebih jauh Forum Satu

Data Indonesia (SDI) Kota Palembang berkomitmen untuk menyebarluaskan data yang diterima dan sudah diperiksa melalui Portal Satu Data Kota Palembang.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan koordinasi antara BPS dan Dinas Kominfo Palembang dapat berjalan lebih lancar dan efektif, serta pengumpulan metadata statistik dapat dilakukan dengan tepat, akurat, dan efisien, mendukung keberhasilan pengelolaan data di Kota Palembang. Pada Tahun 2024 terdapat 15 OPD dengan 17 kegiatan yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar yaitu :

1. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palembang dengan judul kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palembang
2. Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan judul kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kesehatan
3. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dengan judul kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kepemudaaan dan Olahraga
4. Dinas Perdagangan Kota Palembang dengan judul kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perdagangan
5. Dinas Pendidikan Kota Palembang dengan judul kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Palembang
6. Dinas Kebudayaan Kota Palembang dengan judul kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kebudayaan , Pengumpulan data jumlah sanggar kesenian di Kota Palembang, Pengumpulan Data Jumlah Seniman di Kota Palembang
7. Dinas Pariwisata Kota Palembang dengan judul kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Pariwisata
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang dengan judul kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dengan judul kegiatan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Palembang
10. Dinas Ketengakerjaan Kota Palembang dengan judul kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Ketengakerjaan Kota Palembang
11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan judul kegiatan Survei Kepuasan

Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

12. Dinas Perikanan Kota Palembang dengan judul kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Perikanan
13. Dinas Sosial Kota Palembang dengan judul kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial Kota Palembang
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dengan judul kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dengan judul kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Dengan 17 kegiatan yang berhasil dilaksanakan, realisasi BPS Kota Palembang tercatat mencapai 115,38 persen, melebihi target yang ditetapkan sebesar 92 persen. Hasil ini membawa capaian kinerja BPS Kota Palembang ke angka 120 persen, sebuah pencapaian luar biasa. Yang lebih menggembirakan, meskipun indikator ini direncanakan untuk tercapai pada Triwulan IV 2024, seluruh target telah berhasil terealisasi lebih cepat, tepat pada Triwulan II 2024. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen tinggi serta kerja keras BPS Kota Palembang dalam mencapai hasil yang optimal, bahkan melebihi ekspektasi.

Tabel 16. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar Triwulanan

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA								Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun				
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif				TW I	TW II	TW III	TW IV
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV				
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00	115,38	115,38	115,38	0,00	120,00	120,00	120,00

Strategi yang dapat dilakukan agar capaian indikator kedua tujuan kedua dapat meningkat pada tahun berikutnya yaitu :

1. Memanfaatkan forum Satu Data Indonesia
2. Kolaborasi dengan Bappeda dan Dinas Kominfo Kota Palembang untuk melakukan Bimbingan Teknis Metadata Statistik Sektoral

Gambar 12. Daftar Pelaporan Metadata Statistik Kota Palembang Tahun 2024

No	Nama Laporan	Tahun	Jenis Statistik	Penerimaan Data	Tanggal Diinput	Pelapor	Penilaian	Status	Aksi
1	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
2	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kesehatan	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
3	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
4	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perikanan	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
5	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Sosial	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
6	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perhubungan	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
7	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
8	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Lingkungan Hidup	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
9	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
10	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄

No	Nama Laporan	Tahun	Jenis Statistik	Penerimaan Data	Tanggal Diinput	Pelapor	Penilaian	Status	Aksi
11	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perikanan dan Kelautan	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
12	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perikanan	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
13	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kesehatan	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
14	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
15	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
16	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perikanan	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
17	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Sosial	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
18	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perhubungan	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
19	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄
20	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Lingkungan Hidup	2024	Survei Kepuasan	Online	2024-01-25	Ulin Hidayat	100%	Selesai	🔍 🗑️ 🔄

Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Indikator Pertama Sasaran Strategis Pertama Tujuan Kedua yaitu Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik

Diperoleh dengan rumus :

$$\text{Persentase} = x/y * 100$$

- x: Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik
- y: Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan statistik

Tujuan Ketiga terdiri dari satu sasaran strategis “Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I” dengan satu indikator yaitu Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik. Capaian Kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 17. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kota Palembang Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja(%)
3.Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	100	167,74	120
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan ketiga					120

Penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah adalah langkah penting untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. BPS berperan sebagai pengawas untuk memastikan data yang dihasilkan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, tantangan yang dihadapi oleh BPS Kota Palembang adalah masih banyaknya OPD atau lembaga yang belum melaporkan data statistik mereka dengan lengkap. Hal ini, sebagian besar, disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang pentingnya pelaksanaan statistik sektoral secara mandiri sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Untuk mengatasi hambatan ini, perlu ada sinergi antara BPS, K/L/D/I, dan semua pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya data statistik yang akurat. Dengan meningkatkan komunikasi, sosialisasi, serta pelatihan, kita bisa memastikan bahwa statistik sektoral tidak hanya menjadi tugas administratif, tetapi juga prioritas utama dalam mendukung pembangunan yang lebih baik.

Dalam mengatasi kendala tersebut BPS Kota Palembang telah mengadakan 2 kali

pembinaan yaitu :

1. FGD Palembang Dalam Angka sekaligus sosialisasi metadata statistik dan rekomendasi statistik
2. Pembinaan statistik sektoral sekaligus sosialisasi rekomendasi statistik melalui romantik

Penanggung jawab dalam merealisasikan target dari indikator ini adalah fungsi statistik sosial, statistik produksi, statistik distribusi, IPDS dan Neraca wilayah dan analisis. Sesuai tabel diatas capaian kinerja indikator kinerja ini yaitu sebesar 120 persen, dengan realisasi 167,74 persen dari target 100 persen.

Pembinaan statistik dilaksanakan dalam bentuk FGD Penyusunan Publikasi Palembang Dalam Angka Tahun 2024 pada tanggal 22 Februari 2024 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Materi yang dibahas dalam FGD tersebut yaitu Pembahasan Data Daerah Dalam Angka Kota Palembang, Metadata, Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Kota Palembang. Peserta yang mendapatkan pembinaan statistik sebanyak 42 OPD yaitu :

1. Sekretaris Daerah
2. Dinas Perikanan
3. DMPTSP
4. Dispora
5. Dinas Koperasi UMKM
6. Bappeda Litbang
7. Dinas Catatan Sipil
8. Satpol PP
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
11. Dinas Pendidikan
12. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
14. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

16. Dinas Sosial
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19. Dinas Perdagangan
20. Dispusif (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)
21. Dinas Perhubungan
22. Inspektorat
23. Sekwan
24. RSUD Bari
25. Kecamatan Sako
26. Kecamatan Seberang Ulu satu
27. Kecamatan Seberang Ulu Dua
28. Kecamatan Jakabaring
29. Kecamatan Plaju
30. Kecamatan Bukit Kecil
31. Kecamatan Gandus
32. Kecamatan Ilir Barat Satu
33. Kecamatan Ilir Barat Dua
34. Kecamatan Kemuning
35. Kecamatan Kertapati
36. Kecamatan Sematang Borang
37. Kecamatan Ilir Timur 1
38. Kecamatan Ilir Timur 2
39. Kecamatan Ilir Timur 3
40. Kecamatan Kalidoni
41. Kecamatan Alang-alang Lebar
42. Kecamatan Sukarami

Gambar 13. Focus Grup Discussion Palembang Dalam Angka Tahun 2024



Pembinaan lain yang telah dilakukan BPS Kota Palembang yaitu pembinaan statistik sektoral sekaligus sosialisasi rekomendasi statistik melalui romantik dilaksanakan di Hotel Beston Palembang pada tanggal 6 Maret 2024 dengan peserta 29 OPD yaitu :

1. Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pendidikan
4. Dispora
5. Satpol PP Kota Palembang
6. BPKAD
7. BKPSDM
8. RSUD Gandus
9. Bappeda Litbang
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
12. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang
13. Sekretaris Daerah
14. Dinas Kebudayaan
15. Dinas Koperasi UMKM
16. Dispusif (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)

17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19. Dinas Sosial
20. DPUPR
21. Dinas Penduduk dan Catatan Sipil
22. DMPTSP
23. Inspektorat
24. Dinas Perdagangan
25. Disnaker
26. Diskominfo
27. Dinas Perhubungan
28. Dinas Pendapatan Daerah
29. Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Pertanian

Tabel 18. Capaian Kinerja Persentase OPD yang Mendapatkan Pembinaan Statistik Triwulanan

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA								Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun				
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif				TW I	TW II	TW III	TW IV
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV				
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	167,74	167,74	167,74	167,74	120,00	120,00	120,00	120,00

Apabila dilihat dari perspektif triwulanan, indikator ini awalnya ditetapkan untuk tercapai pada Triwulan I 2024 dan BPS Kota Palembang berhasil merealisasikannya pada Triwulan I 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian yang direncanakan untuk periode tersebut dapat tercapai sesuai target waktu yang telah ditentukan, bahkan dengan hasil yang optimal. Keberhasilan ini menandakan efisiensi dan ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk tahun berikutnya BPS Kota Palembang akan mengidentifikasi OPD mana saja yang dapat diberikan pembinaan statistik dan tetap melakukan koordinasi dengan Bappeda dan Dinas Kominfo di bawah payung SDI

Pembinaan Statistik “Desa Cantik”

Pembinaan statistik yang dilaksanakan oleh BPS Kota Palembang memang mencakup kelurahan, meskipun kelurahan bukan bagian dari OPD, melainkan unit di bawah kecamatan. Dengan pendekatan ini, BPS bersama pemerintah Kota Palembang berupaya mendorong kelurahan-kelurahan untuk memanfaatkan data statistik secara optimal dalam perencanaan pembangunan mereka. Penggunaan data yang akurat dan relevan dapat membantu kelurahan untuk lebih memahami potensi dan permasalahan yang ada di tingkat lokal. Hal ini pada gilirannya memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut. Dengan demikian, pembinaan statistik di tingkat kelurahan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berbasis data yang terpercaya.

Sesuai dengan SK BPS RI Nomor 352 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Desa Cantik Tahun 2024, tujuan utama dari program ini adalah:

- Meningkatkan literasi, kesadaran, dan peran aktif perangkat desa/kelurahan serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.
- Standarisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik.
- Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di desa tepat sasaran.
- Membentuk agen-agen statistik pada level desa/kelurahan.

Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan setiap BPS Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti dan mengimplementasikan kegiatan ini, sehingga tercipta keselarasan dalam pemanfaatan data statistik yang berkualitas untuk mendukung pembangunan yang lebih baik di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam rangka menindaklanjuti SK BPS RI tentang Desa Cantik Tahun 2024, BPS Kota Palembang melakukan koordinasi awal pada tanggal 9 Agustus 2024 dalam bentuk Koordinasi dan Pembinaan Desa Cantik di Kelurahan kemang Agung. Pembinaan Desa Cantik di Kelurahan Kemang Agung ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian publikasi Kemang Agung Dalam Angka, Update Website Kemang Agung, dan pengisian LKE.

Gambar 14. Pembinaan Desa Cantik di Kelurahan Kemang Agung



Worshop atau sosialisasi Kelurahan Cantik (Kelurahan Cinta Statistik) diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan pada tanggal 29 April s.d 6 Mei 2024, BPS Kota Palembang bertindak sebagai narasumber Sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penyusunan dan pengelolaan statistik nasional, BPS tidak hanya mengumpulkan dan menyajikan data, tetapi juga berfungsi sebagai narasumber yang memberikan panduan, arahan, dan pembinaan kepada kelurahan yang terlibat dalam pengumpulan dan penggunaan data sektoral.

BPS memberikan pedoman mengenai cara pengumpulan data yang benar, metode yang digunakan, serta cara pengolahan dan analisis data. Hal ini penting agar data yang dihasilkan dari berbagai sektor bisa dibandingkan dan memiliki kualitas yang konsisten. BPS dapat membantu dalam hal teknik pengumpulan data, cara mengelola data, dan bagaimana menganalisis hasilnya. Bimbingan teknis ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika ditemukan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian dengan standar, BPS memberikan saran atau pembinaan untuk meningkatkan kualitas data dan memastikan data yang dihasilkan dapat diandalkan untuk pengambilan kebijakan.

Kegiatan Bimtek Kelurahan Cantik dapat terlaksana berkat dukungan penuh dari Bappeda-Litbang Kota Palembang, baik materi, finansial maupun sarana dan prasarana. BPS Kota Palembang, sebagai Pembina Statistik Sektoral, Kelurahan Cantik berwenang

untuk membina Aparatur-Aparatur Kelurahan agar mampu dan dapat mengelola data-data statistik kelurahan itu sendiri, seperti halnya monografi kelurahan yang update dan informatif. Hal ini Juga Akan di dukung oleh Kominfo Kota Palembang dalam hal diseminasi data-data statistik sektoral kelurahan melalui website kelurahan. Tindak lanjut Bimtek ini maka diadakan rapat koordinasi dan evaluasi pengumpulan data statistik kelurahan sebagai pendukung Satu Data Indonesia (SDI).

Gambar 15. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengumpulan Data Statistik Kelurahan



Evaluasi lanjutan pengumpulan data kelurahan cantik statistik (kelurahan cantik) ditingkat kecamatan pada tanggal 20 agustus 2024 dihadiri oleh perwakilan dari 75 kelurahan di Kota Palembang. Melalui kegiatan pembinaan statistik ini, BPS Kota Palembang dapat:

- Menyampaikan informasi dan pembaruan terkini terkait statistik sektoral.
- Mendengarkan tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan statistik sektoral.
- Mendorong diskusi dan pertukaran ide untuk memperbaiki sistem statistik daerah.

Pembinaan statistik sektoral yang efektif dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat daerah, serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang yaitu pembinaan sektoral akan dilakukan secara bergilir. Setiap pertemuan akan dihadiri oleh 5 Organisasi Perangkat Daerah.

Capaian Kinerja Tujuan Keempat

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam rangka tata Kelola kelembagaan. Untuk mengukur sasaran strategis SDM Statistik yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan, BPS Kota Palembang menetapkan dua indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Capaian Kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 19. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Kota Palembang Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
4. Penguatan tata Kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					
Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan	Hasil Penilaian implementasi SAKIP	Persen	71	74,15	98,67
	Persentase kepuasan Pengguna data terhadap sarana dan prasarana Pelayanan BPS	Persen	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat					99,43

Indikator Pertama Sasaran Strategis Tujuan Keempat yaitu Hasil Penilaian Implementasi SAKIP

Tabel 20. Capaian Kinerja Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Triwulanan

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA										Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun			
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif				TW I	TW II	TW III	TW IV	
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV					
Hasil penilaian implementasi SAKIP	Persen	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,00	0,00	0,00	98,87	

Di tahun 2024, BPS Kota Palembang berhasil meraih 74,15 poin dalam penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), turun dari target yang ditetapkan sebesar 75 poin dan mencapai 98,87% dari target yang ditentukan.

Proses penyusunan dokumen SAKIP dimulai dengan perencanaan yang cermat dan melibatkan seluruh tim yang berdedikasi untuk mengelola kinerja di BPS Kota Palembang. Setiap target dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 dirancang untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Pemantauan berkala dilakukan melalui rapat evaluasi yang melibatkan seluruh pegawai untuk menilai progres kinerja dan mengidentifikasi kendala yang muncul. Dalam setiap rapat mingguan, BPS Kota Palembang secara aktif mencari solusi dan memastikan bahwa setiap permasalahan dapat diatasi dengan langkah yang tepat. Proses ini menjadi bagian integral dari komitmen untuk terus memperbaiki kinerja dan memberikan pelayanan terbaik.

Pada tahun 2024, terjadi beberapa perubahan dalam komposisi pegawai di BPS Kota Palembang. Sebanyak 5 pegawai pindah ke provinsi atau kabupaten lain, 6 pegawai baru bergabung, dan 3 pegawai (Ketua Tim) pensiun. Perubahan ini membawa dampak pada pemahaman dan kepedulian pegawai terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kendala yang muncul akibat perubahan pegawai tersebut terjadi ketidaksesuaian tingkat pemahaman. Pegawai yang baru bergabung mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai SAKIP dan pentingnya penerapannya dalam mendukung kinerja organisasi. Di sisi lain, pegawai yang pensiun atau pindah, termasuk Ketua Tim, meninggalkan ruang kosong dalam pengelolaan dan pemahaman tentang SAKIP, yang memerlukan waktu untuk diisi oleh pegawai baru.

Perlunya Upgrade Pemahaman dan Kepedulian. Pemahaman dan kepedulian terhadap SAKIP perlu terus ditingkatkan, terutama bagi pegawai yang baru bergabung. Hal ini sangat penting agar semua pegawai memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya akuntabilitas dalam setiap proses kerja, serta dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip SAKIP. Pegawai baru memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem dan prosedur yang ada, termasuk SAKIP. Tanpa dukungan yang memadai, mereka mungkin kesulitan untuk langsung berkontribusi dalam implementasi SAKIP secara efektif.

Solusi yang dapat dilakukan yaitu menyediakan pelatihan atau workshop tentang SAKIP untuk pegawai baru dan pegawai yang masih membutuhkan penyegaran. Ini dapat mencakup pemahaman tentang perencanaan kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja berdasarkan prinsip-prinsip SAKIP. Awal tahun 2024 telah diadakan sosialisasi/pembinaan SAKIP yaitu :

- Pada tanggal 4 Maret 2024 telah mengikuti pembinaan Tim SAKIP Unit Kerja BPS Provinsi yang dilaksanakan BPS RI
- Pada tanggal 18 Maret 2024 telah mengikuti pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 yang diadakan oleh BPS Propinsi Sumatera selatan

Pembinaan ini telah diikuti oleh pegawai BPS Kota Palembang.

Surat Inspektur Utama Nomor B-21/08000/PW.100/2024 yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2024 mengenai permintaan dokumen evaluasi AKIP BPS 2024 mengindikasikan permintaan resmi untuk menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2024. Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana BPS Kota Palembang, telah memenuhi standar dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan instansi berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, serta untuk meningkatkan akuntabilitas atas penggunaan sumber daya. Dalam rangka memenuhi permintaan inspektorat tersebut, BPS Kota Palembang secara bertahap telah mengunggah dokumen pendukung Sakip pada link :

https://drive.google.com/drive/folders/1X6ELask4t56bAJ_DMEz6aeNbzWW54cjY

dan menunjuk 2 orang sebagai operator untuk mengunggah dokumen sakip pada aplikasi aplikasi sinergi.web.bps.go.id

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, BPS Kota Palembang telah melakukan inovasi penggunaan teknologi untuk mendukung SAKIP yaitu aplikasi SATU (Sistem Administrasi Terpadu) pada link <https://sites.google.com/view/satu-bpskotapalembang/>. Aplikasi ini meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengumpulan dan pengelolaan data kinerja. Sistem informasi yang baik akan mempercepat proses pelaporan dan evaluasi kinerja. Melalui aplikasi ini pendukung SAKIP dapat di upload pada panel

menu “Form Rencana Aksi”.

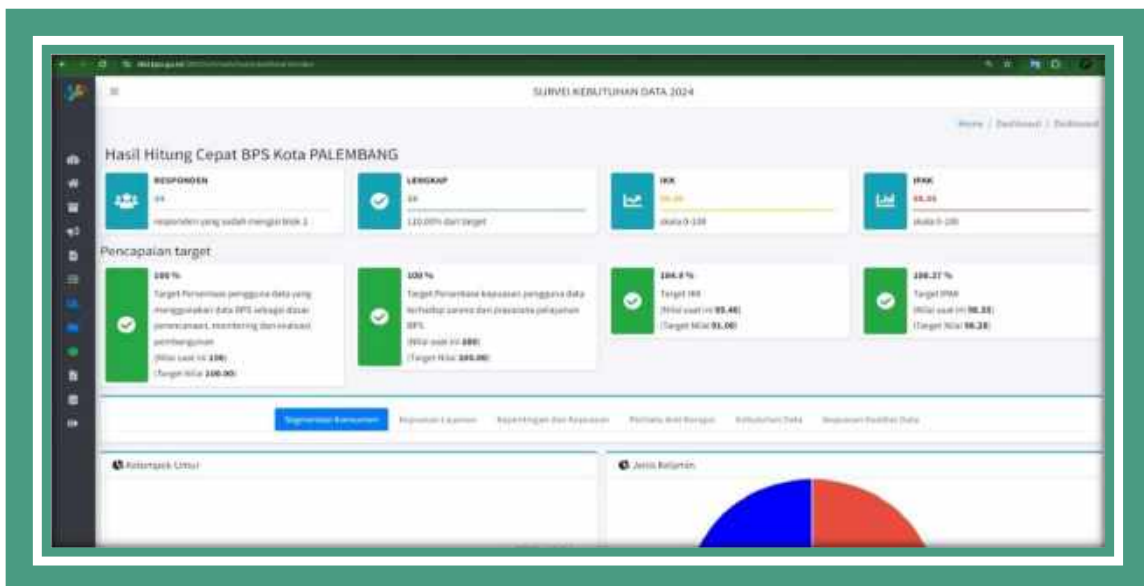
Gambar 16. Aplikasi SATU (Sistem Adiministrasi Terpadu)



Indikator sasaran strategis tujuan keempat yaitu Persentase Kepuasan Pengguna data Terhadap pemenuhan Sarana dan prasarana Pelayanan BPS

Realisasi Realisasi Indikator ini berasal dari hasil SKD. Hasil SKD dapat dilihat pada gambar di bawah

Gambar 17. Hasil Hitung Cepat Survei Kebutuhan Data



Survei Kebutuhan data bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan kepuasan konsumen. Hasil survei ini digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan publik. Berdasarkan hasil survei kebutuhan data, tingkat kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS mencapai 100 persen. Dengan demikian, capaian kinerja BPS pun mencapai 100 persen. Yang lebih menggembirakan, pencapaian ini terlaksana lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan untuk Triwulan IV 2024. Keberhasilan ini mencerminkan kualitas pelayanan yang optimal serta kemampuan BPS dalam memenuhi harapan pengguna data secara tepat waktu dan efisien.



Tabel 21. Capaian Kinerja Persentase Kepuasan Pengguna Data Terhadap Sarana dan Prasarana Pelayanan BPS (%) Triwulanan

Indikator Kinerja	PERJANJIAN KINERJA								Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun				
	Satuan	Target Kumulatif				Realisasi Kumulatif							
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin). Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Prasarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Sarana dan prasarana yang baik merupakan salah satu komponen dalam pelayanan. BPS Kota Palembang telah memiliki Gedung untuk ruangan Pelayanan Statistik Terpadu. Ruang Pelayanan Statistik Terpadu baru berasal dari pemeliharaan dan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

Perubahan signifikan dalam ruangan PST tersebut yaitu telah disediakan komputer yang berisi :

1. Buku Tamu
2. Resepsionis
3. Pelayanan Mandiri
4. Pelayanan Cetak



Dalam rangka mendukung efisiensi kerja dan kualitas pelayanan yang lebih baik diperlukan pemeliharaan dan penambahan peralatan serta perlengkapan tentu. Agar sarana dan prasarana tersebut dapat berfungsi optimal, penambahan anggaran yang memadai sangat diperlukan agar fasilitas yang ada bisa menunjang kebutuhan operasional. Hal ini juga akan berdampak positif pada produktivitas dan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat, terutama dalam hal statistik yang sangat penting untuk pengambilan keputusan.

Penambahan anggaran untuk kebutuhan PST BPS Kota Palembang dalam rangka penilaian PEKPPP juga sangat besar seperti kursi roda untuk penyandang disabilitas, area bermain playgorund (karpet, rak buku anak-anak, rak tempat mainan), lemari untuk buku-buku, rak dan snack corner. Untuk Tahun 2025 BPS Kota Palembang berupaya untuk melengkapi kebutuhan PST yang anggarannya masih kecil seperti : acrylic bingkai untuk pajangan dinding, landmark parkir mobil, motor, Wifi, ruang tunggu, harap tenang , tempat koran, tempat payung, banner layanan nol rupiah , pajangan no smoking dan lain-lain. Anggaran ini dapat diambil dari belanja keperluan perkantoran, sedangkan anggaran untuk kebutuhan PEKPPP lainnya yang anggarannya cukup besar masih menunggu kebijakan dari BPS Pusat.

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi para pengunjung untuk mencari data yang mereka butuhkan. Selain itu BPS Kota Palembang juga melayani konsultasi statistik. Untuk layanan konsultasi statistik BPS Kota Palembang telah memberikan jadwal kepada

petugas untuk melayani konsultasi. Apabila petugas berhalangan maka seluruh pegawai BPS Kota Palembang yang mengerti dan memahami dapat melayani konsultasi statistik.

Gambar 19. Ruang Pelayan Statistik Terpadu



Secara non fisik peningkatan persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pojok statistik. Kegiatan pojok statistik dilaksanakan di Universitas Bina Dharma Palembang dengan MOU Nomor : 121/Moumniv-BDN111/202 tanggal 22 Agustus 2024 dan hingga saat ini pojok statistik tersebut masih berjalan.

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2020 sampai dengan 2024

Perkembangan capaian kinerja BPS Kota Palembang selama periode 2020-2024 mencerminkan dinamika yang cukup signifikan, dengan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Tabel 22. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	110	110	100	100	107,14
1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	110	110	100	100	107,14
1.1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	120	120	100	100	100
1.1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	100	100	100	100	114,29
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi , inetgrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	100	100	110	114,79	117,69
1.1. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	100	100	110	114,79	117,69
2.1.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	100	100	120	120	115,38
2.1.2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata 68sectoral sesuai standar (%)	100	100	100	109,59	120
Tujuan 3 Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	100	100	108,33	120	120
3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	100	100	108,33	120	120
3.1.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	100	100	108,33	120	120
Tujuan 4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	101,54	108,74	99,97	102,64	99,43
4.1. SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan	101,54	108,74	99,97	102,64	99,43
4.1.1. Hasil penilaian implementasi SAKIP	101	99,83	99,94	105,28	98,87
4.1.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	102,88	117,65	100	100	100
Total	102,88	105,35	104,04	107,84	109,79

Pada awal tahun 2020, capaian kinerja yang hanya mencapai 102,88 persen menunjukkan bahwa BPS Kota Palembang menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan pemahaman dan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan statistik. Kendala seperti kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya rekomendasi statistik menjadi hambatan yang perlu diatasi. Namun, dengan adanya upaya berkelanjutan dari BPS Kota Palembang untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi, terutama kepada masing-masing OPD, tercipta peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya rekomendasi statistik. Pada tahun 2021, terlihat adanya peningkatan capaian kinerja menjadi 105,35 persen, yang menunjukkan adanya progres meskipun masih ada beberapa tantangan yang dihadapi.

Penurunan capaian kinerja pada tahun 2022 menjadi 104,04 persen, yang diakibatkan oleh belum tercapainya target dalam penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), memberikan gambaran bahwa masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki, meskipun capaian kinerja tersebut masih berada dalam kisaran yang cukup baik.

Puncak capaian kinerja yang signifikan pada tahun 2023, dengan angka mencapai 107,84 persen, menunjukkan kemajuan yang substansial karena Hasil penilaian implementasi SAKIP mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu dari 71 poin menjadi 74,75 poin dan pembinaan statistik juga meningkat dari 108,33 persen menjadi 120 persen dengan realisasi 170,96 persen.

Tahun 2024 capaian kinerja menjadi 109,79 persen, menunjukkan kemajuan yaitu peningkatan 1,95 persen dari tahun 2023 mencerminkan perbaikan yang berhasil dilakukan oleh BPS Kota Palembang dalam meningkatkan efektivitas kerja dan sinergi dengan OPD, serta semakin memahami pentingnya data statistik yang akurat dan rekomendasi yang diberikan oleh BPS. Akan tetapi di Tahun 2024 terdapat satu IKU yang belum tercapai yaitu Hasil Penilaian Implementasi SAKIP yang belum mencapai 75 poin. Komponen yang mengalami penurunan yaitu pada pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Tabel 23. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dan 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perencanaan Kinerja	30	22.80	22.80
2.	Pengukuran Kinerja	30	22.80	21.60
3.	Pelaporan Kinerja	15	11.40	11.25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17.75	18.50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74.75	74.15
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Kegagalan dalam pencapaian hasil penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2024 bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa penyebab umum yang dapat mempengaruhi hasil implementasi SAKIP adalah:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Kurangnya keterampilan atau kemampuan SDM dalam mengimplementasikan SAKIP dapat menjadi hambatan besar
2. Sistem Pengukuran Kinerja yang Lemah
Implementasi SAKIP sangat bergantung pada sistem pengukuran kinerja yang jelas dan terukur. Jika sistem pengukuran kinerja tidak dirancang dengan baik atau tidak mencerminkan indikator yang tepat, maka sulit untuk mencapai hasil yang diharapkan.
3. Keterbatasan dalam Pengelolaan Data dan Informasi
SAKIP memerlukan pengelolaan data yang akurat dan tepat waktu. Jika terdapat masalah dalam pengumpulan atau pengolahan data kinerja, laporan yang disusun akan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, yang dapat memengaruhi hasil penilaian.
4. Tantangan dalam Perubahan Budaya Kerja
Proses perubahan pegawai yang terjadi di BPS Kota Palembang, seperti perpindahan pegawai, pensiun, dan masuknya pegawai baru, bisa berdampak signifikan pada budaya organisasi dan implementasi sistem SAKIP. Beberapa aspek dari tantangan tersebut yang berkaitan dengan perubahan budaya kerja adalah:

- Perubahan Komposisi Pegawai dan Pemahaman yang Tidak Merata

Perpindahan atau pensiun pegawai senior yang telah berpengalaman, terutama Ketua Tim, dapat menyebabkan hilangnya pemahaman mendalam tentang SAKIP yang selama ini dimiliki oleh mereka. Pegawai baru, yang mungkin belum familiar dengan prinsip-prinsip SAKIP, membutuhkan waktu dan pembelajaran untuk memahami dan menerapkannya. Ini menciptakan ketidaksesuaian tingkat pemahaman antar pegawai yang baru dan yang lama.

- Proses Adaptasi Pegawai Baru. Pegawai baru memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan budaya organisasi, sistem kerja yang ada, serta kebijakan dan prosedur, termasuk SAKIP.
- Perubahan dalam Dinamika Tim dan Pengelolaan SAKIP
Pergantian pegawai, terutama yang berada di posisi kunci seperti Ketua Tim, bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan SAKIP. Ketika tim baru belum sepenuhnya siap atau belum mengerti sepenuhnya sistem yang ada, pengelolaan SAKIP bisa terhambat, yang mengarah pada ketidaktercapainya tujuan implementasi SAKIP.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi, capaian kinerja BPS Kota Palembang menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten, dengan upaya terus-menerus dalam membina dan mendidik OPD serta meningkatkan pemahaman tentang statistik sektoral. Ini merupakan hal yang positif untuk peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

3.1.3. Realisasi kinerja per IKU dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun Pertama periode Renstra

Berdasarkan peraturan Kepala BPS Nomor 4 Tahun 2022 bahwa Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan reviu Renstra 2020-2024. Selama 5 tahun realisasi Renstra tersebut dilakukan pemantauan dan di evaluasi secara berkala sehingga dapat diketahui perkembangan kinerjanya. Realisasi Renstra dapat dilihat pada table 16.

Tabel 24. Realisasi Kinerja Renstra 2020-2024

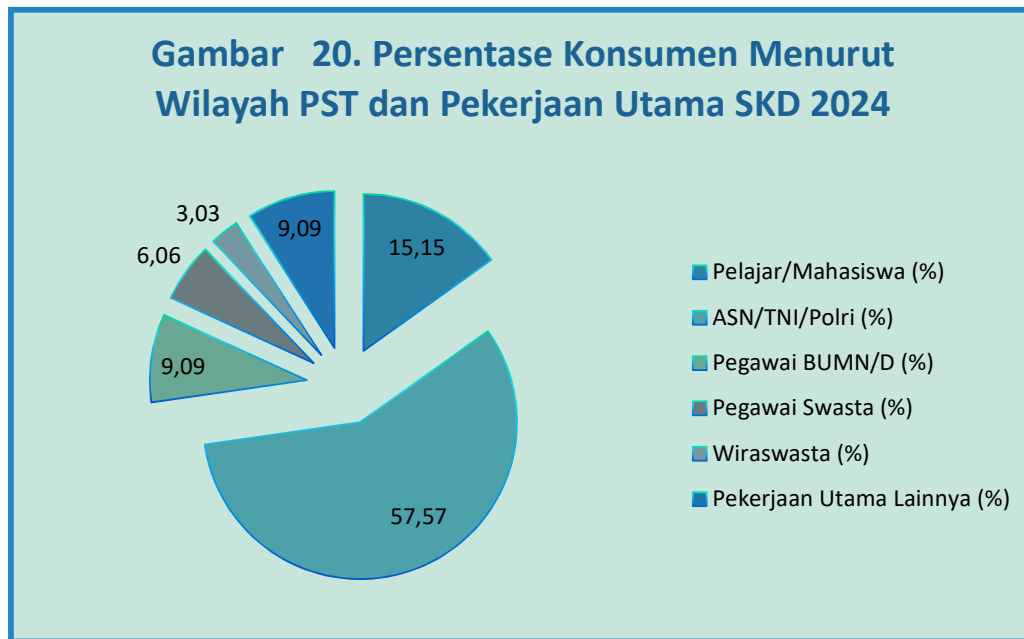
Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	100	100	100	100	100
1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	3,85*	4*	100	100	114,29
2.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	33,33*	100*	50	146,15	115,38
2.2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	10*	69,23	76,92	92,31	115,38
3.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	2,5*	2,5*	100	170,97	167,74
4.1. Hasil penilaian implementasi SAKIP	69,69	69,88	69,96	74,75	74,15
4.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	81,67	100	100	100	100

* Target Tahun 2022 s.d 2024 berubah karena berubahnya metode penghitungan target kinerja indikator dan Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022

Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)

Selama Tahun Renstra 2020-2024, BPS Kota Palembang dapat mempertahankan nilai persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

1. Kredibilitas dan Keakuratan Data , Data yang mereka hasilkan sering digunakan oleh berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta karena telah melalui metodologi yang tepat dan validasi yang ketat. Sesuai dengan hasil SKD bahwa pengguna data BPS Kota Palembang banyak digunakan oleh ASN/PNS/Polri, pelajar atau mahasiswa, pegawai BUMN, Swasta, wiraswasta dan pekerjaan utama lainnya.



2. Pelatihan yang telah dilaksanakan oleh BPS Kota Palembang seperti FGD Palembang Dalam Angka, Pembinaan Statistik Sektoral dan pembinaan Desa Cantik juga mensosialisasikan mengenai pentingnya menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Hal ini meningkatkan kesadaran akan manfaat data BPS dalam pengambilan keputusan.
3. Kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Kerjasama yang lebih erat dengan berbagai instansi pemerintah juga dapat memperkuat posisi BPS sebagai sumber data utama dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Faktor-faktor tersebut bersama-sama bisa berkontribusi pada keberhasilan BPS Kota Palembang dalam mempertahankan dan bahkan meningkatkan penggunaan data mereka dalam pembangunan dan evaluasi pembangunan.

Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi

Tahun 2020 s.d 2021 tidak dapat diperbandingkan dikarenakan terdapat perubahan

penghitungan target kinerja sesuai dengan Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022. Tahun 2022 s.d 2024 terdapat peningkatan jumlah publikasi yang menerapkan standar akurasi yang dilakukan oleh BPS Kota Palembang yaitu penerbitan publikasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Palembang Tahun 2024. Keberhasilan ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari BPS Kota Palembang untuk menghasilkan publikasi yang berkualitas, relevan, dan bermanfaat dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis data yang akurat.

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)

Meskipun metode penghitungan target kinerja indikator mengalami perubahan pada tahun 2020 dan 2021, yang mengakibatkan data pada periode tersebut tidak dapat dihitung secara langsung. Secara nyata, jumlah rekomendasi kegiatan statistik mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, hanya 1 OPD yang menerima rekomendasi, namun pada tahun 2023 angka ini melonjak menjadi 19 OPD. Meskipun ada sedikit penurunan di tahun 2024 dengan 15 OPD yang menerima rekomendasi, tren peningkatan yang tercatat pada tahun 2023 menunjukkan adanya kemajuan yang konsisten dalam pemanfaatan data statistik untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Penurunan jumlah OPD yang menerima rekomendasi kegiatan statistik pada tahun 2024 dapat disebabkan oleh kurangnya anggaran di masing-masing OPD untuk melaksanakan kegiatan statistik. Anggaran yang terbatas bisa mempengaruhi kemampuan OPD untuk mengimplementasikan rekomendasi terkait statistik, terutama jika kegiatan tersebut membutuhkan sumber daya yang cukup besar, seperti pelatihan, pengumpulan data, atau pengolahan data.



Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)

Untuk indikator ini juga tahun 2020 dan 2021 tidak dapat diperbandingkan. Akan tetapi secara nyata terdapat peningkatan signifikan dalam pengumpulan metadata sektoral oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang mencerminkan upaya terus-menerus dalam meningkatkan tata kelola data. Pada tahun 2024, sebanyak 15 OPD berhasil menyampaikan metadata sektoral yang sesuai standar, dengan realisasi mencapai 115,38%. Ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. BPS Kota Palembang terus mengintensifkan koordinasi dengan walidata, khususnya Kominfo, untuk berbagi pengetahuan mengenai penguasaan materi tata kelola dan pemanfaatan aplikasi Indonesia Data Hub (INDAH). Komunikasi yang lebih erat dengan OPD terkait juga menjadi kunci agar dokumen metadata dapat diselesaikan tepat waktu, memastikan data yang lebih akurat dan terkelola dengan baik untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif.

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)

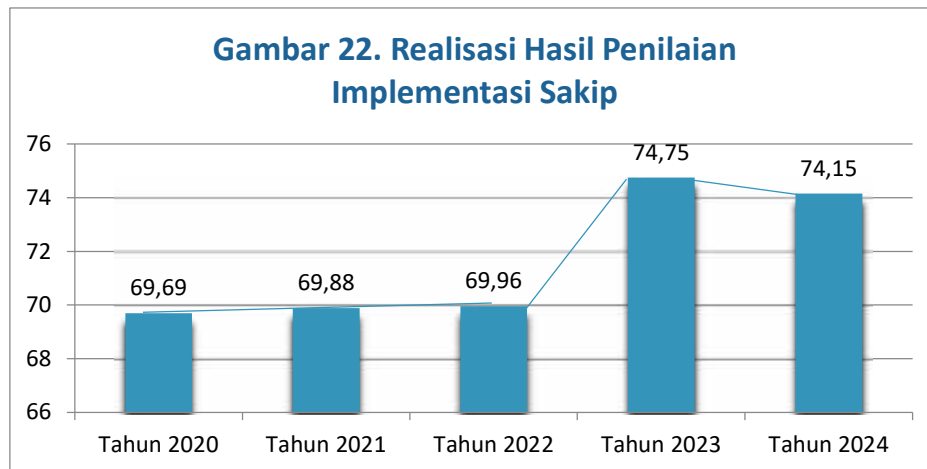
Indikator kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik mengalami dinamika yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, perbandingan data tidak dapat dilakukan karena adanya perubahan nomenklatur yang mengikuti Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2022, yang

menyebabkan perbedaan substansial dalam pelaksanaan pembinaan statistik. Namun, pada tahun 2022, pembinaan statistik berhasil dijalankan dengan baik terhadap 13 OPD melalui pendekatan *office to office*, yang memungkinkan pembinaan lebih intensif dan langsung. Kemudian, pada tahun 2023, pembinaan statistik dilakukan dengan format yang lebih terintegrasi, yaitu bersamaan dengan Forum Group Discussion (FGD) Palembang Dalam Angka. Hal ini menciptakan sinergi yang luar biasa dengan jumlah 53 OPD yang hadir, memberikan angka realisasi pembinaan statistik sebesar 170,97 persen, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 96 persen. Keberhasilan ini menunjukkan antusiasme tinggi dan keterlibatan aktif OPD dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas statistik.

Pahun 2024, jumlah OPD yang menerima pembinaan statistik menjadi lebih sedikit dibandingkan tahun 2023, dengan total 52 OPD. Namun, meskipun ada penurunan jumlah OPD yang terlibat, BPS Kota Palembang tetap melaksanakan dua kegiatan pembinaan statistik pada tahun 2024, yaitu FGD Palembang Dalam Angka dan Pembinaan Statistik Sektoral. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan jumlah OPD yang menerima pembinaan statistik, BPS Kota Palembang tetap fokus pada pengembangan kapasitas statistik untuk meningkatkan pemahaman dan pengelolaan data. Mungkin penurunan jumlah OPD yang terlibat juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti terdapat kegiatan lain yang lebih penting sehingga OPD belum dapat menghadiri. Ke depan, pembinaan statistik yang lebih komprehensif dan menyeluruh diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada OPD, sekaligus mengoptimalkan kualitas data yang dihasilkan. Dengan begitu, keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat lebih tepat sasaran, berdasarkan data yang akurat dan dapat diandalkan.

Hasil penilaian implementasi SAKIP

Indikator kinerja hasil penilaian implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di BPS Kota Palembang menunjukkan tren peningkatan yang positif secara keseluruhan, meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan. Pada tahun 2020, skor SAKIP tercatat sebesar 69,69 poin, yang kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 74,75 poin. Namun, pada tahun 2024, nilai SAKIP mengalami penurunan tipis menjadi 74,15 poin.



Peningkatan nilai SAKIP yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2023 sebesar lebih dari 5 poin merupakan indikator positif dari usaha yang dilakukan oleh seluruh jajaran BPS Kota Palembang dalam mencapai target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kinerja instansi, yang berhubungan dengan beberapa faktor:

1. Peningkatan Kinerja Pegawai

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi peningkatan nilai SAKIP adalah kinerja pegawai yang semakin baik. BPS Kota Palembang telah berhasil mengoptimalkan peran pegawai dalam mencapai tujuan organisasi melalui pelatihan, pembinaan, dan peningkatan keterampilan yang berkelanjutan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas.

2. Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja dan Perencanaan

Seiring waktu, BPS Kota Palembang berhasil meningkatkan kualitas laporan kinerja dan dokumen perencanaan yang sesuai dengan standar SAKIP. Dengan laporan yang lebih transparan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, BPS Kota Palembang dapat memenuhi kriteria evaluasi yang lebih baik dalam penilaian SAKIP.

3. Pemenuhan Standar dan PermindoK SAKIP

Upaya untuk melengkapi semua PermindoK yang diperlukan untuk implementasi SAKIP juga berperan penting. BPS Kota Palembang berfokus untuk selalu memenuhi persyaratan administrasi dan operasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait SAKIP.

Meskipun secara keseluruhan skor SAKIP menunjukkan tren peningkatan, penurunan yang terjadi pada tahun 2024, meskipun kecil (hanya 0,6 poin), tentunya patut dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Meskipun ada penurunan kecil pada tahun 2024, secara keseluruhan, pencapaian SAKIP di BPS Kota Palembang tetap menunjukkan hasil yang positif dalam jangka panjang.

Dengan langkah-langkah tersebut, BPS Kota Palembang diharapkan dapat terus mempertahankan kualitas implementasi SAKIP, memperbaiki aspek-aspek yang perlu diperbaiki, dan mencapai skor yang lebih baik di tahun-tahun mendatang

Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)

Peningkatan indikator kinerja terkait persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Kota Palembang merupakan pencapaian yang sangat positif, yang menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan data. Dari tahun 2020, yang menunjukkan hasil yang signifikan, kepuasan pengguna data tercatat mencapai 100% pada tahun 2021 hingga 2024, meningkat dari 81,67 persen pada tahun 2020. Angka kepuasan yang sangat tinggi ini mencerminkan kualitas pelayanan yang baik, yang tentunya merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh BPS Kota Palembang.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan pengguna data dan keberhasilan BPS Kota Palembang dalam mencapai angka kepuasan yang sangat baik ini antara lain:

- 1. Penataan Ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST)**

Pada tahun 2024, BPS Kota Palembang melakukan penataan kembali ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Penataan ruang ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengunjung yang datang untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dengan ruang pelayanan yang lebih nyaman, terorganisir dengan baik, dan memenuhi standar kenyamanan, pengunjung akan merasa lebih dihargai dan lebih mudah dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan.

Pengalaman pengunjung yang positif akan langsung tercermin dalam penilaian kepuasan pengguna data.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik

Selain penataan ruang, penyediaan sarana dan prasarana yang lebih modern dan efisien tentu turut mendukung kenyamanan pengguna. Sarana seperti komputer, serta perangkat pendukung lainnya yang selalu dalam kondisi baik, memudahkan pengunjung dalam mengakses layanan, baik secara langsung maupun melalui sistem berbasis digital.

3. Peningkatan Performa PST Digital dan Website

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, BPS Kota Palembang juga semakin meningkatkan performa PST Digital dan website untuk mendukung kemudahan akses data secara online. Website yang lebih user-friendly, responsif, dan mudah diakses memungkinkan masyarakat, baik di dalam maupun luar kota, untuk mengakses data statistik secara lebih cepat dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor. Peningkatan ini juga sangat bermanfaat dalam memberikan layanan kepada pengguna data di era digital saat ini, di mana kebutuhan untuk mengakses data secara real-time semakin tinggi.

- PST Digital memungkinkan pengunjung untuk mengakses berbagai jenis data statistik dalam format digital, yang mempermudah pengolahan dan analisis lebih lanjut oleh pengguna.
- Website yang lebih baik memberikan kemudahan dalam pencarian data melalui sistem pencarian yang lebih akurat, memudahkan akses bagi pengguna dari berbagai latar belakang, baik itu pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, maupun masyarakat umum.

4. Pelayanan yang Cepat dan Responsif

Meningkatnya kepuasan juga dapat disebabkan oleh kualitas pelayanan yang semakin cepat, responsif, dan ramah. Petugas BPS Kota Palembang yang terlatih dan profesional dalam memberikan penjelasan mengenai data yang dibutuhkan serta prosedur yang harus diikuti tentu memberikan pengalaman yang baik bagi pengunjung. Pengguna data merasa diperlakukan dengan baik, dan masalah yang mereka hadapi terkait pencarian data dapat diselesaikan dengan cepat.

Meskipun pencapaian kepuasan pengguna data yang mencapai 100% pada tahun 2021 hingga 2024 sangat menggembirakan, BPS Kota Palembang tidak berhenti begitu saja. Untuk memastikan bahwa peningkatan ini terus berlanjut di masa depan, beberapa langkah dan strategi yang perlu dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Teknologi

BPS Kota Palembang dapat terus mengembangkan dan memperbarui sistem dan platform digitalnya agar selalu sejalan dengan perkembangan teknologi terbaru.

2. Meningkatkan Interaksi Pengguna dengan Sistem Digital

Untuk lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat, BPS Kota Palembang dapat terus mengembangkan fitur-fitur interaktif di website atau aplikasi PST Digital, seperti sistem live chat, di mana pengguna dapat langsung berinteraksi dengan petugas atau mendapatkan bantuan secara langsung saat menghadapi kesulitan dalam mengakses data.

3. Evaluasi dan Pengembangan Layanan Secara Berkelanjutan

Untuk menjaga kualitas layanan yang sudah baik, evaluasi secara berkala terhadap layanan yang diberikan perlu dilakukan. Survei kepuasan pengguna data dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dalam pelayanan yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BPS Kota Palembang dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian agar pelayanan tetap relevan dan efisien.

Secara keseluruhan, pencapaian persentase kepuasan pengguna data yang mencapai 100% pada tahun 2021 hingga 2024 menggambarkan upaya yang luar biasa dari BPS Kota Palembang dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan statistik. Peningkatan ini tidak hanya tercermin dalam peningkatan kualitas ruang pelayanan fisik tetapi juga dalam pengembangan platform digital yang semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses data. Harapannya, dengan terus melanjutkan upaya-upaya ini dan melakukan evaluasi serta inovasi secara berkelanjutan, BPS Kota Palembang akan dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan tingkat kepuasan penggunanya di masa depan.

3.1.4. Realisasi kinerja per IKU tahun 2024 terhadap target Akhir Renstra ;

Renstra (Rencana Strategis) adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun 2020-2024 dan berisi target-target kinerja yang ingin dicapai selama periode tersebut. Renstra lebih berfokus pada arah dan tujuan jangka panjang instansi atau organisasi. Pada tahun 2024, capaian kinerja berdasarkan Renstra ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja biasanya disusun berdasarkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, yang mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan perencanaan jangka panjang yang lebih realistis (Renstra). Capaian kinerja berdasarkan Renstra dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 25. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama		Target Renstra 2024	Realisasi Renstra 2024	Capaian Kinerja Rentsra 2024
(1)		(2)	(3)	(4)
1.1.	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	100	100	100
1.2.	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	100	114,29	114,29
2.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	50	115,38	120
2.2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	76	115,38	120
3.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	92	167,74	120
4.1.	Hasil penilaian implementasi SAKIP	71	74,15	104,44
4.2.	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan				111,25

Berdasarkan reuiu Renstra 2020-2024, terdapat indikator yang realisasinya lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu :

1. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi
Reviu Renstra 2020-2024 dan perjanjian kinerja menetapkan target yang sama yaitu sebesar 100 persen. Pada tahun ini, BPS Kota Palembang dapat menerbitkan publikasi Indeks Pembangunan Gender Kota Palembang Tahun 2024 sehingga capaian kinerja BPS Kota Palembang meningkat menjadi 114,29 persen.
2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik
Reviu terhadap Renstra yang ditetapkan menunjukkan bahwa indikator yang tercantum lebih rendah dibandingkan dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati sebelumnya, yaitu sebesar 50 persen. Meskipun demikian, dengan realisasi kinerja yang tercatat sebesar 115,38 persen, hasil yang dicapai lebih tinggi dari yang diperkirakan, yakni mencapai 120 persen. Hal ini mencerminkan pencapaian yang melebihi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tersebut.
Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada keberhasilan ini adalah kolaborasi yang semakin intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kerja sama yang lebih erat dan terkoordinasi antara OPD dan pihak terkait lainnya telah memberikan dampak positif, terutama dalam hal rekomendasi kegiatan statistik. Adanya rekomendasi ini tidak hanya memperkuat kualitas data dan informasi yang dihasilkan, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Dengan meningkatnya intensitas kolaborasi ini, berbagai kegiatan yang bersifat statistik dan yang berhubungan dengan analisis data menjadi semakin relevan dan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perkembangan dan perencanaan di tingkat daerah. Pencapaian kinerja yang signifikan ini menunjukkan bahwa sinergi antara berbagai pihak terkait dapat mendorong kemajuan yang lebih cepat dan berdampak positif bagi pengembangan kebijakan berbasis data yang lebih baik. Oleh karena itu, terus memperkuat kerja sama antar OPD menjadi langkah strategis yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang yang lebih optimal.
3. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral

sesuai standar

Penetapan target Reviu Renstra 2020-2024 lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yang memiliki target sebesar 76 persen. Namun, pada tahun 2024, pencapaian yang luar biasa berhasil tercatat dengan 15 OPD yang berhasil menyampaikan metadata sektoral sesuai standar, mencakup 17 kegiatan yang dilaksanakan.

Keberhasilan ini mengantarkan BPS Kota Palembang meraih angka kinerja yang jauh melebihi target, dengan pencapaian 151,81 persen yang kemudian dibulatkan menjadi 120 persen. Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan hasil yang optimal, tetapi juga menggambarkan komitmen dan kerja keras yang terus-menerus dalam mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan lebih transparan.

4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik

Sama halnya dengan rekomendasi dan metadata, reviu Renstra 2020-2024 juga menetapkan target yang lebih rendah dibandingkan dengan perjanjian kinerja. Reviu Renstra menargetkan 92 persen sedangkan perjanjian kinerja menargetkan 100 persen. Namun, meskipun demikian, pada tahun 2024, BPS Kota Palembang belum berhasil melampaui pencapaian tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, BPS Kota Palembang sukses melakukan pembinaan statistik terhadap 53 OPD, sementara tahun ini, jumlah OPD yang mengikuti pembinaan statistik sedikit berkurang, yaitu sebanyak 52 OPD.

Meskipun demikian, capaian ini tetap menunjukkan hasil yang signifikan, dengan BPS Kota Palembang berhasil meraih angka kinerja sebesar 182,33 persen, yang kemudian dibulatkan menjadi 120 persen. Pencapaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pembinaan statistik dan kerja sama antara BPS dengan OPD untuk memperkuat tata kelola statistik di kota ini.

5. Hasil penilaian implementasi SAKIP

Dari Tahun 2020 hingga 2024 terdapat penetapan target kinerja Hasil Penilaian Implementasi Sakip dari 69 poin menjadi 71 poin. SAKIP menilai kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan, termasuk efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pencapaian sasaran dan tujuan. Semakin baik hasil penilaian SAKIP, semakin

tinggi tingkat akuntabilitas dan transparansi instansi tersebut dalam mengelola program dan kegiatan. Pada tahun 2024 BPS Kota Palembang dapat mencapai nilai Sakip sebesar 74,15 poin, lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 71 poin, Sehingga capaian kinerja yang diperoleh oleh BPS Kota Palembang sebesar 104,44 persen.

Sedangkan indikator lainnya seperti Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan dan Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS masih dapat dipertahankan oleh BPS Kota Palembang. Sehingga, secara keseluruhan, BPS Kota Palembang berhasil mempertahankan kinerja yang baik pada indikator kerjanya, mencerminkan komitmen dan upaya yang konsisten dalam memberikan layanan yang berkualitas serta mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berbasis data.

3.1.5. Kegiatan Prioritas

3.1.5.1. Survei Penyusunan Disagregasi PMTB

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah/negara adalah investasi. Investasi tersebut terutama investasi fisik (kapital) yang merupakan faktor utama selain tenaga kerja dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi fisik direalisasikan dalam bentuk penambahan kapital atau yang dikenal sebagai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dimana penambahan kapital diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Dalam upaya mewujudkan skala prioritas nasional sangat dibutuhkan data investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang telah didisagregasi menurut institusi dan lapangan usaha. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah melalui Bappenas meminta Badan Pusat Statistik melaksanakan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2019.

Pelatihan Petugas Survei PMTB Kota Palembang Tahun 2024 dilakukan secara online menggunakan zoom meeting selama 2 (dua) hari yakni tanggal 24-25 Juni 2024 dan 1 (satu) hari offline tanggal 27 Juni 2024. Pelatihan Survei PMTB dilakukan oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan pencacahan Survei PMTB dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2024, namun berdasarkan surat dari Direktur Neraca Pengeluaran BPS RI pada tanggal 30 Agustus 2024 Nomor : B-184/07200/V.S.330/2024 Perihal: Evaluasi Progress. Pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2024, pelaksanaan survei PMTB Tahun 2024 diperpanjang sampai tanggal 17 September 2024. Responden Dinas telah ditentukan dari BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 24. Pendataan Lapangan PMTB



Untuk menjaga kualitas data yang dikumpulkan, dilakukan pemeriksaan Survei PMTB. Petugas pemeriksa yang bertugas memeriksa isian dokumen terdiri dari 1 orang, yang dilakukan terhadap hasil submit data yang dikirimkan di aplikasi Fasih Mobile. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan isian dari kuesioner terisi dengan benar dan sesuai dengan kondisi yang ada dari responden. Pemeriksaan ini dilakukan pada bulan Juli sampai 17 September 2024.

Pengolahan Survei PMTB bersamaan dengan pengumpulan data dikarenakan pengumpulan data oleh petugas pencacah menggunakan aplikasi Fasih Mobile. Pengolahan dapat diselesaikan seluruhnya sesuai dengan target waktu yang ada dan mencapai target 100 persen.

Secara umum pelaksanaan lapangan Survei PMTB Tahun 2024 ini mengalami cukup banyak kendala dikarenakan terdapat beberapa kuesioner yang tidak tersedia datanya dari dinas yang menjadi sampel survei sehingga harus mencari sumber data lain yang relevan. Beberapa responden mendapat kesulitan pada saat pengisian Blok IIA dan IIB Kuesioner PMTB24-Perkebunan MI-01 dan Kuesioner PMTB24-Hortikultura MI-02. Blok tersebut berisi rincian mengenai Biaya Perawatan Tanaman Belum Menghasilkan. Selain itu, untuk kuesioner PMTB24-Hewan MI-03, data yang tersedia tidak sesuai dengan yang diminta sehingga kekurangan data tersebut diminta dari provinsi. Kuesioner M1-09 pada

Blok IIIA dan IIB untuk kolom (6) Perkiraan Harga Bangunan per m², datanya tidak tersedia, sehingga kekurangan data tersebut diminta dari provinsi. Sedangkan untuk isian blok IVA dan IVB, data luas bangunan yang diterima secara total dan tidak dapat dirinci menurut klasifikasi bangunan sehingga dimasukkan ke jenis bangunan yang dominan yaitu luas bangunan gedung baru.

Saran diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk merinci permohonan izin yang masuk berdasarkan Fungsi Klasifikasi Bangunan yang ada.

3.1.5.2. Sensus Ekonomi Pertanian

ST2023 dilakukan untuk mengakomodasi variabel untuk kelengkapan data pertanian yang berkembang sangat dinamis, menjawab kebutuhan data baik di level nasional maupun internasional, dan dirancang untuk memperoleh hasil yang berstandar internasional dengan mengacu pada program *Food and Agricultural Organization (FAO)* yang dikenal dengan *World Programme for the Census of Agriculture (WCA)*. Untuk memperoleh keterbandingan internasional, Sensus Pertanian dilaksanakan sedekat mungkin dengan tahun 2020.

Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 merupakan rangkaian dari kegiatan Sensus Pertanian 2023. Oleh karenanya informasi informasi dalam kegiatan pemutakhiran dan pencacahan lengkap ST2023 dapat dimanfaatkan sebagai kerangka sampel kegiatan SEP 2024. Cakupan SEP 2024 meliputi tiga unit statistik yaitu usaha pertanian perorangan (UTP), perusahaan pertanian berbadan hukum (UPB), dan usaha pertanian lainnya (UTL). Secara jelas dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 25. Cakupan SEP2024



Pendataan SEP 2024 dilakukan selama 1 (satu) bulan. Petugas pendataan lapangan harus dapat mengatur beban tugasnya agar seluruh unit pendataan di dalam wilayah tugasnya dapat tercatat dan data yang dihasilkan berkualitas. Penentuan beban tugas Petugas pendataan lapangan telah mempertimbangkan beban tugas, jarak dan waktu yang perlu ditempuh untuk menyelesaikan beban tugasnya. Setiap petugas perlu menetapkan target penyelesaian harian untuk memastikan seluruh beban tugas dapat diselesaikan dalam rentang waktu satu bulan.

Kegiatan pelaksanaan lapangan Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 yaitu pada tanggal 1 sd 30 Juni 2024, dimana lingkup pendataannya mencakup Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Pertanian Lainnya (UTL) dan Usaha Pertanian Berbadan Hukum (UPB). Berbagai upaya telah dilaksanakan demi kelancaran pendataan lapangan, antara lain :

1. Memberikan apresiasi kepada petugas dimulai dengan memberikan penghargaan petugas terbaik ketika pelaksanaan pelatihan petugas di Salatin Hotel Palembang.
2. Melakukan assignment sampel rumah tangga ke petugas sebelum jadwal pencacahan.
3. Petugas UPB/UTL SEP2024 menyusun matriks jadwal pendataan sebelum pendataan lapangan. Hal tersebut penting juga dalam penyusunan transport lokal perjalanan petugas.
4. Monitoring Harian melalui dashboard monitoring SEP2024.
5. Pelaksanaan Monitoring Kualitas (MK), pendampingan dan revisit perusahaan nonrespon.
6. Pendokumentasian kegiatan selama di lapangan dan dibagikan dalam WhatsApp Group petugas agar bisa saling menyemangati antar petugas

Gambar 26. Pencacahan Lapangan Sensus Ekonomi Pertanian



7. Pelaksanaan Manajemen Risiko (MR) dan *Quality Gates* (QG). BPS Kota Palembang sudah menyusun MR dan mengimplementasikannya pada SEP2024. Untuk memitigasi terjadinya nonrespon, maka BPS Kota Palembang sudah melakukan kunjungan ke perusahaan yang sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 belum berkenan memberikan datanya. Untuk mitigasi lainnya adalah pengisian *Quality Gates*, yaitu strategi mitigasi risiko untuk deteksi dini dari kesalahan atau kekurangan pada setiap proses statistik (Australian Bureau of Statistics, 2016). *Quality Gates* dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses statistik dan mengukur serta memantau kualitas secara *real time* di titik-titik strategis.

Salah satu indikator keberhasilan pengumpulan data adalah besarnya response rate pemasukan data. Indikator lainnya adalah persentase data pencilan dan error yang dapat menggambarkan kualitas hasil pendataan di lapangan. Salah satu upaya BPS dalam menghasilkan data yang berkualitas kepada public, adalah dengan mendeteksi secara dini dan menindaklanjuti ketidakwajaran data atau anomali melalui pemanfaatan dashboard monitoring BPS dan FASIH-SM. Berikut disampaikan rekapitulasi hasil pendataan SEP2024.

Tabel 26. Rekapitulasi hasil Pendataan SEP2024

Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
UTP	830	830	100
UPB	13	9	69,23
UTL	2	2	100

Pada pelaksanaan SEP2024 saat ini, di tingkat daerah berjalan dengan baik dari mulai persiapan sampai dengan evaluasi hasil pengolahan. Harapannya untuk ke depannya pelaksanaan survei/sensus BPS dapat terus ditingkatkan di beberapa tahapannya. Adapun saran dan masukannya antara lain:

1. Kurangnya waktu pelatihan petugas mengakibatkan para Instruktur tidak memiliki banyak waktu untuk berdiskusi terkait kasus-kasus yang biasa terjadi di lapangan.
2. Update Webquery SEP2024 per 3 jam, hal tersebut menghambat kecepatan dalam mengevaluasi data. Harapannya agar Webquery dapat dilakukan per 1 jam.
3. List Query yang agak sulit dipahami oleh tim di daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan response rate, BPS mengadakan acara sosialisasi yang mengundang perusahaan yang berpotensi nonrespon dan selalu memberikan apresiasi pada perusahaan yang selalu memberikan respon baik pada survei/sensus BPS.

3.1.5.3. Statistik Tanaman Pangan

Ketersediaan data produktivitas merupakan salah satu instrument kunci dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi beras nasional. Selama ini, BPS secara rutin mengumpulkan data produktivitas melalui Survei Ubinan. Data tersebut digunakan sebagai salah satu elemen dalam penghitungan produksi padi. Survei Ubinan dilakukan di 34 provinsi di Indonesia secara rutin sepanjang tahun. Survei Ubinan untuk komoditas padi mencakup padi sawah dan padi lading.

Pelaksanaan Survei Ubinan di Kota Palembang sudah dilaksanakan sesuai dengan SPO yang berlaku. Pengumpulan data produktivitas dilakukan melalui Survei Ubinan. Secara garis besar pelaksanaan Survei Ubinan terbagi menjadi 2 yaitu pemutakhiran daftar rumah tangga dan pelaksanaan ubinan.

Pada tahun 2024 jumlah blok yang dimutakhirkan sebanyak 19 blok sensus dengan target sampel sebanyak 20 rumah tangga. Namun realisasinya, pada subround 1 terpenuhi 4 sampel, pada subround 2 hanya 4 sampel dan subround 3 sebanyak 7 sampel. Jadi total realisasi untuk ubinan palawija adalah 15 sampel rumah tangga. Kemudian

dalam ubinan padi tahun 2024 dilakukan metode ubinan berbasis KSA. Dalam praktiknya, ubinan KSA lebih mudah dilaksanakan karena kita sudah mengetahui lokasi ubinan meskipun belum mengetahui pengelola sehingga pemantauan sawah lebih mudah dilakukan. Sehingga total realisasi padi dan palawija ada sebanyak 147 sampel dari total target kota Palembang adalah 150 sampel. Secara persentase capaiannya adalah 98 persen

Kegiatan Survei Pertanian Tanaman Pangan 2024 di BPS Kota Palembang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditentukan. Pendataan Survei Pertanian Tanaman Pangan tidak mendapat kendala yang berarti. Pengumpulan data Survei Pertanian Tanaman Pangan 2024 sangat membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan petugas ubinan.

Adapun saran bagi kegiatan Survei Pertanian Tanaman Pangan 2024 yang telah dilaksanakan di BPS Kota Palembang sebagai gambaran untuk kegiatan survei berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap petugas yang terlibat harus berdedikasi dan berloyalitas tinggi agar diperoleh data yang berkualitas;
2. Setiap tahapan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Survei Pertanian Tanaman Pangan 2024 harus dilaksanakan secara tepat dan benar agar tidak menjadi masalah atau kendala pada tahapan berikutnya;
3. Petugas yang terlibat harus memiliki pemahaman konsep yang baik sehingga pendataan Survei Pertanian Tanaman Pangan 2024 ini bisa berjalan lancar.

Gambar 27. Pendataan Lapangan Ubinan Padi





3.1.5.4. Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan KSA

Selama ini pengumpulan data luas panen masih menggunakan metode konvensional, yaitu hasil pandangan mata petugas (eye estimate). Meskipun penggunaan metode tersebut mudah diterapkan tetapi penggunaan metode tersebut mengakibatkan rendahnya akurasi dan lamanya waktu yang dibutuhkan.

Perbaikan metodologi pengumpulan data pertanian yang dilakukan oleh BPS bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyusun kerangka sampel dan sistem pelaporan yang digunakan dalam pengumpulan data statistik pertanian yang berbasis teknologi guna memperbaiki metodologi pengumpulan data luas panen sebelumnya. Pengumpulan data luas panen dengan metode KSA ini dilakukan dengan cara yang lebih obyektif dan modern serta melibatkan perangkat teknologi di dalamnya. Sehingga data pertanian yang diperoleh lebih akurat dan tepat waktu.

Alokasi petugas KSA memperhatikan banyaknya segmen yang akan dicacah, jarak, wilayah domisili petugas dan waktu penyelesaiannya sehingga petugas dapat menyelesaikan pekerjaan di lapangan dengan cepat. Secara umum, jumlah segmen KSA sebanyak 41 segmen dengan rincian KSA Padi sebanyak 25 segmen dan KSA Jagung sebanyak 16 segmen. Dalam pelaksanaan lapangan terdapat beberapa kendala yang dialami, seperti:

1. Ada beberapa segmen KSA Padi yang sulit dikunjungi karena kondisi lapangan banjir;
2. HP Petugas memorinya penuh sehingga ketika proses pengambilan foto amatan menjadi lambat.

Pengawasan/pemeriksaan dilakukan oleh PMS untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. Pemeriksaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Pemeriksaan/pengawasan dalam kegiatan KSA 2024 bertujuan untuk:

1. Menjamin agar PCS melakukan tugasnya sesuai dengan jadwal waktu, tata cara dan instruksi yang telah dilakukan;
2. Menjamin kebenaran dan keabsahan hasil pelaksanaan lapangan yang dilakukan oleh PCS;
3. Menjamin agar PCS selalu berpegang teguh pada buku Pedoman Pencacah KSA Padi dan Jagung 2024, terutama konsep dan definisi yang digunakan.

PMS harus melakukan pengawasan terhadap hasil pengamatan yang dilakukan PCS yang diawasinya selama rentang waktu pengamatan. Pengawasan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: melalui pengawasan secara langsung ke lokasi segmen, dan monitoring pelaksanaan KSA 2024. Monitoring KSA jagung dapat dilakukan melalui aplikasi KSA Jagung dan website <https://ksa.bps.go.id/jagung>. Sementara untuk KSA padi dapat dilakukan pada aplikasi KSA padi dan website <https://ksapro-manajemen.bps.go.id>.

Kegiatan pencacahan pengamatan Survei KSA Tahun 2024 dilaksanakan rutin setiap bulan dan berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Berikut target dan realisasi pemasukan amatan Survei KSA Padi dan Jagung selama tahun 2024:

Tabel 27. Pemasukan Dokumen Survei KSA Padi dan Jagung Tahun 2024

Kecamatan	Target	Realisasi
KSA Padi		
Ilir Barat 2	24	24
Gandus	72	72
Seberang Ulu Satu	48	48
Jakabaring	12	12
Kertapati	48	48
Plaju	12	12
Ilir Timur Dua	12	12
Kalidoni	60	60
Sematang Borang	12	12
KSA Jagung		
Gandus	96	96
Sukarami	72	72
Alang-alang Lebar	24	24

Berdasarkan tabel target dan realisasi tersebut dapat dilihat bahwa Kota Palembang dalam pelaksanaan Survei KSA Padi dan Jagung telah mencapai target 100 persen selama tahun 2024.

Selanjutnya berdasarkan hasil supervise/pengawasan yang dilakukan di beberapa sampel area Survei KSA diperoleh beberapa catatan sebagai berikut:

1. Terjadi pengajuan penggantian sampel sebanyak 1 kali, titik segmen di Sematang borang dipindahkan ke kecamatan Gandus;
2. Pelaksanaan lapangan sudah dilakukan sesuai dengan SOP baik pencacahan maupun pemeriksaan/pengawasan.

Adapun saran bagi kegiatan Survei KSA 2024 yang telah dilaksanakan di BPS Kota Palembang sebagai gambaran untuk kegiatan survei berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap petugas yang dilibatkan harus dilakukan dengan perekrutan yang baik, agar didapatkan petugas yang berdedikasi dan berloyalitas tinggi agar diperoleh data yang berkualitas;
2. Setiap tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan Survei KSA 2024 harus dilaksanakan secara tepat dan benar sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan saat pelatihan;
3. Petugas yang terlibat harus memiliki pemahaman konsep yang baik sehingga pendataan lapangan Survei KSA 2024 ini bisa berjalan lancar;
4. Hasil amatan di lapangan oleh petugas sebaiknya langsung diperiksa oleh pengawas sehingga jika ada kesalahan langsung bisa dikoreksi

3.1.5.5. Statistik E-Commerce

Kehadiran E-Commerce tidak hanya memberi andil dalam merubah pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat, namun juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi individu-individu untuk menjadi enterpreneur yang ke depannya diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan. Tingginya potensi ekonomi digital telah mendorong pemerintah untuk terus memantau dan memperbaharui regulasi terkait E-Commerce. Untuk itu perlu

ketersediaan data yang lebih lengkap dan dapat memetakan perkembangan E-Commerce di Indonesia, sebagai evidence based policy making dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Dalam rangka pemetaan E-Commerce di Indonesia, BPS melanjutkan pendataan E-Commerce berbasis usaha rumah tangga dan perusahaan untuk memperoleh gambaran perkembangan usaha E-Commerce di Indonesia, dari sudut pandang pelaku usaha ECommerce. Metode pendataan E-Commerce yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah Go Digital, dengan berbasis CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), sehingga data dan informasi dapat dikumpulkan secara cepat, mudah, dan akurat at anytime and anywhere.

Jadwal pelaksanaan lapangan Survei *E-Commerce* 2024 dijadwalkan mulai dari Bulan Oktober – November 2024 dan dalam pelaksanaannya tidak meleset dari jadwal yang telah ditetapkan dan mencapai target pengumpulan data 100 persen.

Gambar 27. Pencacahan Lapangan Statistik E-Commerce



Pelaksanaan pengumpulan data bisa tepat waktu bukan berarti tanpa kendala, kendala yang ditemui dalam pelaksanaan listing dan pengumpulan data adalah terdapat gangguan submit atau sinkron data aplikasi fasih karena masalah sinyal ataupun perangkat petugas yang kurang memadai. Solusi yang disarankan oleh tim IPD adalah clear data aplikasi di HP petugas, lalu sinkron ulang. Jika masih belum berhasil, maka coba logout lalu relogin. Jika masih belum bisa maka coba hapus aplikasi fasihnya lalu install ulang. Perangkat petugas yang memorinya full bisa mengakibatkan aplikasi fasih terus *loading* dan form kuesioner tidak muncul. Jika HP petugas masih bermasalah karena memori full maka petugas tersebut harus menghapus file file yang tidak penting atau jika memungkinkan mengganti HP. Untuk mengantisipasi masalah data hilang sebelum terkirim ke server, bagi petugas-petugas yang lokasi pendataannya jauh, susah sinyal ataupun HP kurang memadai disarankan bagi mereka untuk mencatat hasil listing dengan kuesioner cetak (kertas) sebagai backup data.

Selain masalah aplikasi, perangkat dan sinyal, masalah lainnya yaitu masih ditemukannya ketidak konsistenan kategori usaha antara listing dan pencacahan lapangan. Ini menjadi anomali yang paling banyak ditemukan. Hal ini diakibatkan oleh kurang pahaman PCL terkait penentuan kategori lapangan usaha berdasarkan kegiatan utama dan kekeliruan inipun lolos dari pemeriksaan PML. Tindak lanjut dari masalah ini adalah PCL dan PML harus mengecek kembali kategori usaha yang tidak konsisten tersebut dan melakukan perbaikan jika memang terdapat kekeliruan atau memberikan konfirmasi di blok catatan jika hal tersebut sudah sesuai dengan kondisi lapangan.

Tabel 28. Target dan Realisasi Sampel Survei E-Commerce 2024 di Kota Palembang

No	Kecamatan	Target	Realisasi
1	Ilir Barat Dua	7	7
2	Gandus	2	2
3	Seberang Ulu Satu	15	15
4	Jaka Baring	2	2
5	Seberang Ulu Dua	9	9
6	Plaju	5	5
7	Ilir Barat Satu	39	39
8	Bukit Kecil	24	24
9	Ilir Timur Satu	21	21
10	Kemuning	34	34
11	Ilir Tumur Dua	22	22
12	Kalidoni	17	17
13	Ilir Timur Tiga	22	22
14	Sako	10	10
15	Sukarami	35	35
16	Alang alang lebar	18	18
Jumlah		282	282

Meskipun terdapat banyak kendala penggunaan aplikasi fasih mobile, pendataan Survei *E-Commerce* BPS Kota Palembang bisa selesai tepat waktu sebelum batas akhir waktu pelaksanaan lapangan dan mencapai target 100 persen. Selain itu, dari segi kualitas, Ketua dan Anggota Tim Survei *E-Commerce* Kota Palembang secara pro aktif mengingatkan PML dan PPL agar segera menindaklanjuti daftar anomali di dashboard monitoring sehingga pada akhir November 2024 seluruh anomali telah ditindak lanjuti.

3.1.5.6. Updating Direktori Usaha

Pada tahun 2017 basis data SBR dibangun ulang menggunakan data hasil pendaftaran usaha/perusahaan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016-L2) sebagai dasar. Dalam rangka persiapan dan mendukung suksesnya Sensus Ekonomi tahun 2026, data SBR akan digunakan sebagai identifikasi awal keberadaan usaha/perusahaan yang harus dicek keberadaannya. Berangkat dari hal ini dapat disimpulkan bahwa data SBR harus terus menerus diperbaiki, dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Pemeliharaan dan Pemutakhiran data SBR berkesinambungan. Pemeliharaan dan

pemutakhiran data SBR akan berjalan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan juga oleh Subject Matter di daerah yang dekat dengan sumber datanya. Oleh karena itu, pada tahun 2024 akan dilakukan kembali pemutakhiran data SBR melalui kegiatan Updating Direktori Usaha/Perusahaan Ekonomi.

Jumlah sampel usaha/perusahaan di BPS Kota Palembang sebanyak 959, dengan jumlah petugas sebanyak 24 petugas lapangan, 4 pengawas dan 2 instruktur daerah (Inda). Pelaksanaan Lapangan berhasil mencapai 961 usaha/Perusahaan

Dalam pelaksanaan lapangan terdapat permasalahan baik teknis maupun non teknis. Permasalahan teknis dalam beberapa survei yang menggunakan daftar sampel utama dan cadangan adalah berupa penggantian sampel terhadap perusahaan/usaha yang tidak eligible. Penggantian sampel ini umumnya terjadi karena usaha/perusahaan memiliki alamat yang tidak jelas, sehingga sulit ditelusuri oleh petugas.

Metode pencacahan yang menggunakan moda Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) sudah mengalami perbaikan seiring waktu, namun masih ada kendala terkait dengan jaringan internet yang terkadang kurang stabil. Secara umum beberapa kendala yang tercatat selama pelaksanaan UDPE tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Proses identifikasi yang dilakukan pada tahap awal belum optimal, sehingga masih cukup banyak ditemukan sampel yang tidak eligible di lapangan.
2. Cukup banyak usaha/perusahaan dengan alamat yang tidak jelas, sehingga petugas kesulitan mencari keberadaan usaha/perusahaan tersebut.
3. Sampel yang tidak eligible seharusnya tetap didata oleh petugas dengan mengisi keberadaan usaha (tutup/tidak ditemukan/dobel), lalu tetap disubmit, selanjutnya baru dilakukan penggantian sampel oleh admin kabupaten/kota. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa sampel utama yang tidak eligible tidak disubmit oleh petugas. Hal ini menyebabkan sampai akhir periode pendataan ditemukan sampel utama yang masih berstatus "open".
4. Listing dan pendataan untuk usaha kategori "menengah" masih cukup sulit. Petugas harus memberi kuesioner hardcopy untuk ditinggalkan. Pemasukan datanya juga relatif lebih lama dibanding pendataan pada usaha-usaha mikro.
5. Pemahaman petugas terkait konsep dan definisi perlu ditingkatkan kembali, karena masih ditemukan kekeliruan dalam pemahaman.

Secara umum tindak lanjut dari beberapa kendala selama pelaksanaan lapangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses identifikasi sebagai tahap awal sebelum melakukan pendataan memang menjadi cukup penting. Proses identifikasi juga akan berguna pada saat pendataan terutama untuk usaha/perusahaan yang sudah tutup, sehingga akan langsung digantikan dengan sampel lain. Artinya petugas tidak perlu lagi menginput dan melakukan submit untuk data usaha/perusahaan yang sudah tutup.
2. Menelusuri informasi usaha/perusahaan tersebut melalui internet ataupun bertanya pada pihak yang sekiranya mengetahui keberadaan usaha tersebut. Untuk itu juga ditekankan kepada petugas dalam melakukan pendataan berbagai jenis survei agar mengisikan alamat usaha/Perusahaan secara lengkap dan jelas, karena hasil dari berbagai survei akan diintegrasikan menjadi frame/kerangka sampel kegiatan sensus dan survei selanjutnya.
3. Terkait permasalahan listing dan pendataan untuk usaha kategori “menengah” masih cukup sulit, karena sebagai usaha yang cukup besar memang terkadang keberadaan data yang diperlukan untuk mengisi kuesioner tidak berada di 1 (satu) orang saja, misal data terkait data tenaga kerja ada di divisi kepegawaian, data terkait keuangan perusahaan ada di divisi keuangan dan sebagainya.
4. Memetakan kemampuan petugas agar petugas yang kurang baik hasil pelatihannya dapat lebih didampingi oleh pengawas ataupun penanggung jawab kegiatan. Pelatihan juga diharapkan dapat dilakukan secara tatap muka tidak secara online. Pelatihan online seringkali tidak optimal, sebab tidak ada kontrol terkait kedisiplinan peserta selama mengikuti pelatihan. Selain itu, faktor di luar peserta juga sangat berpengaruh, seperti: perangkat/HP yang memadai, jaringan internet yang digunakan serta kenyamanan tempat selama mengikuti pelatihan.

Meskipun di lapangan, masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, namun secara umum pelaksanaan UDPE Tahun 2024 dapat berjalan lancar dan petugas dapat memenuhi batas waktu yang telah ditentukan. Per 31 Juli 2024 realisasi pendataan lapangan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan (waktu pendataan diperpanjang sampai 9 Agustus 2024). BPS Kota Palembang justru melampaui target, karena beberapa usaha “menengah” yang awalnya cukup lama memberi data sudah diganti dengan usaha/perusahaan lain, namun ternyata menjelang akhir

periode pendataan, data dari usaha/perusahaan tadi bisa didapatkan.

3.2. Analisis Capaian Kinerja PK Suplemen Tahun 2024

Tidak seperti tahun sebelumnya, untuk tahun 2024 terdapat tambahan PK yaitu PK suplemen yang terdiri dari 4 indikator strategis yaitu :

Tujuan 1	:	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
Sasaran	:	1.1.Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
Indikator	:	1.1.1. Response rate survei berbasis rumah tangga di wilayah BPS Kabupaten/Kota
		1.1.2.Response rate survei berbasis usaha di wilayah BPS Kabupaten/Kota
Tujuan 3	:	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
Sasaran	:	3.1.Penguatan statistik sektoral K/L/D/I
Indikator	:	3.1.1.Tingkat ketepatan waktu Pemerintah Daerah melakukan submit penilaian EPSS di wilayah BPS Kabupaten/Kota
Tujuan 4	:	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi
Sasaran	:	4.1.SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan
Indikator	:	4.1.1.Satker dengan Nilai Kinerja Anggaran minimal berkategori "Baik"

3.2.1. Capaian Kinerja PK Suplemen Tujuan Pertama

Tabel 29. Capaian Kinerja PK Suplemen Tujuan Pertama BPS Kota Palembang Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Response rate survei berbasis rumah tangga di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	96	98,86	102,98
	Response rate survei berbasis usaha di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	80	99,37	120,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama					111,49

Response rate survei berbasis rumah tangga di wilayah BPS Kota Palembang

Survei berbasis rumah tangga yang dilakukan oleh BPS Kota Palembang menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan response rate mencapai 98,86 persen, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 96 persen. Hal ini mengindikasikan capaian kinerja yang sangat baik, yaitu sebesar 102,98 persen. Tidak hanya itu, survei-survei lain yang juga berbasis rumah tangga seperti Susenas, Seruti, dan Sakernas juga menunjukkan hasil yang serupa, yakni semuanya berhasil mencatatkan angka capaian yang lebih tinggi dari target yang sudah direncanakan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya maksimal yang dilakukan oleh tim BPS Kota Palembang dalam melakukan koordinasi yang efektif, serta pemahaman yang mendalam tentang pentingnya data yang valid dan akurat. Ini menjadi bukti nyata bahwa pengumpulan data berbasis rumah tangga di wilayah ini sangat efektif dan berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pendataan lapangan terdapat kendala yaitu :

1. Beberapa rumah tangga tidak bersedia diwawancarai walaupun telah diberikan penjelasan oleh pengawas dan staf BPS Kota Palembang sampai akhir jadwal pencacahan
2. Saat pemutakhiran rumah tangga ,ada beberapa rumah tangga yang tidak bisa ditemui sampai akhir pemutakhiran
3. Sampai batas waktu pencacahan masih ada sebanyak 16 ruta responden tetap menolak diwawancarai dan tidak ada anggota rumah tangga bisa ditemui.

Untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam pengumpulan data, Petugas Pengumpul Data (PCL) dan Petugas Monitoring Lapangan (PML) berusaha mencari informasi keberadaan rumah tangga responden yang belum dapat dijangkau dengan cara meminta keterangan kepada tetangga sekitar atau Ketua SLS. Dalam proses ini, mereka juga melakukan koordinasi dan pendampingan dengan Ketua SLS untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan lebih maksimal.

Gambar 29. Koordinasi dan Pendampingan Pencacahan ke Ketua SLS/Tetangga



Setelah melakukan kunjungan ulang ke rumah tangga yang bersangkutan, jika responden tetap tidak dapat ditemukan, langkah selanjutnya adalah membuat berita acara non-response sebagai tanda bahwa upaya pengumpulan data sudah dilakukan sesuai prosedur, meskipun hasil yang diharapkan tidak tercapai.

Proses ini menunjukkan keseriusan dan komitmen petugas untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, serta upaya maksimal untuk mengatasi setiap kendala yang muncul dalam pelaksanaan survei. Dengan demikian, hasil survei yang tercapai tidak hanya menggambarkan kinerja yang tinggi, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berbasis pada data yang akurat dan representatif.

Untuk survei yang berbasis rumah tangga, ada beberapa perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan response rate dan kualitas data yang diperoleh. Beberapa langkah perbaikan yang dapat diterapkan antara lain:

1. Pendekatan yang Lebih Personal
 - Menggunakan pendekatan yang lebih personal, seperti pengingat langsung (telepon, pesan teks, atau kunjungan lapangan) bisa mendorong responden untuk mengisi survei.
 - Mitra Statistik yang Familiar
Memilih mitra pengumpul data yang sudah dikenal atau berasal dari komunitas lokal bisa mempermudah pendekatan dengan rumah tangga yang sulit dijangkau.
2. Meningkatkan Akses dan Kemudahan Pengisian
 - Waktu Pengisian yang Fleksibel

Menyesuaikan waktu pengumpulan data agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kesibukan rumah tangga. Ini bisa mencakup pengumpulan data pada akhir pekan atau setelah jam kerja.

3. Meningkatkan Penghargaan dan Insentif untuk Responden

- Pengakuan Terhadap Partisipasi

Mengucapkan terima kasih atau memberikan pengakuan secara langsung terhadap kontribusi mereka bisa mempererat hubungan dan mendorong mereka untuk berpartisipasi di masa depan.

4. Meningkatkan Kerjasama dengan Pihak Lain

- Melibatkan Tokoh Masyarakat atau Lembaga Lokal

Melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT, atau lembaga lokal yang dapat membantu dalam mengarahkan dan meyakinkan rumah tangga untuk berpartisipasi dalam survei.

Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan response rate survei berbasis rumah tangga dapat meningkat, dan data yang diperoleh menjadi lebih representatif serta berkualitas.

Response rate survei berbasis usaha di wilayah BPS Kota Palembang

BPS Kota Palembang berhasil mencatatkan response rate sebesar 99,37% dalam pemasukan dokumen survei, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Hal ini menunjukkan pencapaian yang luar biasa, meskipun masih ada satu survei, yaitu Survei Perusahaan Kehutanan, yang belum mencapai target yang diinginkan. Namun, di sisi positifnya, dua survei berhasil melebihi ekspektasi dengan response rate yang lebih dari 100%. Kedua survei tersebut adalah Survei Daya Tarik Wisata (VDTW) dan Survei Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan, yang menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Permasalahan yang ditemui pada saat pencacahan yaitu :

1. Sampai dengan awal Oktober 2024 tersisa 6 perusahaan yg masih belum memberikan dokumen survei perusahaan kehutanan
2. Sampai dengan bulan akhir Desember tersisa 2 perusahaan yang belum memberikan data industri bulan Oktober dan November 2024

3. Perusahaan Air Perusahaan Tirta Musi salah pengisian dalam pertanyaan mengenai volume bocor dalam penyaluran
4. Data mengenai aktivitas pertambangan dan penggalian di Kota Palembang khususnya periode triwulan III tahun 2024 tidak ada
5. Beberapa komoditas pabrikan mengalami perubahan berat, sehingga mempengaruhi perbandingan harga dengan bulan-bulan sebelumnya
6. Beberapa hotel terlambat memberikan data karena permasalahan intern dan pergantian pegawai mereka
7. Salah satu responden Pasar Modern tutup permanen (yaitu Transmart Carrefour)
8. Komoditas yang dicacah sangat spesifik dan cukup asing, kuesioner sulit dipahami, pelatihan petugas dari pusat sangat singkat (kurang dari 2 jam). Sehingga banyak petugas yang kesulitan mengidentifikasi spesifikasi komoditas yang harus dicacah
9. Salah satu sampel tutup yaitu Jamu Ibu Tami

Mengatasi permasalahan tersebut, BPS Kota Palembang :

1. Follow up ke PIC perusahaan terkait
2. Melakukan pengumpulan data ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi data mengenai aktivitas pertambangan dan penggalian di Kota Palembang juga tidak bisa didapatkan dan diarahkan oleh dinas tersebut untuk ke cabang dinas regional I.
3. Penyesuaian kualitas per komoditas di webentry dengan kondisi lapangan
4. Supervisi dan pendekatan kembali ke pihak hotel untuk memperoleh data
5. Penggantian sampel dengan mencari pasar modern lain yang lebih eligible sebagai sampel
6. Pendampingan intensif dari PML Survei ICP Konstruksi
7. Penggantian sampel dengan mencari kategori industri yang lain

Tindak Lanjut :

1. Petugas pendataan sudah melakukan follow up ke PIC perusahaan-perusahaan terkait, kemudian petugas bersama tim Supervisi dari BPS RI juga sudah melakukan revisit pada tanggal 04 Oktober 2024 namun masih belum ada respon dari perusahaan yang bersangkutan

2. Untuk perusahaan Agri Indomas, PT sebelumnya memang telah disepakati data masuk tiap triwulanan namun petugas lapangan bersama dengan ketua tim dan anggota tim statistik industri melakukan kunjungan ke perusahaan untuk bernegosiasi kembali supaya data bisa masuk ditiap bulannya, namun perusahaan tetap tidak bisa menyanggupi dan data tetap masuk di akhir bulan tiap triwulannya. Sehingga petugas kembali melakukan konfirmasi di awal bulan Januari 2025. dan Untuk perusahaan Pertamina, PT sebelumnya memang telah disepakati bahwasannya perusahaan di Palembang tidak bisa memberikan data, karena hanya Pertamina pusat yang bisa memberikan data, sehingga BPS RI yang melakukan pendataan, dan data di bagikan ke BPS Kota Palembang secara berjenjang melalui BPS Provinsi Sumatera Selatan. Petugas organik telah menanyakan perihal tersebut ke BPS Provinsi, namun data sampai 10 Desember belum masuk.
3. Petugas lapangan melakukan kunjungan kembali ke perusahaan untuk mengkonfirmasi ulang mengenai data volume bocor dalam penyaluran, dimana ternyata hasil dari konfirmasi diketahui bahwa perusahaan mengisi data dalam satuan persentase bukan m3. Sehingga petugas lapangan bersama dengan PIC perusahaan melakukan perbaikan data tersebut
4. Melakukan pengumpulan data ke Cabang Dinas Regional I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
5. PML melakukan pengecekan barang-barang pabrikan yang menjadi paket komoditas, jika tidak sesuai lagi dengan kualitas yang tercatat di webentry, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan kondisi lapangan terkini.
6. Tim dari BPS Kota mendatangi pihak hotel sehingga data dapat diperoleh
7. Dilakukan penggantian sampel ke Farmer's Market PTC dengan pendampingan dari PML untuk identifikasi ketersediaan komoditas yang perlu dicacah di Survei HK-1.1, HK-1.2, HK-2.1
8. PML melakukan pengawasan Survei ICP Konstruksi ke beberapa responden (50% responden), yaitu: PT Alamas, PT Bintang Selatan Agung, PT Muara Dua, Toko Listrik Sinar Selatan, CV Popular, Toko Makmur Jaya, PT Multibric Indonesia, PT Indobeton, dan CV Subur Makmur
9. Dilakukan penggantian sampel ke industri kue cahaya baru dengan melihat kesamaan kategori industri dengan skala usaha menengah besar

Gambar 30. Solusi dan tindak Lanjut Ke Perusahaan



Beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemasukan dokumen survei BPS Kota Palembang , khususnya pada survei yang masih di bawah target, antara lain:

1. Peningkatan Komunikasi dengan Responden.
Memperkuat komunikasi dengan responden melalui pengingat yang lebih rutin dan sistematis, baik melalui telepon, email, atau pesan teks. Hal ini bisa membantu mengingatkan mereka untuk mengisi dan mengirimkan survei tepat waktu.
2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kemudahan Pengisian Survei.
Menyediakan platform atau metode yang lebih mudah diakses oleh responden, seperti survei online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi atau situs web dapat mengurangi hambatan teknis.
3. Menganalisis dan Mengatasi Kendala Khusus pada Survei yang Bermasalah
Untuk survei seperti Survei Perusahaan Kehutanan yang masih di bawah target,

perlu dilakukan analisis lebih mendalam mengenai kendala spesifik yang dihadapi, apakah terkait dengan karakteristik responden atau faktor lainnya. Pendekatan yang lebih terarah untuk mengatasi masalah tersebut bisa menjadi solusi.

4. Mengoptimalkan Sumber Daya.

Menambah jumlah tenaga pengumpul data di lapangan atau memperpanjang waktu pengumpulan data bisa membantu meningkatkan response rate, terutama untuk survei yang memiliki tantangan dalam pengumpulan dokumen.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melakukan pemantauan secara berkala terhadap progres survei dan melakukan evaluasi untuk segera mengetahui permasalahan yang muncul, sehingga solusi bisa cepat diambil.

Dengan implementasi perbaikan-perbaikan ini, diharapkan response rate untuk survei yang masih di bawah target dapat meningkat, dan kinerja secara keseluruhan semakin optimal.

3.2.2. Capaian Kinerja PK Suplemen Tujuan Ketiga

Tabel 30. Capaian Kinerja PK Suplemen Tujuan Ketiga

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
3.Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Tingkat ketepatan waktu Pemerintah Daerah melakukan submit penilaian EPSS di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	100	101	101
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga					101

Indikator dari tujuan ketiga yaitu Tingkat ketepatan waktu Pemerintah Daerah melakukan submit penilaian EPSS di wilayah BPS Kabupaten/Kota. EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Hasil dari EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yang menggambarkan

tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah. Tujuan EPSS adalah:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik
- Membantu BPS menyusun strategi pembinaan data statistik

Tahapan kegiatan EPSS:

1. Penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) masing-masing instansi
2. Verifikasi dan validasi informasi oleh BPS
3. Harmonisasi hasil penilaian

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Penguatan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pemerintah, selain itu Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui penyelenggaraan statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus untuk menghasilkan data statistik berkualitas serta Pencapaian sasaran RB Nasional “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” melalui pembangunan data pemerintah untuk digunakan dalam penyusunan kebijakan berbasis data/fakta.

Tujuan dari EPSS ini adalah Mengukur capaian kinerja penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan data statistik sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, mendapatkan satu ukuran terpenuhinya prasyarat penyelenggaraan SDI dan statistik serta digunakan untuk menyusun strategi pembinaan data statistik oleh BPS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu proses dalam EPSS ini adalah penjaminan kualitas, dimana setelah Tim Penilai Intern melakukan penilaian mandiri, kemudian dilanjutkan dengan penilaian oleh Tim penilai Badan, maka hasil dari penilaian badan tersebut akan di periksa silang oleh tim penilai badan dari kabupaten/kota lain sebagai bentuk penjaminan kualitas yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi.

Berdasarkan jadwal pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024 yang disampaikan dalam acara Entry Meeting dan Sosialisasi EPSS 2024 di Sumatera Selatan, proses penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2024.

Menindaklanjuti hal tersebut BPS Kota Palembang melakukan koordinasi dengan walidata Diskominfo dan koordinator daerah Bappeda dilaksanakan pada 1 April 2024 dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri EPSS.

Gambar 31. Kegiatan Koordinasi dengan Walidata dan Bappeda



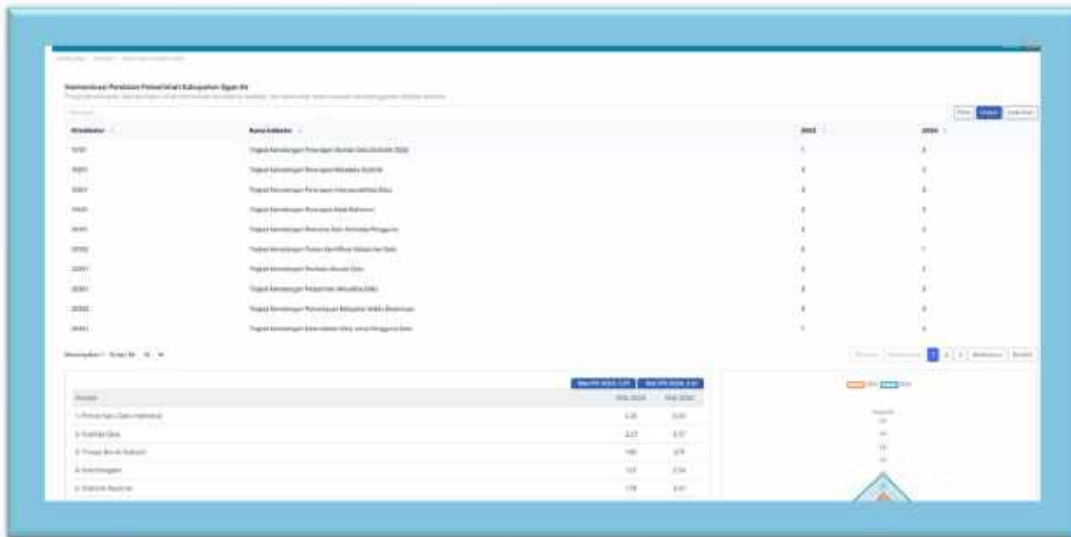
Tahapan penilaian mandiri dilakukan selama periode **April-Mei 2024** melalui aplikasi epss.web.bps.go.id dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara mandiri untuk mendapatkan akun Admin Instansi. Oleh karena itu, setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat segera membentuk Tim Penilai Internal (TPI) dan disahkan oleh pimpinan instansi masing-masing melalui SK TPI.

Sebagai kelanjutan dari rangkaian penilaian EPSS 2024, selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan penilaian melalui wawancara (interview) kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah menyelesaikan penilaian mandiri. Wawancara ini akan dilakukan baik secara daring (online) maupun luring (tatap muka), termasuk di antaranya dengan Tim Penilai Internal (TPI) dari Kabupaten Ogan Ilir.

Gambar 32. Interview EPSS dengan Tim Penilai dari Kabupaten Ogan Ilir



Gambar 33. Input Nilai IPS untuk Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir



Kegiatan harmonisasi hasil penilaian EPSS merupakan proses internal yang dilakukan oleh BPS untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian antara penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dengan bukti dukung yang telah disampaikan. Proses ini melibatkan peninjauan kembali atas penjelasan dan dokumen yang diserahkan oleh TPI selama proses penilaian. Tujuan dari harmonisasi ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang digunakan dalam penilaian EPSS telah memenuhi standar yang ditetapkan, serta untuk memastikan akurasi dan objektivitas hasil penilaian yang akan digunakan dalam evaluasi lebih lanjut. Kegiatan harmonisasi dilaksanakan dengan mekanisme kegiatan pleno. Kegiatan pleno ini bertujuan :

1. Meningkatkan objectivitas penilaian EPSS
2. Menyamakan persepsi penilaian
3. Menjelaskan setiap perubahan ekstrim yang terjadi pada tahapan penilaian.

Hasil akhir dari pleno provinsi yaitu submit penilaian mandiri dan BPS Kota Palembang memperoleh skor akhir 101 persen.

Tabel 31. Submit Penilaian Mandiri EPSS di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

No	Instansi	Tanggal Mulai Penilaian Mandiri	Tanggal Submit Penilaian Mandiri	Keterangan	Skor Awal	Delta	Skor Delta	Skor Akhir	Durasi (hari)	Pembina
201	Pemerintah Kota Palembang	30/04/2024	29/05/2024		100	2	1	101	30	BPS Kota Palembang
187	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	08/05/2024	31/05/2024		100	0	-	100	24	BPS Provinsi Sumatera Selatan

3.2.2. Capaian Kinerja PK Suplemen Tujuan Keempat

Tabel 32. Capaian Kinerja PK Suplemen Tujuan Keempat

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
4. Penguatan tata Kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					
Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan	Satker dengan Nilai Kinerja Anggaran minimal berkategori "Baik"	Satker	1	1	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat					100

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang tercantum dalam Sistem monitoring Kinerja Terpadu (SMART) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan untuk melaksanakan 2 fungsi anggaran yaitu fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.

Fungsi akuntabilitas (*proving*) bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas (*improving*) bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi pendukung dan kendala atas pelaksanaan anggaran dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan. Secara garis besar, Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 dibagi dalam beberapa tingkatan antara lain tingkat Kementerian Negara/Lembaga, tingkat unit Eselon I, dan tingkat Satuan Kerja (satker). Selain itu, perhitungannya terbagi atas Aspek Manfaat, Aspek Implementasi, dan Aspek Konteks. Nilai Kinerja Anggaran pada satuan kerja (satker) yang hasil perhitungannya tercantum pada dashboard masing-masing satker dalam aplikasi SMART merupakan perhitungan atas aspek implementasi pada tingkat satker.

Nilai Kinerja Anggaran Tingkat satuan kerja dikelompokkan ke dalam kategori

sebagai berikut:

- a. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Sangat Baik;
- b. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Baik;
- c. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) termasuk dalam kategori Cukup;
- d. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) termasuk dalam kategori Kurang; dan
- e. Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) termasuk dalam kategori Sangat Kurang,

Gambar 34. Nilai Kinerja Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2024

No.	Nama Satuan Kerja	Satuan Kerja	RP Renjana Anggaran	RP Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	BPS Kota Palembang	BPS Kota Palembang	100,00	98,72	98,72

Capaian Kinerja PK Suplemen Tujuan Keempat dengan indikator Satker dengan Nilai Kinerja Anggaran minimal berkategori "Baik" yaitu sebesar 98,72 persen. Kendala yang dihadapi oleh BPS Kota Palembang yaitu

1. Adanya rasionalisasi anggaran pada triwulan 1 sehingga mengakibatkan rencana penarikan anggaran bergeser tidak sesuai dengan rencana awal RPD Halaman III Dipa
2. Kesulitan dalam penyerapan anggaran dikarenakan setiap penyerapan anggaran diperlukan dokumen pertanggungjawaban administrasi
3. Adanya perbedaan antara realisasi anggaran yang telah disetujui dengan realisasi yang ada di lapangan, baik itu karena adanya perubahan prioritas

Solusi yang telah dilakukan oleh BPS Kota Palembang yaitu :

1. Melakukan revisi halaman III DIPA di sakti
2. Melakukan monitoring anggaran secara berkala untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana
3. Mengimplementasikan sistem laporan anggaran yang lebih cepat dan akurat untuk dapat mengambil keputusan yang tepat waktu.

Untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BPS Kota Palembang pada tahun depan, strategi yang dapat diterapkan antara lain:

- Penerapan Sistem Prioritas yang Lebih Dinamis, Sesuaikan prioritas anggaran dengan kebutuhan yang ada di lapangan, dan buat sistem yang fleksibel untuk menanggapi perubahan yang ada.
- Memberikan batas waktu agar segera melengkapi bukti dukung dalam melengkapi administrasinya
- Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern. Penerapan Pengawasan yang ketat terhadap setiap tahap pengelolaan anggaran, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Hal ini untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan anggaran negara.

Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, BPS Kota Palembang dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan meningkatkan kinerja anggaran pada tahun depan, sehingga mampu mencapai nilai kinerja anggaran yang lebih tinggi dan berkategori "Baik" atau bahkan lebih baik lagi.

3.3. Prestasi dan Inovasi Satker Tahun 2024

3.3.1. Prestasi

Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang menerima penghargaan yang prestisius dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang atas kinerja luar biasa dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan yang transparan serta akuntabel, yang menunjukkan komitmen BPS Kota Palembang dalam mendukung tata kelola pemerintahan

yang baik dan efisien di wilayah tersebut. Penghargaan tersebut berupa Penilaian Kinerja Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Terbaik Kategori Pagu Kecil. Penghargaan ini menjadi bukti nyata dedikasi dan upaya maksimal BPS dalam meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pelaporan keuangan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.



Selain penghargaan yang diterima dari pihak eksternal, BPS Kota Palembang juga memperoleh penghargaan yang prestisius dari pihak internal sebagai pengakuan atas kinerja luar biasa yang telah ditunjukkan dalam berbagai aspek operasional. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas upaya BPS Kota Palembang dalam memperbaiki proses kerja, serta meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar unit di lingkungan internal. Prestasi tersebut sebagai berikut :

1. Peringkat pertama Tim Tertanggung Statistik Industri dan PEK Tahun 2024



2. Peringkat Kedua Penyelenggara Pengolahan Data Sensus dan Survei yang CERMAT (Cepat, Efisien, Responsif, Lengkap, Akuntabel, Tepat) Tahun 2024 di Lingkungan BPS Propinsi Sumatera Selatan



3. Peringkat Pertama The Top Priceless Team in 2024 di Lingkungan BPS Propinsi Sumatera Selatan



4. Peringkat Ketiga Tim Terpantas (Tercepat dan Berkualitas) Statistik Distribusi Tahun 2024 di Lingkungan BPS Provinsi Sumatera Selatan



5. Peringkat Kedua Satuan Kerja Penyelenggara Susenas, Seruti dan Statistik Politik dan Keamanan Terbaik Tahun 2024 di Lingkungan BPS Provinsi Sumatera Selatan



6. Peringkat Kedua Satuan Kerja dengan Data dan Fenomena Penghitungan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Terlengkap Tahun 2024 di Lingkungan BPS Provinsi Sumatera Selatan



7. Penghargaan atas prestasinya sebagai Satuan Kerja Tingkat Kabupaten/Kota dalam program Desa Cantik Statistik (Desa Cantik) Tahun 2024



3.3.2. Inovasi

BPS Kota Palembang telah menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemajuan dan transformasi melalui berbagai inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efisiensi operasional. Inovasi utama yang telah diterapkan di BPS Kota Palembang, sebagai berikut :

1. **Sistem Administrasi Terpadu (SATU)**

Sistem Administrasi Terpadu (SATU) yang dimiliki oleh BPS Kota Palembang adalah platform digital inovatif yang dirancang untuk mempermudah akses informasi serta menyederhanakan administrasi di lingkungan BPS Kota Palembang. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan Subbagian Umum, guna meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam pengelolaan administrasi. Beberapa fitur yang tersedia dalam Sistem SATU antara lain:

- RKAKL/POK, Pengguna dapat mengakses dan memantau data terkait rencana anggaran dan program yang diatur dalam RKAKL/POK.
- LRA/RPD (Laporan Realisasi Anggaran dan Rencana Penggunaan Dana): Sistem ini memungkinkan pengelolaan dan pelaporan anggaran serta realisasi penggunaan dana yang lebih terstruktur dan efisien.
- SPI (Sistem Pengendalian Internal), Setiap pegawai di Subbagian Umum dapat mengunggah seluruh data terkait SPI untuk memastikan bahwa proses administrasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Matrik DL (Daftar Laporan), Pegawai dapat memonitor dan mengelola berbagai laporan yang diperlukan dalam aktivitas administrasi di BPS Kota Palembang.
- Matriks Beban Kerja, Sistem ini juga memungkinkan pengelolaan dan pemantauan beban kerja setiap pegawai untuk memastikan efisiensi dalam pembagian tugas.
- Dokumentasi Kegiatan, Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS Kota Palembang dapat didokumentasikan dan diakses dalam aplikasi ini untuk kebutuhan arsip dan evaluasi.

- Nota Dinas, Sistem ini mempermudah pembuatan, pengelolaan, dan pelacakan nota dinas yang diterbitkan di lingkungan BPS.
- Nomor Surat BOS, Pengelolaan nomor surat untuk kegiatan yang terkait dengan Bos (Bantuan Operasional Sekolah) dapat dilakukan secara terintegrasi dalam sistem ini.
- Nomor SK (Surat Keputusan), Setiap Surat Keputusan yang dikeluarkan dalam organisasi dapat didokumentasikan dan dikelola dengan lebih efisien melalui SATU.
- Kartu Kendali Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Aplikasi ini mempermudah pengelolaan dan pemantauan pemeliharaan kendaraan dinas, memastikan bahwa kendaraan tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan.
- Tautan untuk Aplikasi Terkait, SATU juga menyediakan tautan langsung untuk membuka aplikasi lain yang digunakan dalam pengelolaan data, seperti Monev Bappenas, Smart, Si Monev BPS, dan MUSI, yang memudahkan integrasi dan akses antar platform.
- Form Rencana Aksi, Sistem ini juga menyediakan formulir rencana aksi yang berisi semua pendukung dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.
- Pengajuan WFH (Work From Home), Pegawai dapat mengajukan izin untuk bekerja dari rumah secara mudah melalui aplikasi ini.
- Whistle Blower, Fitur ini memungkinkan pegawai untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan atau pelanggaran yang terjadi dalam lingkungan BPS dengan cara yang aman dan terjamin kerahasiaannya.
- Konsultasi Statistik, Aplikasi ini juga menyediakan layanan konsultasi terkait statistik bagi pegawai dan pihak terkait untuk memastikan pemahaman yang tepat dalam penggunaan data dan informasi statistik.

kegiatan apa yang diikuti, siapa penyelenggaranya, waktu pelaksanaan, dan juga diberikan link untuk upload dokumen sertifikat yang diperoleh

Gambar 36. Manajemen Sertifikat Pegawai

No	Nama	Jabat	Tanggal	Status	Jenis	Detail Sertifikat	Detail Sertifikat	Detail Sertifikat	Detail Sertifikat	Detail Sertifikat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3. Pojok Statistik

Pojok Statistik di Universitas Bina Darma Palembang merupakan salah satu inisiatif kolaboratif antara BPS Kota Palembang dan universitas tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta aksesibilitas informasi statistik di kalangan mahasiswa dan civitas akademika. Kegiatan pojok statistik dilaksanakan di Universitas Bina Dharma Palembang dengan MOU Nomor : 121/Moumniv-BDN111/2024 tanggal 22 Agustus 2024.

Pojok Statistik ini berfungsi sebagai pusat informasi yang menyediakan berbagai publikasi, laporan, dan data statistik terbaru yang relevan dengan berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan demografi, yang dihasilkan oleh BPS Kota Palembang. Dalam upaya memperkenalkan Pojok Statistik kepada masyarakat luas, Universitas Bina Darma telah meluncurkan akun Instagram khusus untuk Pojok Statistik. Melalui platform ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait berbagai data statistik yang tersedia, serta mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya statistik dalam pembangunan dan penelitian.

Gambar 37. Instagram Pojok Statistik Universitas Bina Dharma Palembang



Melalui Pojok Statistik di Universitas Bina Dharma, mahasiswa dapat mengakses data dan informasi yang berguna untuk penelitian, tugas akademik, atau sekadar memperdalam pemahaman mereka tentang pentingnya data statistik dalam konteks pembangunan daerah. Pojok Statistik juga berfungsi sebagai sarana edukasi untuk mengenalkan lebih jauh konsep-konsep statistik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tempat ini menjadi ajang bagi civitas akademika untuk berinteraksi langsung dengan data yang diperoleh dari BPS dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana statistik digunakan untuk mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan yang berbasis data.

Gambar 35. Pojok Statistik di Bina Dharma Palembang



3.4. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024

3.4.1. Pagu dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Sasaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, serta sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk satu periode tertentu. Pada tahun 2024, terdapat perbedaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pagu anggaran kini mencantumkan blokir dalam anggaran yang disediakan.

Realisasi penggunaan anggaran (tanpa blokir) BPS Kota Palembang tahun 2024 tercatat mencapai 99,36 persen sebelum dikurangi pengembalian belanja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Lainnya BPS menyerap anggaran sebesar 99,46 persen dari total pagu yang dialokasikan untuk program ini.
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik menyerap anggaran sebesar 99,00 persen dari total anggaran yang disediakan untuk program ini.

Angka ini mengalami penurunan sedikit dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, yang tercatat sebesar 99,49 persen. Meskipun ada penurunan, tingkat pencapaian tersebut tetap menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien dan baik. Realisasi ini sudah melebihi target realisasi anggaran tahun 2024 yang ditetapkan yaitu sebesar 98 persen.

Adapun realisasi penggunaan anggaran BPS Kota Palembang selama Tahun 2024 dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut:

3.4.2. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Program dan Sasaran

Tabel 32. Pagu dan Realisasi Anggaran (tanpa blokir) BPS Menurut Program TA 2024

Program	Pagu 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi /Pagu (%)	Kontribusi thd Realisasi Total (%)
(1)	(2)			(4)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	7.710.365.000	7.668.861.625	99,46	77,72
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	2.220.857.000	2.198.637.972	99,00	22,28
Total	9.931.222.000	9.867.499.597	99,36	100

Sumbangan terbesar anggaran berasal dari Program DMPTTL dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.710.365.000,- dan realisasi Rp. 7.668.861.625,-. Kontribusinya terhadap realisasi total sebesar 77,72 persen. Sedangkan program PPIS memberikan kontribusi terhadap realisasi anggaran sebesar 22,28 persen, dengan jumlah Pagu anggaran sebesar Rp. 2.220.857.000,- dan realisasi Rp. 2.198.637.972,-. Pada awal tahun 2024 BPS Kota Palembang memperoleh anggaran sebesar Rp. 10.634.233.000,-. Selama perjalanan waktu

anggaran tersebut direvisi sehingga pada akhir Desember 2024 anggaran BPS Kota Palembang menjadi Rp. 9.931.222.000,-. Terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 703.011.000,-. Revisi DIPA yang telah dilaksanakan oleh BPS Kota Palembang sebanyak 12 kali revisi yaitu sebagai berikut :

1. Revisi pertama dilakukan berdasarkan surat dari Kepala BPS RI Nomor : B-7/02000/PR.440/2024 tanggal 8 Januari 2024, pengesahan revisi pada tanggal 18 Januari 2024, dilakukan dalam rangka menindak lanjuti surat Menteri Keuangan Nomor : S-1082/MK.02/2023 Tanggal 29 Desember 2023 Perihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian Lembaga TA 2024. dengan hal seluruh satker melakukan Automatic Adjustment terhadap POK sesuai dengan petunjuk. Pagu tetap Rp10.634.233.000.
2. Revisi kedua dilakukan berdasarkan surat dari Kepala BPS RI Nomor : B-1469/02000/PR.400/12/2024 tanggal 28 Desember 2024, pengesahan revisi pada tanggal 5 April 2024, dilakukan dalam rangka menindak lanjuti surat Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : B-425/01000/PR.460/12/2023 Tanggal 1 Desember 2023 Perihal Rasionalisasi Anggaran TA 2024, dengan hal disampaikan bahwa BPS harus melakukan penyesuaian anggaran dalam rangka pemenuhan pelaksanaan kegiatan teknis dan sampel pada Daerah Otonom Baru (OTB), serta anggaran kegiatan lainnya. Pagu semula Rp10.634.233.000 menjadi Rp10.690.331.000.
3. Revisi ketiga dilakukan berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BPS RI Nomor : B-151/02000/PR.440/2024 tanggal 8 Maret 2024, pengesahan revisi pada tanggal 23 April 2024, dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan pada Program Dukungan Manajemen (Dukman) dan Penyediaan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Tahun Anggaran 2024. Pagu tetap Rp10.690.331.000.
4. Revisi keempat dilakukan oleh BPS Kota Palembang dengan No : B-200/16710/PR.450/05/2024 tanggal 29 Mei 2022, pengesahan revisi pada tanggal 31 Mei 2024. Revisi dilakukan dalam rangka revisi administrasi dan revisi POK terkait dengan perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA. Pagu tetap Rp10.690.331.000.
5. Revisi kelima dilakukan berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BPS RI Nomor : B-455/02000/PR.440/2024 tanggal 28 Juni 2024, pengesahan revisi pada tanggal 8 Juli 2024, dilakukan menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran BPS TA 2024, perlu dilakukan Langkah-langkah relaksasi anggaran rasionalisasi. Pagu semula Rp10.690.331.000 menjadi Rp10.559.805.000.

6. Revisi keenam dilakukan berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BPS RI Nomor : B-532/02000/PR.440/2024 tanggal 26 Juli 2024, pengesahaan revisi pada tanggal 15 Agustus 2024, dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan Badan Pusat Statistik TA 2024. Pagu semula Rp10.559.805.000 menjadi Rp10.605.633.000.
7. Revisi ketujuh dilakukan berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BPS RI Nomor : B-699/02000/PR.440/2024 tanggal 4 September 2024, pengesahaan revisi pada tanggal 18 Septembers 2024, dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan Badan Pusat Statistik TA 2024. Pagu semula Rp10.605.633.000 menjadi Rp10.524.393.000.
8. Revisi kedelapan dilakukan dilakukan oleh BPS Kota Palembang dengan Nomor : B-347/16710/PR.450/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, pengesahan revisi pada tanggal 16 Oktober 2024. Revisi dilakukan dalam rangka revisi administrasi, revisi POK terkait dengan perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA dan revisi antar satker. Pagu semula Rp10.524.393.000 menjadi Rp10.521.755.000.
9. Revisi kesembilan dilakukan berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BPS RI Nomor : B-860/02000/PR.450/2024 tanggal 18 Oktober 2024, pengesahaan revisi pada tanggal 5 November 2024, dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan Badan Pusat Statistik TA 2024. Pagu semula Rp10.521.755.000 menjadi Rp10.572.727.000.
10. Revisi kesepuluh dilakukan berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BPS RI Nomor : B-939/02000/PR.400/2024 tanggal 13 November 2024, pengesahaan revisi pada tanggal 18 November 2024, dilakukan dalam rangka penghematan anggaran belanja perjalanan dinas kementerian/lembaga TA 2024. Pagu tetap Rp10.572.727.000.
11. Revisi kesebelas dilakukan dilakukan oleh BPS Kota Palembang dengan Nomor : B-528/16710/PR.450/11/2024 tanggal 19 November 2024, pengesahan revisi pada tanggal 19 November 2024. Revisi dilakukan dalam rangka revisi administrasi dan revisi POK. Pagu tetap Rp10.572.727.000.
12. Revisi kedua belas dilakukan dilakukan oleh BPS Kota Palembang dengan Nomor : B-583/16710/PR.450/12/2024 tanggal 19 Desember 2024, pengesahan revisi pada tanggal 19 Desember 2024. Revisi dilakukan dalam rangka revisi administrasi dan revisi POK. Pagu tetap Rp10.572.727.000.

Tabel 34. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran TA 2024

Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	Capaian Kinerja (%)
1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	2.177.931.000	2.155.766.302	98,98	107,14
2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	21.000.000	20.945.670	99,74	117,69
3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	21.926.000	21.926.000	100,00	120
4. SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	7.710.365.000	7.668.861.625	99,46	99,43
Total	9.931.222.000	9.867.499.597	99,36	109,79

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran secara keseluruhan menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan rata-rata penyerapan anggaran mencapai 99,36 persen. Sasaran penguatan statistik sektoral K/L/D/I mencatatkan penyerapan anggaran tertinggi, yaitu 100 persen, dengan capaian kinerja yang luar biasa sebesar 120 persen. Ini mencerminkan hasil yang optimal dari kegiatan tersebut. Namun, meskipun hasil pembinaan statistik yang dilakukan memberikan dampak yang signifikan bagi BPS Kota Palembang, terdapat penurunan jumlah OPD yang menerima pembinaan statistik, yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar dampaknya tetap maksimal.

Penyerapan anggaran terendah tercatat pada sasaran peningkatan pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan angka penyerapan 98,98 persen. Meskipun demikian, hasil kinerja di sasaran ini tetap menunjukkan capaian yang tinggi. Kendala yang terjadi, seperti keterlambatan pengajuan SPJ oleh pihak terkait menjelang akhir tahun, mempengaruhi efisiensi penyerapan anggaran. Untuk itu, perbaikan dalam pengelolaan administrasi dan pengajuan SPJ diharapkan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran di masa mendatang.

3.4.3. Upaya Efisiensi Anggaran (penggunaan sumber daya) dan Nilai Efisiensi Anggaran

Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah–rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran BPS Kota Palembang harus berusaha melalui berbagai upaya, seperti penyempurnaan *cascading* kinerja hingga level individu; penyelesaian target kinerja tingkat pemerintah daerah melalui kolaborasi dengan seluruh OPD atau *cross-cutting* program; monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja untuk mendorong pencapaian kinerja.

BPS Kota Palembang telah berupaya melakukan efisiensi penggunaan anggaran dengan cara seminimal mungkin dalam penggunaan anggaran untuk memperoleh hasil yang maksimal. Efisiensi yang telah dilaksanakan BPS Kota Palembang sesuai dengan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada *simonev*. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja baik tujuan maupun sasaran yang masing-masing mencapai 109,79 persen, realisasi anggaran yang digunakan BPS Kota Palembang sebesar 93 persen.

Tabel 35 Capaian Kinerja, Realisasi dan Nilai Efisiensi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Tujuan/Sasaran	Output	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi Anggaran Kumulatif (Rp)	Realisasi Anggaran Kumulatif (%)	Nilai Efisiensi Sasaran
F1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar		107,14	2,807,742,000	2,155,766,302	77	100
L.1-Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas						
	2896.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		600,000	500,000	83	
	2898.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		34,731,000	27,692,000	80	
	2898.QMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		1,350,000	1,300,000	96	
	2899.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		58,705,000	58,650,000	100	
	2900.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		2,299,000	2,276,000	99	
	2902.QMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		74,278,000	72,036,000	97	
	2902.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		69,986,000	34,481,000	49	
	2903.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		456,851,000	401,825,558	88	
	2904.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		291,760,000	173,024,843	59	
	2905.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		202,168,000	201,556,881	100	
	2906.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		462,717,000	462,359,000	100	
	2907.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		91,662,000	89,754,099	98	
	2908.QMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		37,007,000	32,240,000	87	
	2908.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		400,691,000	349,074,015	87	
	2909.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		4,260,000	2,920,000	69	
	2910.QMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		588,634,000	243,146,906	41	
	2910.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		30,043,000	2,930,000	10	
F2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN		117,69	21,870,000	20,945,670	96	96,56
L.1. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN						
	2897.BMA DATA DAN INFORMASI PUBLIK		21,870,000	20,945,670	96	
F3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN		120	22,500,000	21,926,000	97	96,98
L.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I						
	2897.BDB FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA		22,500,000	21,926,000	97	
F4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi		99,43	7,720,615,000	7,668,861,625	99	50,26
L.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan						
	Seluruh Program Dukungan Manajemen		7,720,615,000	7,668,861,625	99	
Total		109,79	10.572.727.000	9.867.499.597	93	70,58

Tabel 35 menunjukkan bahwa dari seluruh tujuan dan sasaran, terdapat Upaya efisiensi yang telah dilaksanakan BPS Kotya Palembang dengan mengoptimalkan output dari anggaran yang tersedia (pagu anggaran yang digunakan adalah pagu yang termasuk blokir). Efisiensi terbesar berasal dari Tujuan pertama yaitu sebesar 100 persen dan efisiensi terkecil berasal dari Tujuan keempat sebesar 50,26 persen.

Rasionalisasi Anggaran Tahun 2024 merupakan proses peninjauan dan pengurangan anggaran untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah atau lembaga-lembaga negara lebih efisien dan sesuai dengan prioritas yang ada. Dalam konteks ini, rasionalisasi

anggaran bertujuan untuk mengalokasikan dana yang terbatas secara lebih tepat guna, agar tercapai hasil yang optimal dan meminimalkan pemborosan. BPS Kota Palembang menilai ulang program dan kegiatan yang dianggap kurang mendesak atau tidak memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan utama. Kegiatan yang dianggap tidak efisien atau tidak relevan dengan prioritas bisa mendapatkan pengurangan anggaran. Penggunaan anggaran untuk kegiatan yang prioritas akan lebih difokuskan. Penghematan yang telah dilaksanakan oleh BPS Kota Palembang yaitu :

Tabel 36. Potensi Penghematan Tahun 2024

Kode Akun	Akun	Pagu Semula (Rp)	Pagu Menjadi (Rp)	Potensi Penghematan (Rp)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	252.238.000	205.160.000	47.078.000
521211	Belanja Bahan	10.117.000	8.790.000	1.327.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38.508.000	3.542.000	34.966.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	35.750.000	34.916.000	834.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	72.000.000	62.000.000	10.000.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.164.000	6.908.000	3.256.000
522151	Belanja Jasa Profesi	2.775.000	125.000	2.650.000
Total		421.552.000	321.441.000	100.111.000

Selain itu BPS Kota Palembang akan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang sudah ada, baik itu sumber daya manusia, infrastruktur, maupun teknologi. Hal ini dilakukan agar alokasi anggaran lebih efisien. Seiring dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi anggaran, pelaksanaan pelatihan yang sebelumnya sepenuhnya dilakukan secara tatap muka di hotel, kini telah beralih ke *format hybrid*. Sebagian besar sesi pelatihan kini dilaksanakan secara *online* melalui *Zoom Meeting*, yang memungkinkan peserta untuk mengikuti pelatihan dari lokasi masing-masing tanpa perlu bepergian. Namun, untuk sesi tertentu yang membutuhkan interaksi langsung atau kegiatan praktis, pelatihan tetap dilaksanakan secara *offline* di hotel selama 1 hingga 2 hari. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, sambil tetap memastikan kualitas pelatihan yang maksimal.

Dalam rangka efisiensi anggaran, kertas bekas yang telah digunakan oleh pegawai akan dimanfaatkan kembali untuk keperluan internal, seperti pembuatan konsep atau dokumen-dokumen yang tidak memerlukan pencetakan formal. Dengan langkah ini, tidak

hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga turut berkontribusi pada upaya pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, BPS Kota Palembang telah memasang himbauan yang mengajak seluruh pegawai untuk lebih hemat energi dan air. Beberapa himbauan yang dipasang adalah sebagai berikut:

- **"Ayo... hemat energi, matikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan. Kalau bukan kita, siapa lagi?"**
- **"Gunakan air secukupnya dan seperlunya saja."**

Himbauan ini bertujuan untuk memotivasi pegawai agar lebih sadar akan pentingnya menghemat energi dan air, dengan cara mematikan lampu, laptop, komputer, printer, dispenser, dan mesin penghancur kertas setiap kali selesai bekerja.

Gambar 39. Himbauan Hemat Air dan Listrik



Di era digital ini, BPS Kota Palembang telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mendukung prinsip paperless atau tanpa kertas. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, beberapa aplikasi yang telah diterapkan antara lain Musi, Satu (Sistem Administrasi Terpadu) , Srikandi, Simket dan KIPPAp. Aplikasi-aplikasi ini memungkinkan pegawai untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan menjalankan tugas-tugas administratif secara lebih efisien tanpa perlu mencetak dokumen. Selain itu penerbitan publikasi dan laporan dilakukan dalam bentuk softfile. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga secara signifikan mengurangi penggunaan kertas dan tinta, sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

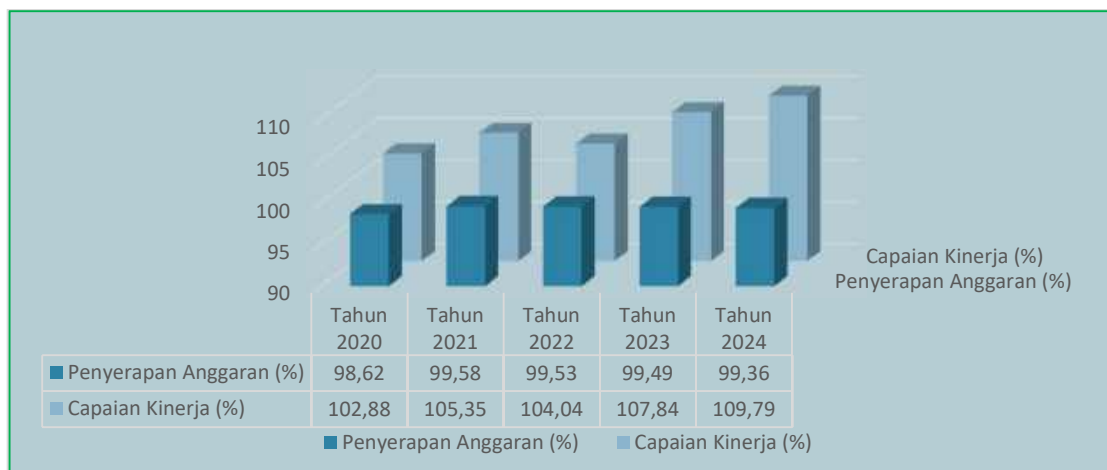
Dalam rangka efisiensi anggaran dan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal, beberapa kebijakan dan pengaturan anggaran diambil sebagai langkah strategis, antara lain:

1. Penghematan akun perjalanan dinas sebesar 50 persen dari sisa pagu anggaran yang dimulai sejak November 2024 hingga 31 Desember 2024.
2. Harga satuan perlengkapan ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- per pack.
3. Pelatihan, pengadaan paket meeting dan transport lokal tidak semaksimal SBM 2024

Tabel 37. Efisiensi Anggaran BPS Kota Palembang

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Standar Biaya Masukan (Rp)	Efisiensi (RP)
1	Pelatihan Podes (full Day)	330.000	455.000	125.000
2	Pelatihan petugas survei harga produsen (full day)	330.000	455.000	125.000
3	Pelatihan Sakernas Februari (full day)	390.000	455.000	65.000
4	Pelatihan Susenas (fullboard)	490.000	745.000	255.000
5	Pelatihan Sakenas Agustus (fullboard)	490.000	745.000	255.000
6	Pengadaan Paket Meeting Pembinaan Statistik Sektoral (half day)	222.000	290.000	68.000
7	Transport Lokal	100.000	170.000	70.000

Gambar 40. Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Renstra 2020-2024



Berdasarkan gambar 40. dapat di analisis mengenai hubungan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran BPS Kota Palembang selama periode Renstra 2020-2024. Secara umum, ada beberapa poin penting yang dapat diamati yaitu pada tahun 2020, meskipun

anggaran yang digunakan tergolong kecil, capaian kinerja BPS Kota Palembang tercatat mencapai 102,88%. Capaian ini dianggap masih dapat ditolerir, mengingat tahun tersebut merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang tentunya mungkin ada tantangan atau pembelajaran awal. Pada tahun 2024, BPS Kota Palembang berhasil mencapai capaian kinerja tertinggi, yakni 109,79%, meskipun realisasi anggarannya lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023). Ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran meningkat, dan hasil kinerja yang lebih baik dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal. Pencapaian kinerja yang lebih baik dengan anggaran yang lebih kecil di tahun 2024 mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti perbaikan dalam perencanaan, implementasi program yang lebih fokus, atau penggunaan teknologi yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, ini menggambarkan sebuah tren positif di mana BPS Kota Palembang dapat meningkatkan kinerjanya seiring dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Analisis ini menunjukkan pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat dan adaptasi terhadap strategi yang lebih baik untuk mencapai hasil yang optimal.



BAB IV. PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Laporan kinerja tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menjadi dasar dalam penilaian dan evaluasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Hasil dari evaluasi ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan teknis untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Dalam upaya mencapai kinerja optimal, BPS Kota Palembang menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Untuk itu, BPS Kota Palembang bersinergi dengan Tim Evaluasi SAKIP guna mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, melalui rapat evaluasi yang dihadiri oleh Kepala BPS Kota Palembang, guna memastikan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Palembang menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 109,79 persen. Bahkan, tiga tujuan utama berhasil melampaui target yang ditetapkan, yaitu:

1. Tujuan pertama: "Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan," dengan sasaran strategis "Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas," mencapai 107,14 persen.
2. Tujuan kedua: "Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN," dengan sasaran strategis yang sama, tercapai dengan hasil 117,69 persen.
3. Tujuan ketiga: "Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN," dengan sasaran strategis "Penguatan statistik sektoral K/L/D/I," berhasil mencapai 120,00 persen.

Keberhasilan ini mencerminkan dedikasi dan komitmen BPS Kota Palembang dalam mencapai target yang telah ditetapkan, serta menunjukkan pentingnya kerjasama yang

solid dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

4.2. Tindak Lanjut

Dalam pencapaian kinerja, masih terdapat indikator yang belum mencapai target Perjanjian Kinerja. BPS Kota Palembang menyadari perlunya langkah-langkah strategis untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja yang telah dicapai. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan pencapaian yang optimal dan memperkuat implementasi program di masa depan, BPS Kota Palembang akan mengambil beberapa langkah strategis berikut:

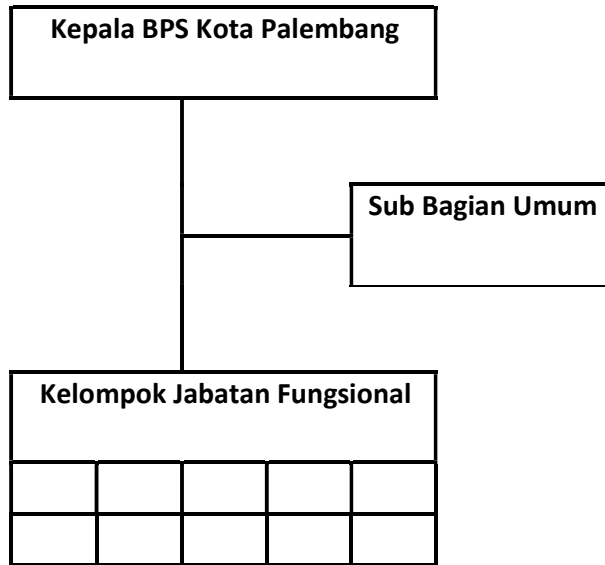
1. Fokus pada Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Dokumentasi. Meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan kinerja serta memperbaiki proses pengumpulan dan verifikasi data akan berkontribusi pada peningkatan skor SAKIP di masa depan.
2. Peningkatan Kapasitas SDM. Terus memberikan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar mereka dapat bekerja lebih efektif dan efisien sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Pemantauan dan Evaluasi yang Lebih Ketat. Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian kinerja untuk memastikan tidak ada hambatan yang menghalangi pencapaian target.
4. Tetap meningkatkan kolaborasi dengan instansi atau lembaga lain untuk memastikan bahwa data yang disediakan oleh BPS digunakan dalam perencanaan Pembangunan, yaitu aktif mengikuti berbagai rapat atau forum yang berfokus pada penyelarasan data dan kebijakan pembangunan, seperti Rapat Satu Data Indonesia, pertemuan terkait SDG's (Sustainable Development Goals), serta pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
5. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan waktu dan proses kerja, dengan memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

6. Menawarkan Kegiatan-Kegiatan Statistik Sektoral ke Setiap OPD untuk dibuatkan Rekomendasi
7. Untuk pembinaan statistik tahun 2025 , mengidentifikasi OPD mana saja yang dapat diberikan pembinaan statistik
8. Membuat mekanisme pengumpulan umpan balik (feedback) dari pengguna layanan untuk mengetahui kepuasan mereka dan area yang perlu perbaikan
9. Mengembangkan strategi meningkatkan dan memperluas pelayanan konsultasi dengan cara office to office
10. Penambahan sarana dan prasarana ruang pelayanan PST untuk kebutuhan PEKPPP perlu ditingkatkan demi kenyamanan pengguna.

Dengan melaksanakan strategi-strategi tersebut, diharapkan BPS Kota Palembang dapat terus meningkatkan kinerja dan efektivitasnya dalam memberikan layanan statistik yang berkualitas, responsif, dan relevan, serta menciptakan dampak positif bagi perencanaan pembangunan daerah dan kepuasan publik.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi BPS Kota Palembang Tahun 2024



Lampiran 2.Reviu Renstra BPS Kota Palembang 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan							
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan nasional (%)	58,28	75,00	100	100	100	Seksi Sosial, Produksi, Distribusi, dan NNAS, Seksi IPDS
		Persentase publikasi statistic yang menerapkan standard akurasi			100	100	100	Seksi Sosial, Produksi, Distribusi, dan NNAS, Seksi IPDS
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik			41	50	50	Fungsi IPDS
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar			76	76	76	Fungsi IPDS
3.	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)			92	92	92	Seksi Sosial, Produksi, Distribusi, dan NNAS, Seksi IPDS
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
	SDM Statistik yang Unggul dan Berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan	Hasil Penilaian implementasi SAKIP	69	70	70	70	71	Subbagian Umum
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana Pelayanan BPS Propinsi	80	85	100	100	100	Subbagian Umum

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja(PK) 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudhistira Arya Noegraha, S.Si, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Moh Wahyu Yulianto S.Si., SST, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Moh Wahyu Yulianto S.Si., SST, M.Si
NIP. 19760731 199712 1 001

Palembang, 30 Januari 2024

Pihak Pertama

Yudhistira Arya Noegraha, S.Si, M.Si
NIP. 197707181999011001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG**

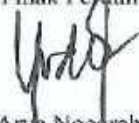
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	100
Tujuan 2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	100
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	92
Tujuan 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	100
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	75
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	100

Program	Anggaran
1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 2.999.889.000,-
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	Rp. 7.634.344.000,-
Jumlah	Rp. 10.634.233.000,-

Pihak Kedua



Moh Wahyu Yulianto S.Si., SST, M.Si
NIP. 19760731 199712 1 001

Palembang, 30 Januari 2024
Pihak Pertama

Yudhistira Arya Noegraha, S.Si, M.Si
NIP. 19770718199011001

**PERJANJIAN KINERJA SUPLEMEN TAHUN 2024
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Response rate survei berbasis rumah tangga di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	96
	Response rate survei berbasis usaha di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	80
Tujuan 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Tingkat ketepatan waktu Pemerintah Daerah melakukan submit penilaian EPSS di wilayah BPS Kabupaten/Kota	Persen	100
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Satker dengan Nilai Kinerja Anggaran minimal berkategori "Baik"	Satker	1

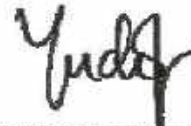
Pihak Kedua



Moh Wahyu Yulianto S.Si., SST, M.Si
NIP. 19760731 199712 1 001

Palembang, 30 Januari 2024

Pihak Pertama



Yudhistira Arya Noegraha, S.Si, M.Si
NIP. 197707181999011001

Lampiran 4 . Pengukuran Capaian Kinerja BPS Kota Palembang 2024

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	PK								Capaian Kinerja							
		Target				Realisasi				Kumulatif				Terhadap target setahun			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	TW IV	
PK dan IKU																	
T1	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar Pembangunan																
1.1.	Meningkatnya Pemanfaatan data statistic yang berkualitas																
	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan Evaluasi Pembangunan nasional	Persen	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan Evaluasi Pembangunan nasional	Persen	14,29	42,86	57,14	100	14,29	42,86	57,14	114,29	100	100	100	14,29	42,86	57,14	114,29
T2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN																
2.1.	Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN																
	Persentase K/L/D/I yang Melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	0	46,15	76,92	100	0	107,69	107,69	115,38	0	120	120	0	107,69	107,69	115,38
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sectoral dan khusus sesuai standar	Persen	0	0	0	92,31	0	115,38	115,38	115,38	0	0	0	0	120	120	120
T3	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN																
3.1	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I																
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	100	100	100	100	167,74	167,74	167,74	167,74	120	120	120	120	120	120	120
T4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi																
4.1	SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan																
	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Point	0	0	0	75	0	0	0	74,15	0	0	0	0	0	0	98,87
4.2	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana Pelayanan BPS																
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana Pelayanan BPS	Persen	00	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100	0	0	100	100

Lampiran 5. Daftar Pegawai BPS Kota Palembang

No	Nama	NIP	Jabatan	Pendidikan
1	Yudhistira Arya Noegraha, M.Si	196909151992111001	Kepala	S2
2	Aharmisa Rahmatullah S.ST,	198806302009121003	Kasubbag Umum	S2
3	Drs. Timbul Parulian Silitonga	196509161992021001	Statistisi Ahli Madya	S2
4	A. Ferry Merlia Saputra SE,	198402162005021001	Statistisi Ahli Muda	S2
5	Febrina Susanti SE, M.Ec.Dev.	198702112006042001	Statistisi Ahli Muda	S2
6	Renny Veronica M.Si.	198109182003122002	Statistisi Ahli Muda	S2
7	John Hery Pohan SST, M.M.	198103102003121007	Statistisi Ahli Muda	S2
8	Marwan SE, MM	197403062003121004	Statistisi Ahli Muda	S2
9	Dino Syaputra SE, M.Si	198202212006041002	Statistisi Ahli Muda	S2
10	M. Zamrisal SE, M.M	197403252002121002	Statistisi Ahli Muda	S2
11	Desi Martuti SE	197803032005022001	Pranata SDM Aparatur Mahir	S1
12	Dina Renita SST	198606102009022005	Statistisi Ahli Muda	S1
13	Budi Supriadi S.Kom.	198109092011011011	Pranata Komputer Ahli Muda	S1
14	Litarani S.E., M.Si	198509162011012025	Statistisi Ahli Muda	S2
15	Ririn Gustiyanti SE, M.P.	198108242007012001	Statistisi Ahli Pertama	S2
16	Misdaryati SE, M.P.	198612112010032002	Statistisi Ahli Pertama	S2
17	Riza Dwi Septianty S.Si.	198309022011012011	Statistisi Ahli Pertama	S1
18	Rahmat Kartolo S.Sos., M.M.	197004032005021001	Statistisi Ahli Pertama	S2
19	Atika Putri Syatira S.Tr.Stat.	199907012022012004	Statistisi Ahli Pertama	D-IV
20	Syifa Rahmawati Hakim	199905232022012001	Statistisi Ahli Pertama	D-IV
21	Yunita Nurmasari S.Tr.Stat.	199806202022012002	Pranata Komputer Ahli	D-IV
22	Amrizal S.Sos, M.M.	197103141993121001	Pranata Komputer Ahli Muda	S2
23	Era Ladyna SST., M.CIO.	198405212007012005	Statistisi Ahli Muda	S2
24	Eviyana Atmanegara SST,	198602222008012003	Pelaksana	S2
25	Novita S.Si., M.P.	198505102011012018	Statistisi Ahli Muda	S2
26	Rorie Sepsilia SE	197909142003122005	Statistisi Ahli Pertama	S1
27	Fahrul Rozi SE	197003311991011001	Statistisi Ahli Muda	S1
28	Rossi SST, MM	197406241993122001	Statistisi Ahli Pertama	S2
29	Hendry Dafiaga SE	198403112007011001	Statistisi Mahir	S1
30	Fandi Akbar S.E.	198706042008011001	Statistisi Ahli Pertama	S1
31	Yogi Afriady SE	198904092011011005	Pranata Komputer Ahli	S1
32	Reni Juwita SST, M.M.	199312032016022001	Pelaksana	S2
33	Agung Prianata S.M.	198808262008011002	Pelaksana	S1
34	Raison	197506292006041010	Pelaksana	SMA
35	Hanan Mari S.E.	198103142007011001	Statistisi Ahli Pertama	S1
36	Fredyansyah	198503232007011003	Pelaksana	SMA
37	Yuwaharni	198504212005022001	Pelaksana	SMA
38	Intan Ayu Jonnedi A.Md.Kb.N.	199912192022012001	Pranata Keuangan APBN	D-III
39	Ety Mardiah A.Md	198111192011012009	Pranata Keuangan APBN	D-III
40	Abe Ratih Amdarsari SE	198611112008012003	Pelaksana	S1
41	Fivi Yulianti	198107132005022002	Pelaksana	SMA

Lampiran 6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan BPS Kota Palembang Tahun 2024

No	Kegiatan	Jadwal Kegiatan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Tim Bagian Umum													
1	Rivisi DIPA												
2	Revisi POK												
3	Penyusunan LAKIN												
4	Capaian Kinerja Triwulanan												
5	Penyusunan Laporan Keuangan												
6	Penyusunan Laporan BMN												
7	Penyusunan Laporan Wasdal												
8	Pengadaan Barang/Jasa												
9	Penyusunan Iplan 2026												
10	Penyusunan SKP												
Tim Statistik Sosial													
1	Survei Angkatan Kerja Nasional Februari												
2	Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus												
3	Susenas Maret												
4	Seruti												
5	Pendataan Podes												
6	Penyusunan Statistik Politik Dan Keamanan												
7	Survei Prilaku Anti Korupsi												
8	Desa Cantik												
9	Susenas September												
Tim Harga													
1	Survei Harga Konsumen												
	- HK 1.1												
	- HK 1.2												
	- HK 2.1												
	- HK 2.2												
	- HK 6												
2	Survei Harga Perdagangan Besar												
3	HPS												
4	HPJ												
5	SHKK												
6	SVPEB												
7	SVK												
8	SKHR Idul Fitri												
9	SKHR Natal dan Tahun Baru												
10	SHMP												
11	SHPP												
12	BOQ												
13	IHPB												
Tim Niaga dan Jasa													
1	Poldis												
2	PJ II.5												
3	Simoppel												
4	Angkutan Udara III/1												
5	SAPB Jembatan Terminal												
6	STKU												
7	Survei Profil Pasar												
8	Pergudangan												
Tim KTIP													
1	Survei Lembaga Keuangan Kpoerasi Simpan Pinjam												
2	Survei Lembaga Keuangan Pedagang Valuta Asing												
3	Survei Statistik Keuangan BUMD												
4	Survei Objek Daya Tarik Wisata (VDTW)												
5	Survei Usaha Penyedia Jasa Akomodasi Tahunan (VHTL)												
6	Survei Usaha Penyedia Jasa Akomodasi Bulanan (VHTS)												
7	Survei Usaha Penyedia Makan Minum Skala Besar (V-Rest UMB)												
8	Survei Usaha Penyedia Makan Minum Skala Kecil (V-Rest UMK)												
9	Updating Direktori Penyedia Jasa Pariwisata												
10	Survei Karakteristik Usaha (SKU)												

No	Kegiatan	Jadwal Kegiatan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
Tim Statistik Produksi													
1	Survei IBS Bulanan												
2	Survei Industri Mikro Kecil Tahunan												
3	Laporan Bulanan Pemotongan Ternak (LPTB)												
4	Survei KSA Padi												
5	Survei KSA Jagung												
6	Survei Ubinan Tahun 2024												
7	Survei Ekonomi Pertanian												
8	Survei Tahunan Perusahaan Pertambangan Non Minyak dan Gas Tahun 2024												
9	Survei Tahunan Perusahaan Gas Tahun 2024												
10	Survei Tahunan Perusahaan Pertambangan Migas Tahun 2024												
Tim Neraca Produksi dan Neraca Konsumsi													
1	SKTNP Barang												
2	SKTNP Jasa												
3	SKNP												
4	SKSJ												
5	Indepth Study SEEA Perekonomian Hijau												
6	SKLNPT Triwulan 1												
7	SKLNPT Triwulan 2												
8	SKLNPT Triwulan 3												
9	SKLNPT Triwulan 4												
10	Survei Khusus Lembaga Non- Profit yang Melayani Rumah Tangga (SKLNP) Tahunan												
11	Survei Khusus Struktur Input Pemerintah (SKSIP)												
12	Survei Khusus Perusahaan Swasta (SKPS)												
13	Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI)												
14	Survei Penyusunan Disagregasi PMTB (SPD-PMTB)												
Tim Analisis													
1	Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat												
2	Publikasi Statistik Daerah												
	Publikasi Indeks Pembangunan Gender Kota Palembang Tahun 2024												

Lampiran 7. Response Rate Survei Berbasis Usaha dan Rumah Tangga

No	Nama Survei	Target Tahun 2024	Target PK 2024	Kumulatif s.d Desember		% Responrate Terhadap Target PK Tahun 2024
				Realisasi	Persentase Responrate	
A. FUNGSI SOSIAL		2015	1934	1992	98,86	102,98
1	Survei Angkatan Kerja Nasional (sakernas) Februari 2024	190		188		
2	Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (seruti) triwulan I 2024	767		751		
3	Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) Maret 2024	858		855		
4	Survei Angkatan Kerja Nasional (sakernas) Agustus 2024	200		198		
B. FUNGSI PRODUKSI		2491	1993	2467	99,04	123,80
1	Survei Hortikultura Dan Indikator Pertanian	648		648	100,00	
2	Pendataan lapangan Laporan pemotongan ternak bulanan	12		12	100,00	
3	Pendataan lapangan pelabuhan perikanan dan TPI	4		4	100,00	
4	Sampel Survei Perusahaan Kehutanan	14		8	57,14	
5	STPIM (Survei Industri Besar Sedang Tahunan)	80		73	91,25	
6	IMK Tahunan	481		481	100,00	
7	Survei Captive Power Tahun 2024	59		51,00	86,44	
8	Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih Tahun 2024	3		3	100,00	
9	Survei Tahunan Perusahaan Listrik Tahun 2024	2		2	100,00	
10	Survei Tahunan Perusahaan Gas Tahun 2024	2		2	100,00	
11	Survei Tahunan Perusahaan Pertambangan Migas Tahun 2024	1		1	100,00	
12	Survei Tahunan Perusahaan Pertambangan Non Minyak dan Gas Tahun 2024	2		2	100,00	
13	Survei Konstruksi Tahunan (SKTH)	127		127	100,00	
14	Survei Konstruksi Triwulan (1,2,3,4) (SKTR)	211		211	100,00	
15	Survei Ekonomi Pertanian (UPB & UTL)	845		842	99,64	
C. FUNGSI DISTRIBUSI		4625	3700	4599	99,44	124,30
14	Survei Pola Distribusi Perdagangan	55		47	85,45	
15	Sampel Survei Penyusunan Diagram Timbang Harga Perdagangan Besar 2024 (IHPB)	100		100	100,00	
16	PJ II/5	1		1	100,00	
17	Simoppel	12		12	100,00	
18	Udara III/1	12		12	100,00	
19	SAPB Jembatan Timbang	8		8	100,00	
20	Survei Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan	182		184	101,10	
21	Survei Komoditas (HPB)	1452		1452	100,00	
22	Sampel BoQ Kabupaten/Kota	6		6	100,00	
23	Survei Harga Kemahalan Konstruksi	156		156	100,00	
24	Survei Koperasi Simpan Pinjam	49		49	100,00	
25	Survei Pedagang Valuta Asing	7		7	100,00	
26	Survei Statistik Keuangan BUMD	12		12	100,00	
27	Survei Karakteristik Usaha	210		210	100,00	
28	Survei Daya Tarik Wisata (VDTW)	14		17	121,43	
29	Survei Jasa Akomodasi (VHTL)	253		231	91,30	
30	Survei VHTS Bulanan	2088		2088	100,00	
31	Survei Penyedia Makan Minum VREST UMB	8		7	87,50	
D. FUNGSI NAWAS		766	613	766	100,00	125,00
31	SKTNP Barang	20		20	100,00	
32	SKTNP Jasa	452		452	100,00	
33	Indepth Study Sisnerling	5		5	100,00	
34	SKSI	24		24	100,00	
35	SKNP	221		221	100,00	
36	SKPS	8		8	100,00	
37	SKSPPI	30		30	100,00	
38	Survei Disagregasi PMTB	6		6	100,00	
Total Survei Berbasis Usaha		7882	6306	7832	99,37	124,21

Lampiran 8

Judul Publikasi ARC BPS Kota Palembang

No.	Judul	Periode Terbit	Bahasa	Jadwal Rilis	Status
1	Kota Palembang Dalam Angka 2024	Tahunan	Indonesia dan Inggris	28 Feb.2024	Rilis Tepat Waktu
2	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Menurut Lapangan Usaha 2019-2023	Tahunan	Indonesia dan Inggris	4 Apr. 2024	Rilis Tepat Waktu
3	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Menurut Pengeluaran 2019-2023	Tahunan	Indonesia	30 Apr.2024	Rilis Tepat Waktu
4	Kecamatan Seberang Ulu I Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
5	Kecamatan Alang-alang Lebar Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
6	Kecamatan Kertapati Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
7	Kecamatan Plaju Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
8	Kecamatan Kalidoni Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
9	Kecamatan Gandus Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
10	Kecamatan Ilir Timur I Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
11	Kecamatan Bukit Kecil Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
12	Kecamatan Ilir Timur II Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
13	Kecamatan Sukarami Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
14	Kecamatan Sematang Borang Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
15	Kecamatan Ilir Barat II Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
16	Kecamatan Kemuning Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
17	Kecamatan Jakabaring Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
18	Kecamatan Sako Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
19	Kecamatan Ilir Barat I Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
20	Kecamatan Seberang Ulu II Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
21	Kecamatan Ilir Timur III Dalam Angka Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2024	Rilis Tepat Waktu
22	Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024	Tahunan	Indonesia	13 Des.2024	Rilis Tepat Waktu
23	Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Palembang 2024	Tahunan	Indonesia	4 Desember 2024	Rilis Tepat Waktu

Judul Publikasi Non ARC BPS Kota Palembang

No.	Judul	Jadwal Rilis	Status
1	Statistik Daerah Kota Palembang 2024	13 Sept 2024	Rilis
2	Statistik Ketenagakerjaan Kota Palembang 2023	27 Des.2024	Rilis
3	Indikator Kesejahteraan Kota Palembang Tahun 2024	13 Des.2024	Rilis
4	Statistik Potensi Desa Kota Palembang 2024	20 Des 2024	Rilis
5	Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Perikanan Kota Palembang	23 Agst 2024	Rilis
6	Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Kehutanan Kota Palembang	16 Agst 2024	Rilis
7	Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Perkebunan Kota Palembang	23 Agst 2024	Rilis
8	Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Pangan Kota Palembang	16 Agst 2024	Rilis
9	Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Hortikultura Kota Palembang	16 Agst 2024	Rilis
10	Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Peternakan Kota Palembang	9 Agst 2024	Rilis
11	Indeks Pembangunan Gender Kota Palembang Tahun 2024	31 Des 2024	Rilis



SENSUS
EKONOMI
2026

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG**

Jl. P.A.K. Abdul Rohim No 2 Kel. Talang Semut Palembang
Telp/fax : 0711-352184, email : bps1671@bps.go.id